



LAPORAN KINERJA 2022

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



LAPORAN KINERJA 2022

BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Penyusunan laporan kinerja ini sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran program beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Badan Bahasa tahun 2022, yang terdiri atas lima sasaran program (SP) dan enam indikator kinerja program (IKP). Secara umum, Badan Bahasa telah berhasil merealisasikan kerjanya melebihi target yang telah ditetapkan.

Sepanjang tahun 2022 ini, Badan Bahasa terus melakukan berbagai inovasi program melalui inisiatif-inisiatif baru yang lebih membumi dan dapat mengukuhkan capaian atau perwujudan tugas dan fungsi lembaga ini. Moto *Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat* yang terus menerus didengungkan juga telah terinternalisasi secara baik dalam ruh atau nurani para pegawai di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini tecermin di dalam sikap kerja para pegawai Badan Bahasa yang dari hari ke hari terlihat semakin percaya diri akan wibawa, martabat, atau muruah lembaganya.

Penataan dan penajaman program menjadi tiga program prioritas, yaitu literasi kebahasaan dan kesastraan, perlindungan bahasa dan sastra, dan internasionalisasi bahasa Indonesia, telah menjadi arah kebijakan utama Badan Bahasa. Dengan adanya penetapan dan penyusunan program prioritas ini, pola kerja yang ada di Badan Bahasa menjadi semakin terarah, fokus, dan berdaya. Kini, Badan Bahasa betul-betul fokus kepada sejumlah pekerjaan yang diyakini akan dapat memberikan pengaruh dan manfaat besar terhadap masyarakat secara luas. Hal ini kian diperkuat dengan adanya prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan program di lingkungan Badan Bahasa, yaitu fokus, berkelanjutan, dan kolaborasi.

Penataan manajemen di lingkungan Badan Bahasa juga tak kalah pentingnya. Strategi pelaksanaan program melalui Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) menjadi karakteristik khas yang ada di lingkungan Badan Bahasa. Kerangka kebijakan dalam bentuk KKLP ini menjadi platform program yang dibentuk berdasarkan fungsi, bukan struktur, yang lingkup kerjanya dari hulu sampai ke hilir dengan lima pilar program, yaitu analisis-sintesis, peningkatan kompetensi, publikasi, diseminasi, dan layanan

profesional. KKLP dibentuk sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Bahasa dan merupakan kelompok pegawai yang memiliki kesamaan minat dan kepakaran dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu.

Selanjutnya, melalui laporan ini disajikan gambaran objektif tentang capaian kinerja yang dihasilkan Badan Bahasa tahun 2022, sesuai dengan tugas dan fungsinya serta program prioritas Badan Bahasa. Selain itu, juga disajikan tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja serta strategi penyelesaiannya sebagai acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja tahun mendatang.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan, serta dalam upaya mengukuhkan moto Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak awal hingga terselesaikannya laporan kinerja Badan Bahasa tahun 2022.

Jakarta, 13 Februari 2023
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.
NIP 196711161992031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR _____	iii
DAFTAR ISI _____	v
DAFTAR GAMBAR _____	vii
DAFTAR TABEL _____	ix
DAFTAR GRAFIK _____	xi
IKHTISAR EKSEKUTIF _____	xiii
BAB I PENDAHULUAN _____	1
A. Gambaran Umum _____	1
B. Dasar Hukum _____	5
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi _____	5
D. Isu Strategis _____	7
E. Peran Strategis _____	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA _____	9
A. Visi _____	9
B. Misi _____	9
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah _____	10
D. Tujuan Strategis _____	11
E. Perjanjian Kinerja _____	12
F. Program Prioritas _____	13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGEMBANGAN

DAN PEMBINAAN BAHASA _____ 15

- A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____ 15
- B. Realisasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____ 77
- C. Inovasi, Penghargaan, dan *Program Crosscutting/Collaborative* _____ 82

BAB IV PENUTUP _____ 93

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja Triwulan IV
4. SK Tim Penyusun LAKIP
5. SK Tim Reviu LAKIP
6. Pernyataan Telah Direviu
7. Catatan Hasil Reviu Itjen Kemendikbudristek
8. Inovasi
9. Penghargaan
10. Lembar Hasil Evaluasi Kinerja
11. SK Penghargaan ZI-WBK
12. Judul Buku Bacaan Literasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur	1
Gambar 2.	Sejarah Berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	2
Gambar 3.	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Pegawai Badan Bahasa pada Kegiatan Kunjungan Menteri, 23 November 2022 di Ruang Sasadu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	3
Gambar 4.	Stuktur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	6
Gambar 5.	Peta Sebaran Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa dan Kantor Bahasa	7
Gambar 6.	Perubahan Pagu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022	13
Gambar 7.	Program prioritas Badan Bahasa	13
Gambar 8.	Sebaran jumlah peserta uji UKBI di setiap provinsi tahun 2022	22
Gambar 9.	Lini Masa Penyusunan Buku Bacaan Literasi Tahun 2022	23
Gambar 10.	Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Fasilitator Pendampingan Pemanfaatan Buku Literasi Tahun 2022	27
Gambar 11.	Inovasi layanan dalam Satu Superaplikasi: Halo Bahasa	28
Gambar 12.	Statistik Lengkap KBBI	30
Gambar 13.	Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia: Kembali ke EYD	31
Gambar 14.	Aplikasi SIPEBI Sudah Diunduh Sebanyak 84.546 kali	31
Gambar 15.	Langkah Pembinaan tahun 2022	33
Gambar 16.	Pendampingan Ahli Bahasa melalui Grup WA	35
Gambar 17.	Lingua Franca Plus, Peta Jalan Internasionalisasi Bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	36
Gambar 18.	Sebaran Program BIPA di Dunia	39
Gambar 19.	Pelaksanaan Pembelajaran BIPA secara daring di KBRI Moskow, Rusia di Universitas Sofia, Bulgaria KBRI Den Haag, Belanda Tahun 2022	41
Gambar 20.	Data Capaian Pemelajar BIPA 2015--2022	42
Gambar 21.	Pelaksanaan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA XII di Universitas Pendidikan Indonesia, 8--10 November 2022	46
Gambar 21.	Kerja Sama Program BIPA dengan Hankuk University of Foreign Studies, Jakarta 12 Agustus 2022	47
Gambar 22.	Salah satu buku yang diterjemahkan	48
Gambar 24.	SK Menaker Nomor 145 tahun 2022	49
Gambar 25.	Objek Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2022 dan Sasaran Baru Tahun 2023	56
Gambar 26.	Lini Masa Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah	57
Gambar 27.	Capaian Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah tahun 2022	57

Gambar 28 . Pengembangan Model Revitalisasi Bahasa Daerah _____	59
Gambar 29 . Berbagi Praktik baik program Revitalisasi Bahasa Daerah di forum UNESCO, Paris 13 Desember 2022 _____	61
Gambar 30. Rapat Kerja II tahun 2022 yang dilaksanakan di Bandung dihadiri oleh seluruh kepala satker di lingkungan Badan Bahasa _____	64
Gambar 31. Tahapan Pelaksanaan SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	65
Gambar 32. Lini Masa Reviu Dan Evaluasi Renstra _____	66
Gambar 33. Dokumentasi Penilaian Akhir SAKIP dengan Tim Inspektorat Jenderal _____	66
Gambar 34. Jadwal Pelaksanaan Pendampingan SAKIP di Balai dan Kantor _____	67
Gambar 35. Lini masa Tahapan Pendampingan SAKIP Tahun 2022 _____	67
Gambar 36. Proses Pemantauan Program dan Anggaran _____	67
Gambar 37. Lini masa Pelaksanaan Manajemen Risiko _____	68
Gambar 38. Dokumentasi Pendampingan NKA melalui Daring _____	69
Gambar 39. Mekanisme Penilaian ZI-WBK/WBBM Satker Tahun 2022 _____	71
Gambar 40. Pendampingan Pengelolaan Keuangan di KBP NTT dan BBP Papua _____	73
Gambar 41. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan _____	73
Gambar 42. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan _____	74
Gambar 43. Penghargaan dari KBRI Helsinki (Finlandia dan Etonia) atas dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) secara daring. _____	83
Gambar 44. Penghargaan dari KBRI Bern (Swiss dan Liechtenstein) atas kerja sama dan kolaborasi dalam pengembangan pengajaran bahasa Indonesia di Swiss dan Liechtenstein. _____	83
Gambar 45. Penghargaan IDEAS 2022 Kategori Kebijakan Isu Sosial melalui Program Komunikasi Revitalisasi Bahasa Daerah dari Humas Indonesia diterima langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bahasa (Badan Bahasa), E. Aminudin Aziz, pada Jumat, 5 Agustus 2022 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. _____	84
Gambar 46. Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Memanfaatkan UKBI sebagai Instrumen Uji bagi Pegawai, Karyawan, Anggota Asosiasi, Mahasiswa, atau Pelajar di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat _____	86
Gambar 47. Para pemangku kebijakan menandatangani nota komitmen bersama dan rekomendasi terkait pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Maluku Utara _____	87
Gambar 48. Pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis untuk Pasukan Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XXXVII-MINUSCA CAR _____	89
Gambar 49. Kunjungan Kepala Badan Bahasa ke UNESCO, Jakarta, dalam rangka Melaporkan Hasil Karya Penerjemahan Antologi Cerita Anak Indonesia, pada tanggal 31 Januari 2023 _____	89
Gambar 50. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan kunjungan kerja ke Université de La Rochelle (ULR) pada tanggal 14 Desember 2022 _____	89
Gambar 51. Hasil Kolaborasi dengan Biro Hukum Kemdikbudristek, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbudristek, Biro SDM Kemdikbudristek, KemenpanRB, BKN, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham. _____	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Berdasarkan Satker, Jenjang Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin _____	
Tabel 2	Matriks Renstra 2020—2021 Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 _____	10
Tabel 3	Matriks Renstra 2022—2024 Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 _____	10
Tabel 4	Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terkait Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan _____	11
Tabel 5	Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	11
Tabel 6	Target pada Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022 _____	12
Tabel 7	Pagu Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022 _____	13
Tabel 8	Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	15
Tabel 9	Target dan Realisasi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya _____	21
Tabel 11	Judul Video Animasi Pembelajaran Literasi Numerasi bagi Anak Jenjang SD Kelas Rendah _____	24
Tabel 12	Data Cetak dan Kirim Buku Literasi Tahun 2022 _____	25
Tabel 13	Jumlah Fasilitator Pendampingan Pemanfaatan Buku Literasi yang Telah Dilatih BBP Bahasa Pada Tahun 2022 _____	26
Tabel 14	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya _____	32
Tabel 15	Target dan Realisasi IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya _____	34
Tabel 16	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Lembaga Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya _____	36
Tabel 17	Target dan Realisasi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia _____	40
Tabel 18	Produk Penerjemahan Buku Penunjang Diplomasi Kebahasaan untuk Cideramata pada Presidensi G-20 di Bali _____	48
Tabel 19	Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia _____	50
Tabel 20	Rumus Penghitungan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya _____	53
Tabel 21	Target dan Realisasi IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah Tahun 2021 _____	55
Tabel 22	Target dan Realisasi IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Tahun 2022 _____	60
Tabel 24	Rentang Nilai, Predikat, dan Interpretasi Penilaian SAKIP _____	62

Tabel 25 Target dan Realisasi IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	62
Tabel 26 Nilai SAKIP Seluruh Satker di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	63
Tabel 27 Kendala, Strategi, dan Langkah Antisipasi IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	69
Tabel 28 Target dan Realisasi IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM _____	71
Tabel 29 Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT _____	73
Tabel 30 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM _____	75
Tabel 31 Realisasi Anggaran Per Satker _____	76
Tabel 32 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja _____	77
Tabel 34 Realisasi Per Sasaran Program _____	80
Tabel 35 Capaian Perjanjian Kinerja _____	80
Tabel 36 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Literasi Kebahasaan dan Kesastraan _____	85
Tabel 38 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Internasionalisasi Bahasa Indonesia _____	88
Tabel 39 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Dukungan Manajemen _____	90
Tabel 40 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja _____	93
Tabel 41 Rincian Output (RO) Prioritas _____	94

DAFTAR GRAFIK

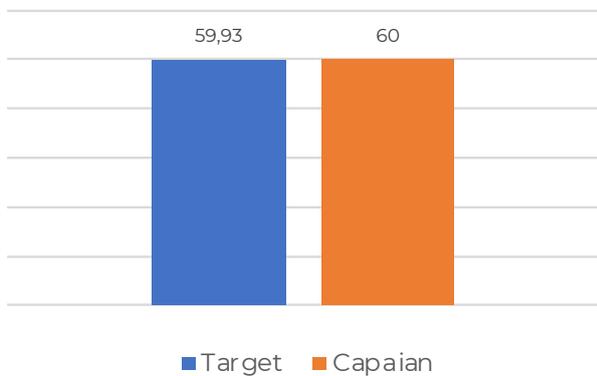
Grafik 1	Capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya _____	21
Grafik 2	Perkembangan Jumlah Entri KBBi _____	29
Grafik 3	Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya _____	34
Grafik 4	Capaian IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia _____	40
Grafik 5	Capaian Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya _____	55
Grafik 6	Capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa _____	63
Grafik 7	Capaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM _____	72
Grafik 8	Realisasi Anggaran Per Satker _____	77



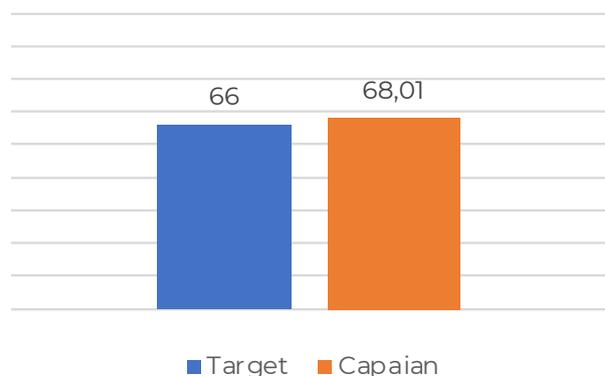
IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian lima sasaran program (SP) dengan enam indikator kinerja program (IKP) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022. Capaian kinerja tahun sebelumnya tidak dapat disandingkan karena ada penyesuaian dan penyempurnaan Renstra Badan Bahasa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Berikut ini, capaian kinerja Badan Bahasa secara umum.

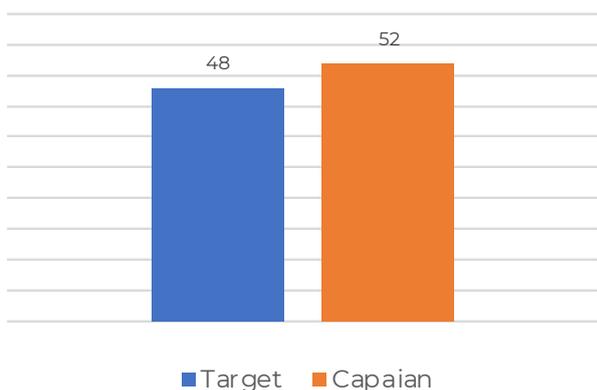
IKP 1.1 Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya Tahun 2022



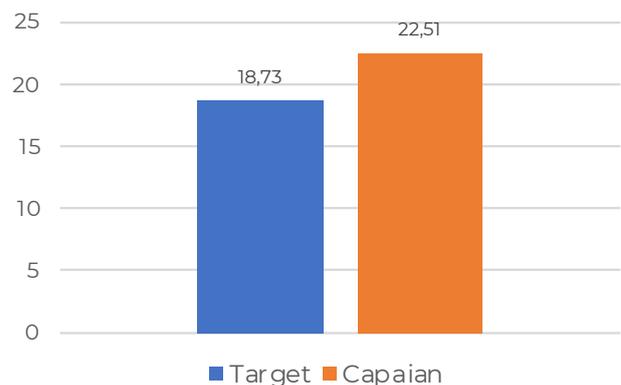
IKP 1.2 Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya Tahun 2022



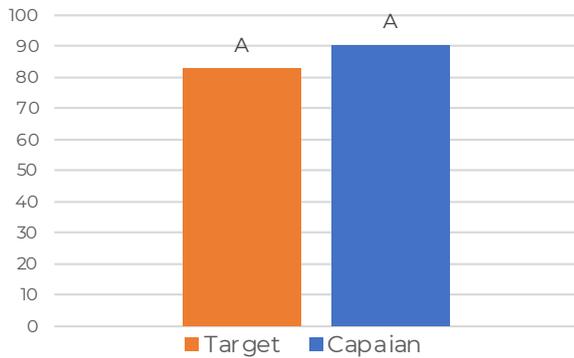
IKP 2.1 Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia Tahun 2022



IKP 3.1 Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Tahun 2022



IKP 4.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022



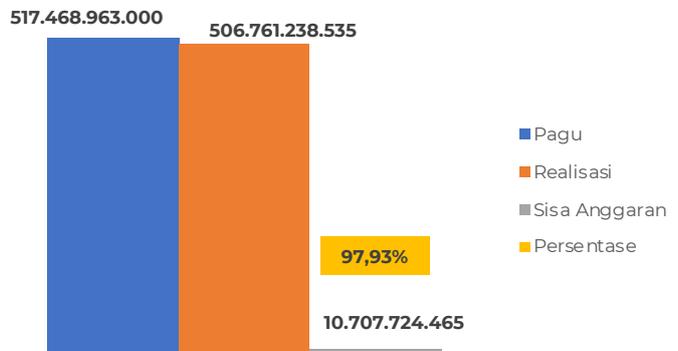
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2022



Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022



Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022



Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi
1. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak selaras dengan pedoman/petunjuk teknis KKLP	Melaksanakan bimbingan teknis kepada anggota KKLP terkait implementasi pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan	Melakukan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepada seluruh pegawai
2. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi untuk peningkatan capaian kinerja	Melaksanakan koordinasi secara rutin dan terpadu antara pimpinan satker, koordinator KKLP dan pengelola keuangan	Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara rutin, dilengkapi dengan rekomendasi dan rencana tindaklanjutnya
3. Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia belum mengintegrasikan program di berbagai instansi secara optimal	Penyusunan peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia yang mengintegrasikan program di berbagai instansi	Upaya peta jalan internasionalisasi menjadi peraturan mengikat secara kelembagaan
4. Belum seluruh pegawai memahami SAKIP dengan baik dan benar	Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap implementasi PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021	Peningkatan pelibatan seluruh pegawai dalam implementasi SAKIP
5. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pembangunan ZI-WBK masih perlu ditingkatkan	Melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap implementasi PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021	Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai melalui pendampingan ke Satker bersama mitra kerja terkait

BAB I

PENDAHULUAN



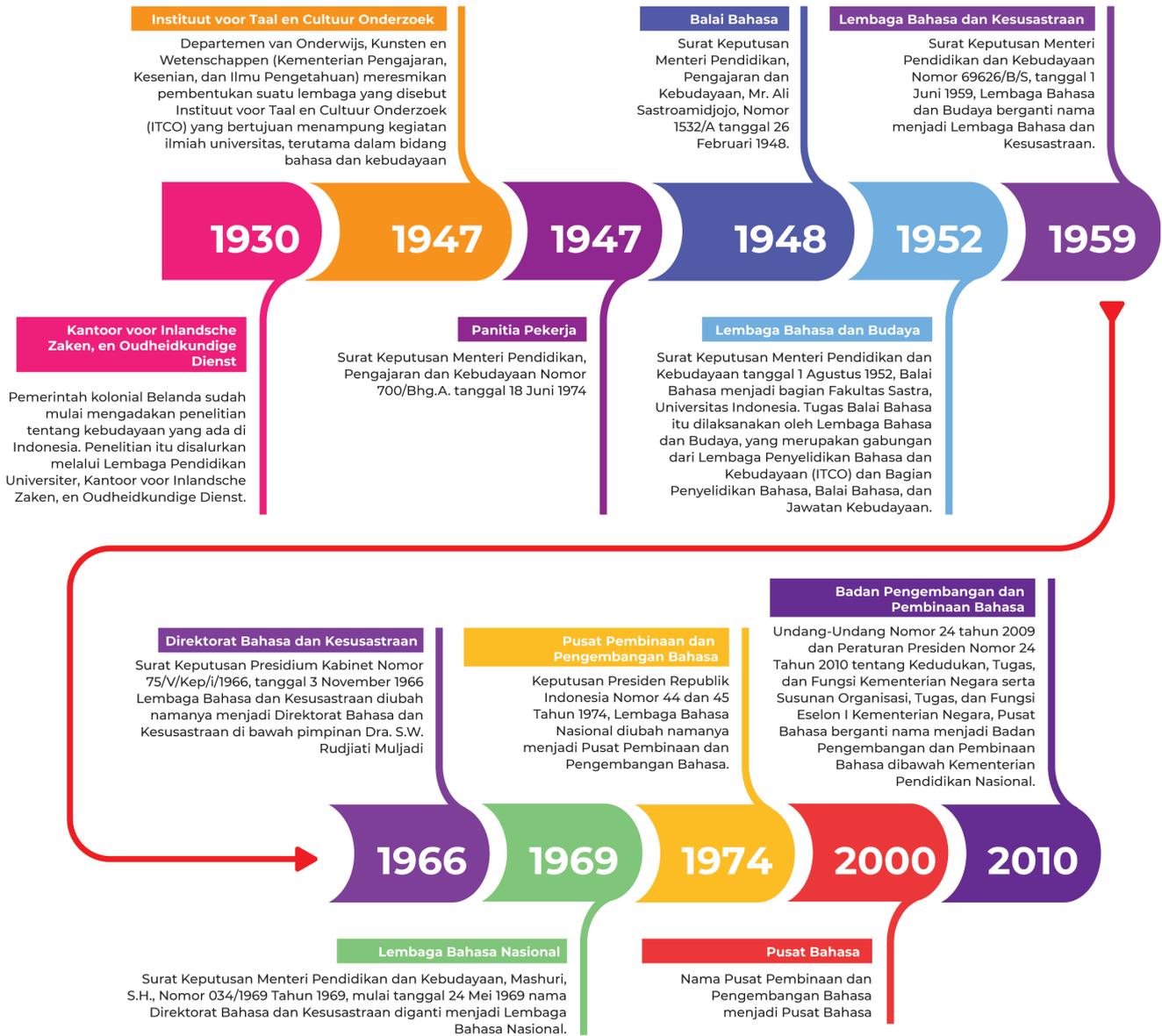
A. Gambaran Umum



Gambar 1. Gedung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menjadi salah satu lembaga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tertua yang cikal-bakalnya sudah dirintis sebelum Indonesia merdeka. Sejak tahun 1930, Badan Bahasa fokus untuk menangani persoalan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Secara lengkap, perjalanan sejarah Badan Bahasa dapat dilihat melalui laman resmi Badan Bahasa: <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/sejarah>.

Sejarah Berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Gambar 2. Sejarah Berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Badan Bahasa dipimpin oleh Prof. Endang Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. sejak tanggal 8 Mei 2020 dengan wilayah kerja di seluruh Indonesia. Badan Bahasa dalam melaksanakan tugas dan fungsi didukung oleh empat satker pusat dan 30 UPT di daerah dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) sebanyak 1.125 orang,

Tabel 1
Jumlah Pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Berdasarkan Satker, Jenjang Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jenjang Pendidikan
BB Provinsi Aceh	37	BB Provinsi Sulawesi Tengah	16	KB Provinsi Lampung	30	SD: 2 SMP: 2 SMA: 100 SMK: 20 D-I: 1 D-III: 64 D-IV: 2 S-1:701 S-2: 210 S-3:23
BB Provinsi Bali	30	BB Provinsi Sulawesi Utara	21	KB Provinsi Maluku	26	
BB Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	37	BB Provinsi Sumatera Barat	29	KB Provinsi Maluku Utara	24	
BB Provinsi Jawa Barat	35	BB Provinsi Sumatera Selatan	38	KB Provinsi Nusa Tenggara Barat	31	
BB Provinsi Jawa Tengah	37	BB Provinsi Sumatera Utara	37	KB Provinsi Nusa Tenggara Timur	16	
BB Provinsi Jawa Timur	38	KB Provinsi Banten	20	KB Provinsi Sulawesi Tenggara	28	
BB Provinsi Kalimantan Barat	26	KB Provinsi Bengkulu	19	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	64	
BB Provinsi Kalimantan Selatan	28	KB Provinsi Gorontalo	16	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	72	
BB Provinsi Kalimantan Tengah	32	KB Provinsi Jambi	35	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	56	
BB Provinsi Papua	30	KB Provinsi Kalimantan Timur	25	Sekretariat Badan Bahasa	93	
BB Provinsi Riau	34	KB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	12	Badan Bahasa	1	
BB Provinsi Sulawesi Selatan	32	KB Provinsi Kepulauan Riau	20	Total	1.125	Golongan Gol. II: 71 Gol. III: 936 Gol. IV: 118



Gambar 3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Pegawai Badan Bahasa pada Kegiatan Kunjungan Menteri, 23 November 2022 di Ruang Sasadu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, semua satuan kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. Berdasarkan kepemilikan tanah dan gedung, terdapat empat kategori satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa, yaitu

1. memiliki tanah dan bangunan: 19 satker;
2. memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi: 5 satker;
3. memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikbudristek: 8 satker;
4. belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri: 2 satker.

Pada tahun 2022 ini, terdapat 5 satker yang memiliki perubahan kondisi tanah. Satker tersebut mendapatkan hibah dari Pemerintah Provinsi ataupun mendapatkan pengalihan aset BMN dari Satuan Kerja Kemendikbudristek lainnya.

Rincian perolehan aset tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hibah tanah dari Pemerintah Provinsi

Satuan kerja tersebut mendapatkan hibah tanah dari pemerintah provinsi sedangkan untuk gedung dan bangunannya selama ini merupakan milik Balai/Kantor Bahasa bersangkutan. Satuan Kerja yang mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Provinsi, yaitu

- a. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah
- b. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur

2. Pelimpahan Aset BMN dari Ex PAUD Dikmas

Satuan kerja tersebut mendapatkan pelimpahan tanah beserta gedung dan bangunan milik PAUD Dikmas yang telah dilikuidasi sebelumnya. Satuan kerja yang mendapatkan pelimpahan tersebut yaitu

- a. Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah
- b. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Untuk melaksanakan program bidang kebahasaan dan kesastraan, Badan Bahasa menetapkan strategi pelaksanaan program melalui platform Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP). Platform ini merupakan upaya fungsionalisasi para tenaga fungsional di lingkungan Badan Bahasa, baik satker pusat maupun satker UPT, agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan minat dan kepakarannya dalam suatu bidang keahlian dan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan tertentu. Pola kerja KKLP bersifat fungsional, lintas struktur, dan holistik-integratif dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Fungsional

Melalui prinsip ini, KKLP bekerja menurut kepakaran fungsional keilmuan para anggotanya yang dikelompokkan menurut hasil pemetaan jenis-jenis kepakaran guna mengukuhkan kepakaran individu dan kelompok serta mengoptimalkan layanan yang dapat diberikan oleh anggota KKLP kepada mitra kerjanya.

b. Lintas Struktur (Pusat-UPT)

Dengan prinsip ini, KKLP dibentuk berdasarkan kepakaran anggotanya yang dapat tersebar di satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan Badan Bahasa. Melalui KKLP, pegawai fungsional di satuan kerja pusat dan UPT akan dikumpulkan di dalam kelompok kepakaran tertentu guna memberikan layanan profesional yang optimal.

c. Holistik-Integratif

Melalui prinsip ini, KKLP menyelenggarakan tugas dan fungsi pengembangan kepakaran dan

layanan dalam ‘satu atap-satu rangkaian’ mulai dari kegiatan (1) analisis-sintesis substansi kebahasaan dan kesastraan, (2) pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota, (3) diseminasi, publikasi, sampai dengan penyediaan layanan profesional yang dapat diberikan kepada mitra kerjanya.

Pada tahun 2022, Badan Bahasa melaksanakan penyalarsan dan penyempurnaan sasaran, indikator, dan target kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024.

Berdasarkan penyalarsan dan penyempurnaan kebijakan tersebut, laporan kinerja (Lakin) Badan Bahasa disusun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2020—2024.

B. Dasar Hukum

<p>1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang</p> <p>Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025</p>	<p>2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang</p> <p>Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan</p>	<p>3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang</p> <p>Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>4 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang</p> <p>Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia</p>
<p>5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang</p> <p>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	<p>7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang</p> <p>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang</p> <p>Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>
<p>9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang</p> <p>Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024</p>	<p>10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang</p> <p>Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</p>	<p>11 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang</p> <p>Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</p>	<p>12 Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang</p> <p>Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020–2024</p>

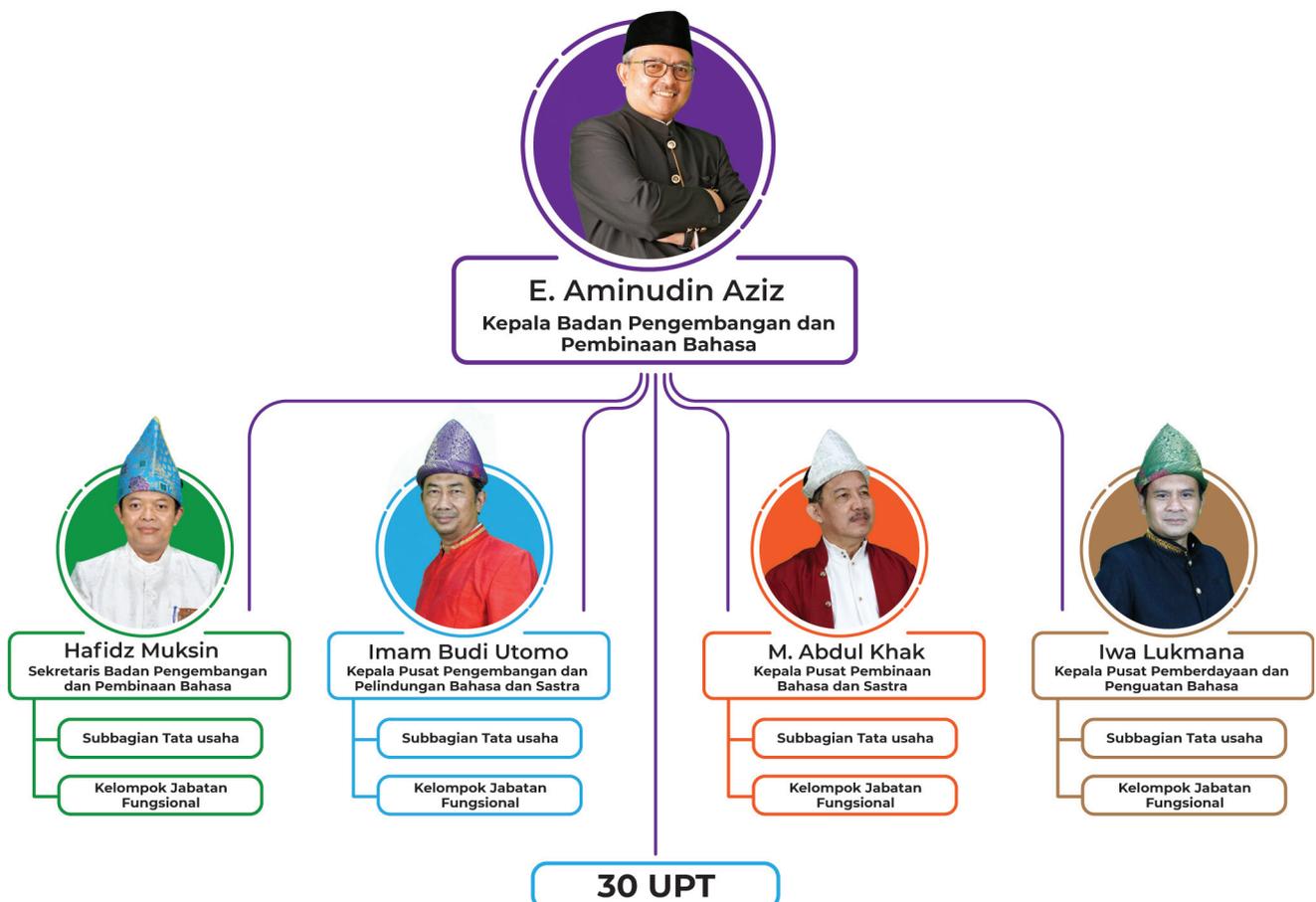
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

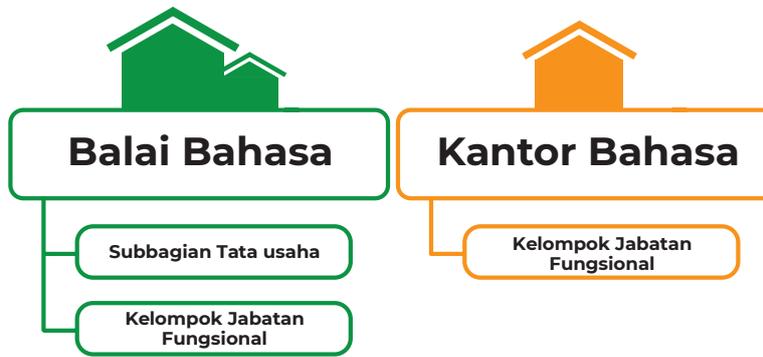
Permendikbud 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terdiri atas empat Eselon II, yaitu Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Selain empat Eselon II, Badan Bahasa secara tugas dan fungsi juga didukung oleh 30 unit pelaksana teknis (UPT) yang terdiri atas 17 Balai Bahasa dan 13 Kantor Bahasa.

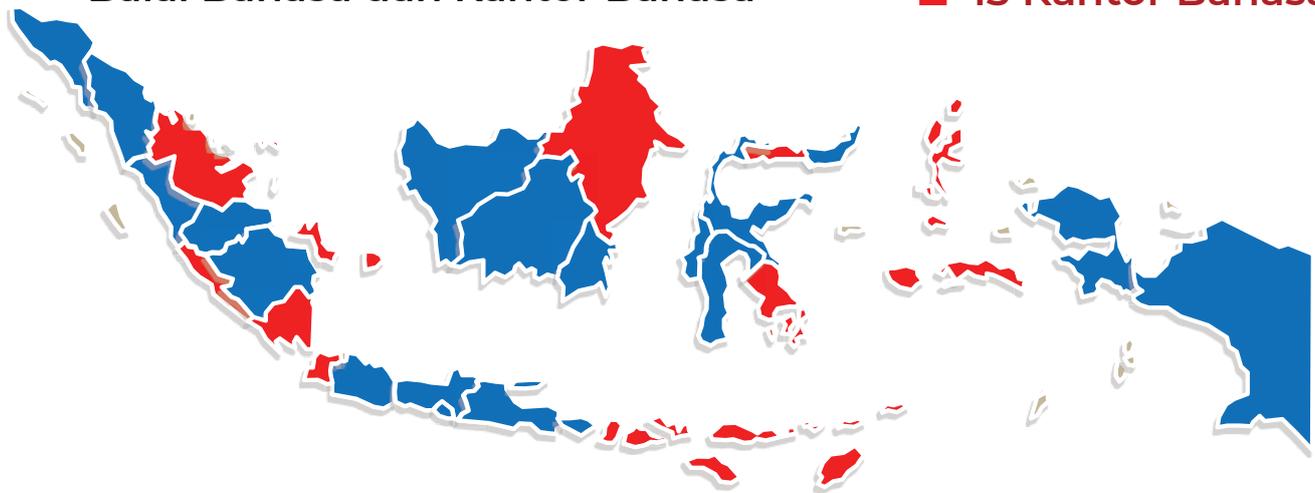


Gambar 4. Struktur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Sebaran Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

■ 17 Balai Bahasa
■ 13 Kantor Bahasa



Gambar 5. Peta Sebaran Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa dan Kantor Bahasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta dalam rangka meningkatkan produk dan layanan kepada masyarakat, Badan Bahasa memiliki moto: **Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat.**

Badan Bahasa Bermartabat Bermanfaat

Bermartabat : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah lembaga yang memiliki wibawa dan marwah yang tinggi dan memiliki tugas yang sangat besar dan mulia, yakni mengawal salah satu identitas bangsa yaitu bahasa.

Bermanfaat: Keberadaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Badan Bahasa Bermartabat-Bermanfaat memiliki nilai filosofis yang mengarah kepada wujud kebanggaan terhadap lembaga karena marwahnya dan nilai kebermanfaatannya lembaga ini untuk masyarakat. Dengan demikian, semua pegawai akan melakukan hal yang terbaik untuk lembaganya.

D. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan yang dihadapi oleh Badan Bahasa, isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Adanya keterbatasan untuk mengakses produk-produk kebahasaan dan kesastraan untuk menunjang peningkatan kemampuan literasi di Indonesia.
2. Kemahiran berbahasa Indonesia perlu ditingkatkan.
3. Generasi muda cenderung mulai meninggalkan bahasa daerah.
4. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing belum digunakan sesuai dengan kedudukan dan perannya.
5. Kolaborasi dan sinergi lintas sektoral ditingkatkan untuk menguatkan peran bahasa Indonesia di kancah nasional dan internasional.
6. Peningkatan eselonisasi kantor bahasa menjadi balai bahasa.
7. Peningkatan pemahaman dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Bahasa.
8. Penguatan pembangunan budaya zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di seluruh lingkungan Badan Bahasa.

E. Peran Strategis

Badan Bahasa memiliki peran strategis dalam **Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan** yang diwujudkan melalui beberapa peran sebagai berikut.

1. Melestarikan dan mengembangkan bahasa dan sastra di nusantara.
2. Pelaksanaan pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra.
3. Melakukan pembakuan dan kodifikasi bahasa dan sastra.
4. Menyediakan produk-produk kebahasaan dan kesastraan.
5. Meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan kedudukan dan peran, salah satunya melalui pembinaan komunitas literasi .
6. Menyediakan bahan bacaan literasi dan numerasi ke daerah 3T serta menambah koleksi buku digital melalui budi.kemdikbud.go.id.
7. Membuat peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia untuk meningkatkan peran bahasa Indonesia di kancah internasional.
8. Menyediakan buku cerita anak Indonesia yang diterjemahkan ke dalam enam bahasa PBB dan diberikan kepada kepala negara peserta KTT G20 di Bali.
9. Meningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia.
10. Memperkuat manajemen dan tata kelola yang berkualitas untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Bahasa.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA



A. Visi

Visi Badan Bahasa

“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.”

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong-royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

B. Misi

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki misi sebagai berikut

Misi Badan Bahasa

1

Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.

2

Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional

3

Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.

4

Mengoptimalkan tatakelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

5

Mewujudkan layanan profesional kebahasaan.

C. Rencana Kinerja Jangka Menengah (Matriks Renstra 2020—2024)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2
Matriks Renstra 2020—2021
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target	
			2020	2021
SP 1	Meningkatnya Kemahiran Penutur Bahasa Indonesia			
IKP 1.1	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji	Persen	42	44
IKP 1.2	Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Persen	26	35
SP 2	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah			
IKP 2.1	Nilai Dimensi Budaya Literasi IPK (Indeks Pembangunan Kebudayaan)	Indeks	58,2	61,4
SP 3	Meningkatnya Daya Hidup Bahasa Daerah			
IKP 3.1	Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah	Indeks	0,55	0,56
SP 4	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional			
IKP 4.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	Negara	30	31
IKP 4.2	Jumlah Pemelajar BIPA	Orang	75.865	80.865
SP 5	Terwujudnya Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Berkualitas			
IKP 5.1	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Minimal BB	Predikat	BB	BB
IKP 5.2	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZIWBK/WBBM	Satker	5	5
IKP 5.3	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	92

Tabel 3
Matriks Renstra 2022—2024
Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SP	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan				
IKP 3.1.1	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persen	66	70	72
IKP 3.1.2	Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persen	59,93	75,96	91,99
SP	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional				
IKP 3.1.3	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	48	49	50
SP	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah				
IKP 3.1	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	18,73	19,67	20,54

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SP	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi				
IKP 5.3.11	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A
SP 5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek				
IKP 5.4.9	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	2	3	4

D. Tujuan Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam **pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan.**

Tabel 4
Tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Terkait Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
Pelestarian dan Pemajuan Budaya, Bahasa, dan Sastra Serta Pengarusutamaannya dalam Pendidikan	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	81
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,70
Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	87

Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan dan indikator kinerja sebagai berikut.

Tabel 5
Tujuan dan Indikator Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
1	Peningkatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan serta Pengarusutamaan Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan	Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	72
		Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	91,99
2	Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	50

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Keberhasilan 2024
3	Peningkatan Kelestarian Bahasa Daerah	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	20,54
4	Penguatan Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel	Pedikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
		Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	4

E. Perjanjian Kinerja

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020—2024, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Tabel 6
Target pada Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (PK Awal)	Target (PK Akhir)
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	66	66
	[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	59.93	59.93
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	48	48
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	18.73	18.73
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A
[SP 5] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2	2

Tabel 7
Pagu Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022

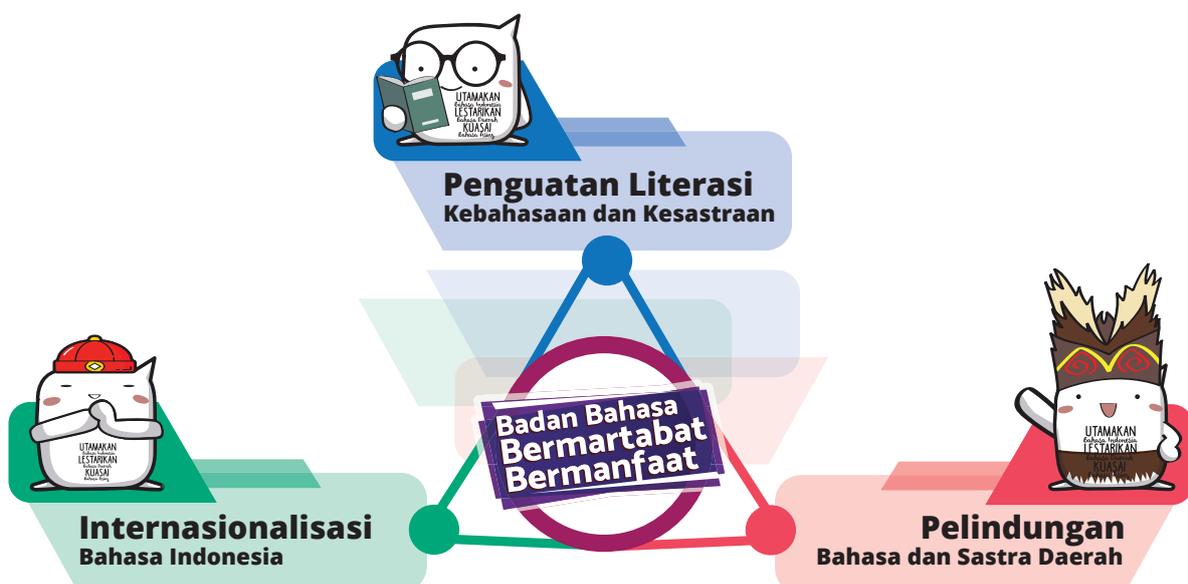
No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (PK Awal)	Alokasi (PK Revisi)
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp283.231.760.000,00	Rp244.889.426.000,00
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp22.700.794.000,00	Rp48.210.710.000,00
3	2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp62.214.674.000,00	Rp193.238.610.000,00
4	6702	Penguatan Diplomasia Kebahasaan	Rp35.201.257.000,00	Rp31.130.217.000,00
TOTAL			Rp403.348.485.000,00	Rp517.468.963.000,00

Perjanjian kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2022 mengalami lima kali revisi. Revisi dilakukan karena ada penambahan dan pengurangan pagu anggaran yang semula **Rp403.348.485.000,00** menjadi **Rp517.468.963.000,00**.



Gambar 6 . Perubahan Pagu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2022

F. Program Prioritas



Gambar 7. Program prioritas Badan Bahasa

1. Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Badan Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

2. Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

3. Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan.

Selaras dengan program prioritas Badan Bahasa, berikut ini Rincian Output (RO) Prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1. Penutur Bahasa Terbina.
2. Generasi Muda Terbina Program Literasi.
3. Lembaga Terfasilitasi Program BIPA.
4. Penutur Bahasa Teruji.
5. Partisipan Pelindungan Bahasa.
6. Partisipan Pelindungan Sastra.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA



Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) memasuki tahun ketiga periode 2020—2024. Target yang telah ditentukan pada tahun ketiga renstra akan disampaikan capaiannya pada bab ini beserta uraian capaian tahun 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Bahasa dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada bab ini juga akan diuraikan langkah, strategi, dan hambatan dalam upaya merealisasikan target. Badan Bahasa berupaya mencapai target yang telah ditetapkan dalam PK sebagai bentuk pertanggungjawaban, baik terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, maupun penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban itu akan disampaikan secara konsisten setiap tahun kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dapat dijadikan sebagai (1) bahan evaluasi kinerja lembaga; dan (2) bahan pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Badan Bahasa. Berikut ini capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Bahasa.

A. Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan lima Sasaran Program (SP) dengan enam Indikator Kinerja Program (IKP), dengan rata-rata persentase capaian kinerja adalah sebesar 121,94%, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut.

Tabel 8
Capaian Kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	66	68,01	103,04
	[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	59,93	60	100,11
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	48	52	108,3
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	18,73	22,51	120,2

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	100
[SP 5] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2	4	200

Sasaran Program 1: Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan



Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi aspek pengetahuan, teknologi, dan budaya harus terus mengembangkan budaya literasi. Pengembangan budaya literasi dilakukan melalui pendidikan yang terintegrasi mulai dari pendidikan nonformal dalam ranah keluarga, pendidikan formal di sekolah, maupun secara sosial di masyarakat. Pengembangan ini sejalan dengan prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 yang disepakati oleh *World Economic Forum* pada tahun 2015. Selain itu, literasi juga menjadi bagian penting dalam upaya penumbuhan budi pekerti. Seperti yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanaman Budi Pekerti salah satunya melalui aktivitas membaca.

Untuk mendukung hal tersebut, minat baca pada anak perlu dipupuk sejak usia dini yang dimulai dari lingkungan keluarga. Ketersediaan pilihan buku yang sesuai dengan jenjang pembacanya, terutama usia dini akan membantu meningkatkan minat baca pada anak. Selain itu, buku yang bermutu dan berkualitas juga akan mendorong aktivitas membaca dan menulis, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dengan kemampuan membaca yang baik, lima literasi dasar berikutnya (numerasi, sains, digital, finansial,

serta budaya dan kewargaan) dapat ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa setiap tahun mengambil ikhtiar penyediaan bahan bacaan literasi yang bermutu dan dapat dijangkau ketersediaannya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, bahan bacaan ini diharapkan mampu mendorong praktik baik literasi baca-tulis di sekolah, di komunitas literasi, serta kegiatan lain yang berkaitan erat dengan penumbuhan budaya literasi.

Selanjutnya, masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi, maupun akibat perkembangan teknologi informasi yang amat pesat ataupun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tak dapat dihindari. Selain itu, konflik sosial yang berkaitan dengan kasus kebahasaan pun terjadi di negara dengan keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa ini. Kondisi-kondisi itu telah memengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa dan sastra perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan terencana supaya tujuan akhir pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan akhir pembinaan itu adalah meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan di Indonesia.

Literasi yang baik didukung dengan kemampuan pengguna bahasa dalam menggunakan bahasa. Mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, baik ranah kedinasan, pendidikan, jurnalistik, ekonomi, maupun perdagangan, belum membanggakan. Di dalam berbagai ranah tersebut, campur aduk penggunaan bahasa masih terjadi. Berbagai kaidah yang telah berhasil dibakukan dalam pengembangan bahasa juga belum sepenuhnya diindahkan oleh para pengguna bahasa. Di satu sisi, kaidah yang telah lama ada belum terinternalisasi. Di sisi lain, kaidah baru perlu diperkenalkan untuk dapat diinternalisasi oleh pengguna bahasa.

Sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia sekarang ini pun menurun. Selain itu, minat baca masyarakat terhadap karya sastra Indonesia cenderung rendah. Hal itu kemungkinan disebabkan oleh kurangnya pengenalan apresiasi terhadap karya sastra di lembaga pendidikan. Selain itu, kurangnya bacaan bermutu yang membantu penutur bahasa meningkatkan kualitas berbahasanya pun terbatas.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa upaya pembinaan bahasa dan sastra Indonesia pada berbagai lapisan masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup berat. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa masih perlu bekerja keras untuk membangkitkan kembali kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Upaya itu ditempuh melalui peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah serta peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Upaya itu juga dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia makin mantap di tengah terpaan gelombang globalisasi saat ini.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah instansi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Bahasa dalam hal pembinaan bahasa dan sastra Indonesia adalah meningkatkan kemahiran berbahasa penutur bahasa. Kemahiran berbahasa itu akan meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia sekaligus meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia. Kegiatan pemasyarakatan tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan kegiatan ini juga diarahkan pada upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan tidak hanya berfokus pada penutur bahasa secara orang perseorang, tetapi juga sebagai masyarakat atau komunitas. Selain itu, lembaga yang dalam komunikasi kerja dan kemasyarakatannya menggunakan bahasa Indonesia juga merupakan fokus peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Literasi yang meningkat pada penutur bahasa dan lembaga dapat dicapai melalui berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan penutur bahasa dan lembaga dalam menggunakan bahasa dan memanfaatkan sastra. Indikator ketercapaian peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan ini adalah persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya dan persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas berbahasanya.

Dampak pelaksanaan Sasaran Program Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan:

1. Literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik, terutama literasi baca tulis, dapat menumbuhkembangkan lima literasi dasar berikutnya (numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan).
2. Literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik dapat membantu anak meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka melalui analisis dan interpretasi teks bacaan (buku bacaan penunjang literasi). Anak-anak diajak untuk memikirkan dan memahami makna dari teks sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, kecakapan literasi ini juga telah membantu anak meningkatkan kemampuan berkreasi mereka melalui ekspresi diri dan pemikiran yang kreatif, serta memahami bagaimana mengejar minat dan berkreasi melalui eksplorasi dan eksperimentasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkarya mereka.
3. Ketersediaan pilihan buku yang sesuai dengan jenjang pembacanya, terutama usia dini dapat membantu meningkatkan minat baca pada anak
4. Buku yang bermutu dan berkualitas mendorong aktivitas membaca dan menulis, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat meningkat
5. Literasi kebahasaan dan kesastraan melalui pengutamaan bahasa negara dan pembinaan lembaga dapat meningkatkan citra profesionalisme. Dalam hal ini, dengan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, lembaga-lembaga akan terlihat lebih profesional dan memiliki citra yang positif di mata masyarakat.

Program peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan dapat memiliki dampak positif terhadap beberapa hal berikut ini:

- a) **Meningkatkan Kemampuan Berbahasa:** Literasi kebahasaan dapat membantu anak memahami dan meningkatkan kemampuan berbahasanya sehingga mereka akan dapat lebih memahami dan dapat memanfaatkan bahasa dengan baik.
- b) **Meningkatkan Kemampuan Berkomunikasi:** Literasi kebahasaan membantu dapat anak meningkatkan kemampuan berkomunikasi sehingga mereka akan dapat lebih memahami bagaimana cara bertutur dan berinteraksi dengan orang lain.
- c) **Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis:** Literasi kebahasaan dan kesastraan dapat membantu anak meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka melalui analisis dan interpretasi teks bacaan (buku bacaan penunjang literasi). Anak-anak diajak untuk memikirkan dan memahami makna dari teks sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka.
- d) **Meningkatkan Kemampuan Berkreasi:** Literasi kesastraan juga membantu anak meningkatkan kemampuan berkreasi mereka melalui ekspresi diri dan pemikiran yang kreatif.
- e) **Meningkatkan Kemampuan Berkarya:** Literasi kebahasaan dan kesastraan membantu anak memahami bagaimana mengejar minat dan berkreasi melalui eksplorasi dan eksperimentasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan berkarya mereka.

Dengan demikian, program peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan dapat membantu anak mempersiapkan diri untuk menjadi pemikir kritis dan kreatif yang siap menghadapi tantangan di masa depan.

Indikator Kinerja Program 1.1: Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

Peningkatan kualitas berbahasa pada penutur bahasa dilakukan dengan menerapkan tiga prinsip berfokus dan terukur, berkesinambungan, dan bermitra. Kegiatan berfokus bermakna bahwa sasaran kegiatan ditentukan berdasarkan pendataan dan analisis kebutuhan pembinaan bahasa penutur tertentu. Terukur bermakna bahwa kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya sesuai dengan target. Adapun target tersebut secara umum sudah termuat di dalam dokumen rencana kerja, baik target kuantitas maupun kualitas. Kegiatan berkesinambungan bermakna bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dengan langkah-langkah yang terukur dan berkelanjutan. Kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan ini dapat dilakukan dalam multitahun atau pada sepanjang tahun dengan tetap mendampingi atau memfasilitasi lembaga atau penutur bahasa. Kegiatan bermitra bermakna bahwa kegiatan dilakukan dengan dasar kerja sama atau kesepakatan dengan penutur sasaran sehingga terjalin ikatan yang saling memberi manfaat kepada Badan Bahasa sebagai pembina bahasa dan kepada lembaga/ penutur yang dibina. Kemitraan ini dapat dilandasi dengan nota kesepakatan, perjanjian kerja sama, atau permintaan dari penutur yang akan dibina.

Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya setelah dibina melalui aktivitas peningkatan kompetensi berbahasa dan apresiasi sastra. Pengukuran kenaikan kualitas dilakukan dengan mengadakan tes awal dan tes akhir pada peserta. Materi tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pembinaan.

Pengukuran juga dilakukan terhadap kemahiran membaca dan menulis peserta. Rerata Peserta dengan nilai postes lebih tinggi dari pretes dengan minimal kenaikan 10% dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya.

Jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kaidah kebahasaan, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran membaca, jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai kemahiran menulis masing-masing dibandingkan dengan jumlah peserta pembinaan dibagi tiga dikali seratus persen.

$$PPT = \left(\frac{PK}{PP} + \frac{PMb}{PP} + \frac{PMt}{PP} \right) \times \frac{100}{3}$$

Persentase Penutur Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya Tahun 2022

$(75 + 77,67 + 51,35) : 3 = 68,01\%$

Keterangan:

PPT = Persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya

PK = Jumlah peserta yang nilai kaidahnya naik

PMb = Jumlah peserta yang nilai membacanya naik

PMt = Jumlah peserta yang nilai menulisnya naik

PP = Jumlah peserta pembinaan

Tipe = Nonkumulatif

Jika melihat dasar penentuan nilai ini, pada dasarnya pembinaan penutur bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa sudah mampu meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa tersebut. Adapun nilai awal dan nilai akhir yang dibandingkan dalam penghitungan tersebut dapat diperoleh dengan berbagai cara penilaian. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Tes awal dan tes akhir

Tes ini disiapkan oleh narasumber yang menyampaikan materi pembinaan bahasa/sastra. Materi tes menggambarkan materi yang disampaikan dalam pembinaan yang dilakukan oleh narasumber. Materi tes awal sama dengan materi tes akhir. Jumlah soal berdasarkan kecukupan untuk mengetahui kemampuan peserta secara umum.

2. Penilaian awal dan penilaian akhir

Penilaian awal dan penilaian akhir diberikan dalam kegiatan yang bersifat praktik berkarya yang disertai dengan penjurian/penilaian karya, seperti festival musikalisasi puisi atau bengkel sastra. Dalam penilaian awal, juri/penilai memberi nilai kepada seluruh peserta pembinaan berdasarkan pengamatan juri/penilai, penugasan awal yang diberikan (misalnya dengan membuat uraian mengenai interpretasi/penafsiran terhadap sebuah puisi), atau penampilan peserta sebelum dilakukan pembinaan. Penilaian akhir didasarkan pada karya atau penampilan peserta sesudah pembinaan dilakukan sesuai dengan format penilaian yang ditentukan dalam juknis kegiatan dimaksud. Misalnya, dalam kegiatan festival musikalisasi puisi penilaian akhir berupa pemberian nilai oleh juri/penilai untuk penafsiran puisi, komposisi dan aransemennya, keselarasan/harmonisasi, dan penampilan.

3. Uji diri

Uji diri merupakan nilai yang diberikan oleh penutur yang dibina terhadap kondisi/pengetahuannya mengenai materi pembinaan yang diberikan pada sebelum mengikuti pembinaan dan setelah mengikuti pembinaan. Materi penilaian diri ini merupakan materi yang diberikan pada saat pembinaan.

Pada tahun 2022, Capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya sudah tercapai dengan baik. Target yang ditetapkan

adalah 66, capaiannya adalah 68,01, dan persentase capaiannya sebesar 103%. Capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya merupakan IKP yang baru sebagai usulan perubahan pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada revisi renstra, IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Mahir Teruji yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemahiran masyarakat dalam berbahasa Indonesia diubah menjadi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya. Perbedaan kedua IKP itu menyebabkan capaian IKP tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat disandingkan. Tabel

Tabel 9
Target dan Realisasi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
1 Meningkatkan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	1.1 Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	62	-	66	68,01	103	72

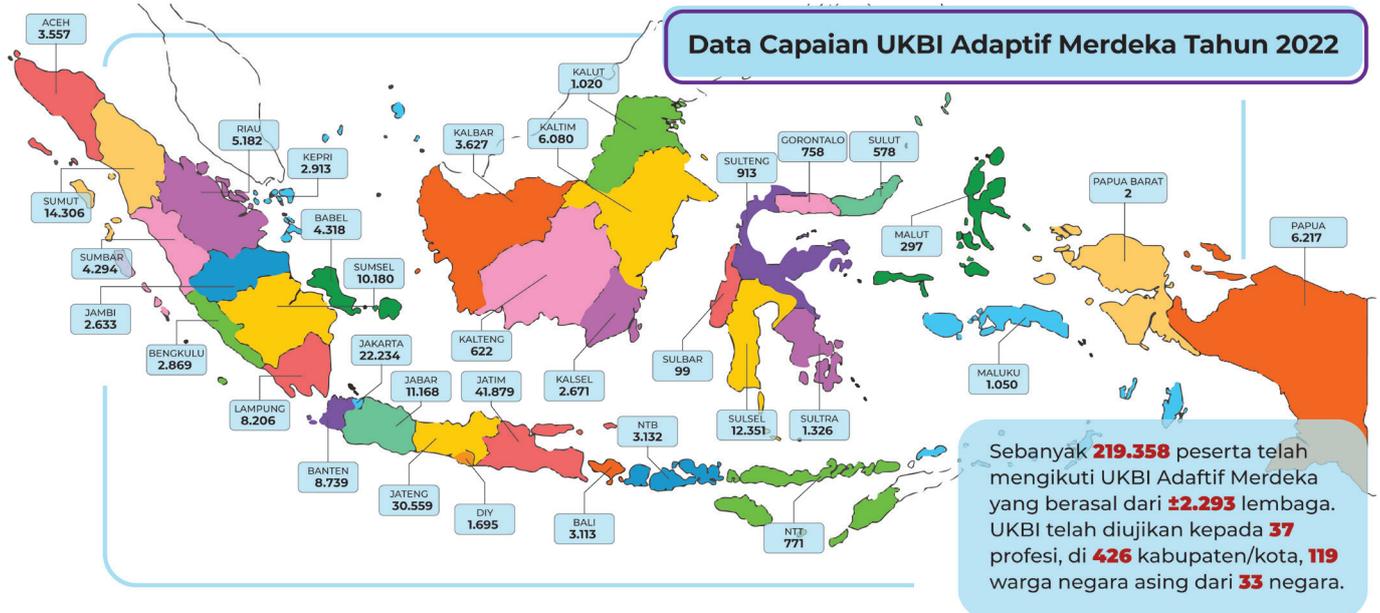
Grafik 1
Capaian IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya



Berikut ini kegiatan yang mendukung IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

a. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang telah mengikuti UKBI berjumlah 219.358 peserta uji. Berikut ini adalah capaian data UKBI.



Gambar 8 . Sebaran jumlah peserta uji UKBI di setiap provinsi tahun 2022

Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini.

1. Pengujian UKBI Adaptif yang dilaksanakan secara daring memudahkan berbagai instansi untuk melaksanakan pengujian secara kolektif dan masif. Adanya fitur pendaftaran kolektif menjadi salah satu faktor yang memudahkan instansi untuk melaksanakan UKBI Adaptif.
2. Waktu layanan uji dari pagi hingga malam memberikan keleluasaan bagi instansi atau peserta perorangan untuk memilih jadwal uji yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan uji pun dapat diberikan secara fleksibel pada hari libur sesuai dengan permintaan instansi.
3. Diseminasi bagi pemangku kepentingan yang dilakukan secara masif di seluruh wilayah Indonesia. Diseminasi tersebut berdampak pada penetapan kebijakan dan aturan terkait pemanfaatan UKBI. Salah satu contoh kebijakan pemanfaatan UKBI adalah penetapan UKBI sebagai salah satu syarat dalam seleksi penerjemah dan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penerjemah di Sekretariat Kabinet. Selain itu, pada tahun 2022 UKBI Adaptif menjadi salah satu syarat beasiswa unggulan Kemendikbudristek. Dengan adanya berbagai kebijakan tersebut, laporan kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam hal penerimaan PNBP UKBI mencapai 135%, yaitu Rp1.727.190.000,00 dari target Rp1.276.740.000,00.

b. Penyusunan Bahan Penguatan Literasi

Penyusunan bahan penguatan literasi berupa 75 buku bacaan literasi, 10 buku video, 10 video animasi pembelajaran literasi numerasi, dan pemutakhiran laman buku digital (<https://budi.kemdikbud.go.id>) yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Buku digital yang tersedia pada laman tersebut sampai dengan Januari 2023 telah dibaca oleh 39.679 orang, diunduh sebanyak 3.658 kali, dan disimpan 345 kali.

Buku bacaan literasi yang disusun oleh Badan Bahasa merupakan buku nonteks yang digunakan untuk menunjang pembelajaran formal sekaligus meningkatkan kemampuan literasi membaca siswa di Indonesia. Pada tahun 2022, Badan Bahasa telah menyusun 75 buku bacaan literasi yang didapat melalui: (1) proses pengadaan sayembara penyusunan Buku Bacaan Literasi 2022 sebanyak 50 buku, dan (2) proses seleksi hasil karya internal anggota KKLP Literasi sebanyak 25 buku. Buku-buku bacaan literasi yang disusun tersebut diperuntukkan anak jenjang membaca B1, B2, dan B3 (sesuai kriteria perjenjangan buku yang telah dikeluarkan oleh Pusat Perbukuan). Adapun tema yang diangkat dalam buku-buku tersebut antara lain tokoh/idola, profesi, anggota tubuh, cerita jenaka, keterampilan hidup (*lifeskill*), kearifan lokal/tradisi, pencegahan kekerasan terhadap anak, perangkulan anak berkebutuhan khusus, serta kedudukan anak dalam komunitas/masyarakat. Buku-buku tersebut (75 judul) telah dinilai ke Pusat Perbukuan dan telah dinyatakan layak sebagai buku pengayaan dalam mendukung proses pembelajaran berdasarkan SK Mendikbudristek Nomor 061/H/P/2022 tanggal 6 Desember 2022 (Judul Buku Bacaan Literasi yang Dihasilkan Badan Bahasa Pada Tahun 2022 terlampir).

Berikut lini masa penyusunan buku bacaan literasi tahun 2022.



Gambar 9. Lini Masa Penyusunan Buku Bacaan Literasi Tahun 2022

Berikut ini beberapa contoh buku bacaan literasi yang disusun Badan Bahasa pada tahun 2022.



Berikut ini 10 judul buku video yang dialihwahanakan sebagai bahan penguatan literasi tahun 2022.

Tabel 10
Judul Buku Video yang Dialihwahanakan

No.	Judul Buku Video	Nama Penulis Buku yang Dialihwahanakan
1	Selamat Tidur, Kola!	Veronica W.
2	Misi Kirana dan Pasukan Pramuka	Tria Ayu K.
3	Film untuk Lala	Nouf Zahrah Anastasia
4	Damar Kurung Persahabatan	Nindia Maya
5	Uuuh, Sebel!	RF. Dhonna
6	Penabuh Gong	Saptorini
7	Tutu, Si Kutu Rambut	Layangmaya
8	Banyu dan Manu	Widjati Hartiningtyas
9	Tongkat Kenangan Kakek	Erlita Pratiwi dan Indra Bayu
10	Mengapa Diam Saja?	Felicia Amara

Kesepuluh buku video tersebut sudah diunggah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui laman buku digital Badan Bahasa <https://budi.kemdikbud.go.id>.

Berikut ini 10 judul video animasi pembelajaran literasi numerasi bagi anak jenjang SD kelas rendah yang telah dibuat Badan Bahasa bekerja sama dengan pihak ketiga (rumah produksi Hellomotion) sebagai bahan penguatan literasi pada tahun 2022.

Tabel 11
Judul Video Animasi Pembelajaran Literasi Numerasi bagi Anak Jenjang SD Kelas Rendah

No.	Judul Video Animasi 2 Dimensi	Nama Penulis Skenario
1	Mengenal Angka	Puteri Asmarini
2	Petualangan di Hutan Istimewa	Wisnu Wayang Putra dan Didiek Hardadi Batubara
3	Memilah Sampah	Widowati Sumardi
4	Mengenal Warna Pelangi	Herlina Astuti Efse B.
5	Mencuci Tangan	Retno Utami dan Sri Haryanti
6	Kamarku Rapi	Yuli Astuti Asnel
7	Tradisi Lokal	Desti Nurmatyas
8	Mengenal Tubuh	Vika Tiara Dilla
9	Memindahkan Bola	Pani Rizki Utami
10	Hari Baik bagi Bina	Mutiara

c. Mencetak dan Mengirimkan Buku Pengayaan Literasi

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional tahun 2021, diketahui tingkat literasi numerasi siswa Indonesia per sekolah. Tingkat literasi numerasi tersebut diklasifikasikan ke dalam level 0 hingga level 3. Selanjutnya, dengan mengacu pada hasil asesmen tersebut, pada tahun 2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan intervensi pada level 0--1 dengan mengirimkan 716 judul buku, sebanyak 15.356.486 eksemplar, ke 20.558 PAUD dan SD, yang tersebar di 470 kabupaten/kota.

Buku-buku yang dikirim merupakan buku-buku yang bermutu yang dihasilkan melalui sayembara, bimtek, dan penerjemahan, yang sudah dikurasi oleh para pakar literasi. Kemdikbudristek juga mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dengan menghadirkan 400 anak untuk menentukan buku yang seperti apa yang diminati

atau disenangi anak. Hal ini penting dilakukan agar buku yang dikirimkan bukan saja mengandung konten yang baik, melainkan juga diminati anak-anak. Dengan demikian, minat baca anak dimulai dari anak menyukai buku terlebih dahulu.

Pencetakan dan pengiriman buku pada tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12
Data Cetak dan Kirim Buku Literasi Tahun 2022

Sumber Dana	Jumlah Judul Buku	Jumlah Eksemplar	Jumlah Sekolah Sasaran
DIPA Eksisting 2022	60 judul buku (20 judul untuk PAUD dan 40 judul untuk SD)	727.980 eksemplar	a. 5.963 PAUD di 3T b. 7.609 SD di 3T
BA BUN	500 judul buku	12.159.182 eksemplar	7.609 SD di 3T
Optimalisasi BUN	156 judul buku	2.469.324 eksemplar	6.986 SD Non-3T (Nilai AN di level 0 dan level 1)
Total	716 judul buku	15.356.486 eksemplar	20.558 sekolah

Buku-buku yang dikirim merupakan buku-buku yang bermutu yang dihasilkan melalui sayembara, bimtek, dan penerjemahan, yang sudah dikurasi oleh para pakar literasi. Kemdikbudristek juga mengadakan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) dengan menghadirkan 400 anak untuk menentukan buku yang seperti apa yang diminati atau disenangi anak. Hal ini penting dilakukan agar buku yang kita kirimkan bukan saja mengandung konten yang baik, melainkan juga diminati anak-anak. Dengan demikian, minat baca anak dimulai dari anak menyukai buku terlebih dahulu. Implementasinya di daerah, UPT Badan Bahasa bekerja sama juga bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan pencetakan dan pengiriman buku ke daerah.



Pengecekan Hasil Cetakan Buku di Penerbit



Pengiriman Buku ke Daerah 3T dengan Perahu



Pengiriman Buku ke Daerah 3T Dibantu TNI AU



Pemantauan Ketersampaian Buku di Sekolah

d. Pelatihan Fasilitator/Guru Pendampingan Pemanfaatan Buku Pengayaan

Badan Bahasa memberikan pelatihan untuk para fasilitator/guru pendampingan pemanfaatan buku pengayaan literasi. Kegiatan pelatihan tersebut dilakukan secara berjenjang, yaitu pelatihan fasilitator tingkat pusat, pelatihan fasilitator tingkat regional, dan pelatihan fasilitator tingkat kabupaten. Selanjutnya, terkait proses pendampingan pemanfaatan buku di sekolah serta pemantauannya, pada tahun 2023 akan dilakukan oleh Direktorat SD bekerja sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat serta UPT Kemdikbudristek di daerah. Adapun pelatihan guru-guru sekolah sasaran pengiriman buku (yang belum sempat dilatih oleh BBP Bahasa, pada tahun 2023 akan dilatih Direktorat GTK.

Tabel 13
Jumlah Fasilitator Pendampingan Pemanfaatan Buku Literasi yang Telah Dilatih BBP Bahasa Pada Tahun 2022

Pelatihan Fasilitator	Jumlah Peserta	Asal Peserta
Tingkat Pusat	29 orang	Praktisi, perwakilan unit utama Kemdikbudristek
Tingkat Regional	239 orang	Tenaga teknik Balai/Kantor Bahasa, Pegiat literasi, dan perwakilan dinas pendidikan setempat
Tingkat Kabupaten (58 kabupaten/kota)	1.998 orang	Perwakilan guru-guru yang sekolah menerima buku literasi Kemdikbudristek
Total	2.266 orang	



Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Fasilitator Pendampingan Pemanfaatan Buku Literasi Tahun 2022

Berdasarkan hasil pemantauan dan testimoni yang diberikan oleh guru dan siswa di beberapa sekolah yang menerima buku literasi dari Kemendikbudristek, mereka sangat senang dan langsung memanfaatkan buku-buku tersebut. Buku tersebut ada yang dibaca bersama di sekolah, ada juga beberapa yang dipinjam secara bergiliran untuk dibaca di rumah. Anak-anak menjadi gemar membaca setiap hari, karena buku-buku tersebut sangat menarik bagi mereka dan memang sesuai dengan tingkat baca mereka.

Kegiatan pencetakan dan pengiriman buku dalam rangka meningkatkan minat baca anak guna meningkatkan indeks literasi masyarakat Indonesia (terutama anak-anak) ini, perlu terus dilakukan. Hal itu tentu tidak dapat dilakukan oleh Badan Bahasa sendiri, perlu adanya sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dengan pihak terkait dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Februari 2023 nanti, Mendikbudristek akan meluncurkan program Merdeka Belajar episode ke-23 dengan tajuk: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Hal itu dilakukan dengan harapan bahwa anak-anak di seluruh Indonesia dapat memperoleh akses buku-buku bacaan bermutu sehingga minat baca mereka meningkat dan tingkat literasi mereka dapat meningkat.

Pada tahun 2022 Badan Bahasa juga meluncurkan produk dan layanan kebahasaan kebahasaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, seperti superaplikasi Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan bahasa Indonesia). Selain itu, dilaksanakan pula pengujian kemahiran berbahasa Indonesia kepada siswa, guru, dan para pemangku kepentingan dengan menggunakan UKBI Adaptif Merdeka.

Merdeka Belajar
Revitalisasi Bahasa Daerah

Peluncuran Halo Bahasa

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, diperlukan peningkatan kualitas layanan dan perluasan jangkauan layanan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta diperlukan model pemasyarakatan produk dan layanan yang lebih inovatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Bahasa menyusun sebuah inovasi pelayanan berbasis teknologi dengan nama **Halo Bahasa**.

Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan produk-produk kebahasaan, melakukan konsultasi kebahasaan, dan melaporkan penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, aplikasi ini juga menjadi wadah untuk berbagi kegiatan/program kebahasaan dan kesastraan, baik kegiatan dari lembaga pemerintah/swasta maupun kegiatan dari masyarakat.

Peluncuran akan dilaksanakan secara daring melalui **kanal Youtube Badan Bahasa** https://youtu.be/6P_haF3USiC

Pada Senin, 21 Februari 2022, pukul 10.00 WIB

Selamat menyaksikan peluncuran aplikasi Halo Bahasa!

UTAMAKAN Bahasa Indonesia ESTABILISASI Bahasa Daerah KLASIKASI Bahasa Pasing

Badan Bahasa Bermartabat Bermamfaat

Halaman Masuk
Selamat datang!

Sipebi

Aplikasi Penyuntingan Ejaan
Bahasa Indonesia

Masuk

Versi: 1.0.0.0

Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah meluncurkan beberapa layanan peningkatan kualitas penutur bahasa, seperti konsultasi kebahasaan secara langsung dan konsultasi kebahasaan secara tidak langsung. Pembinaan penutur bahasa Indonesia melalui konsultasi kebahasaan secara langsung dilakukan dengan menerima langsung penutur bahasa yang ingin berkonsultasi di kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pembinaan penutur bahasa Indonesia dengan konsultasi kebahasaan tidak langsung dilakukan melalui fitur Konsultasi yang ada di superaplikasi Halo Bahasa. Penutur menuliskan permasalahan kebahasaannya dan mengirimkannya untuk ditanggapi dan dijawab oleh ahli bahasa yang ada di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Dengan bertambahnya pengetahuan kebahasaannya diharapkan meningkat pula kualitas berbahasa para penuturnya.

Inovasi Layanan dalam Satu Superaplikasi: Halo Bahasa



Gambar 11. Inovasi layanan dalam Satu Superaplikasi: Halo Bahasa

e. Pembinaan Penutur Bahasa Indonesia

Tercapainya target persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya pada tahun 2022, yaitu 66%, didukung oleh peningkatan kualitas berbahasa melalui berbagai kegiatan pembinaan bahasa. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

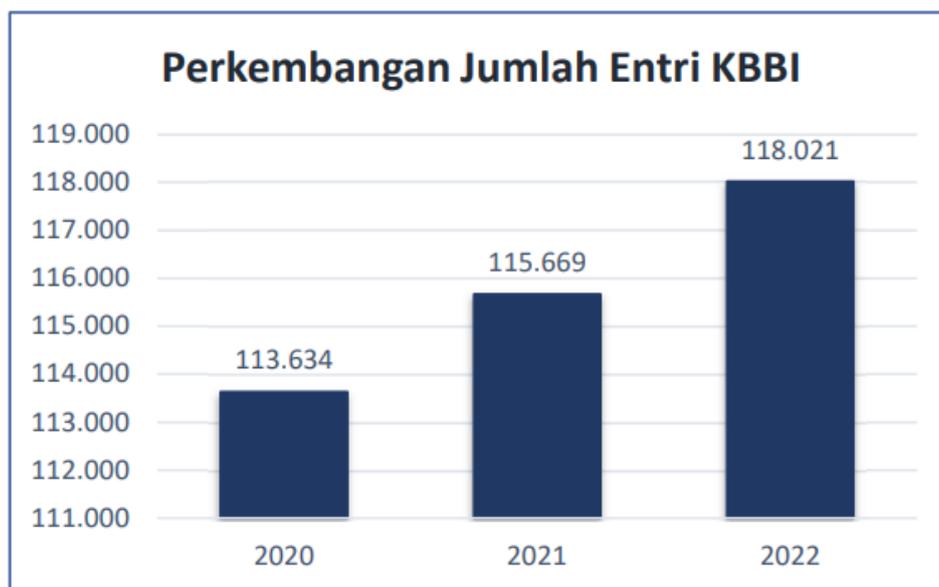
1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia
2. Festival Digital Musikalisasi Puisi Tahun 2022 di Tingkat Provinsi
3. Festival Digital Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional Tahun 2022
4. Penghargaan Sastra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peningkatan Kemahiran Berbahasa melalui Bulan Bahasa dan Sastra
6. Diseminasi Bahan Pembinaan Penutur Bahasa: Sosialisasi EYD V

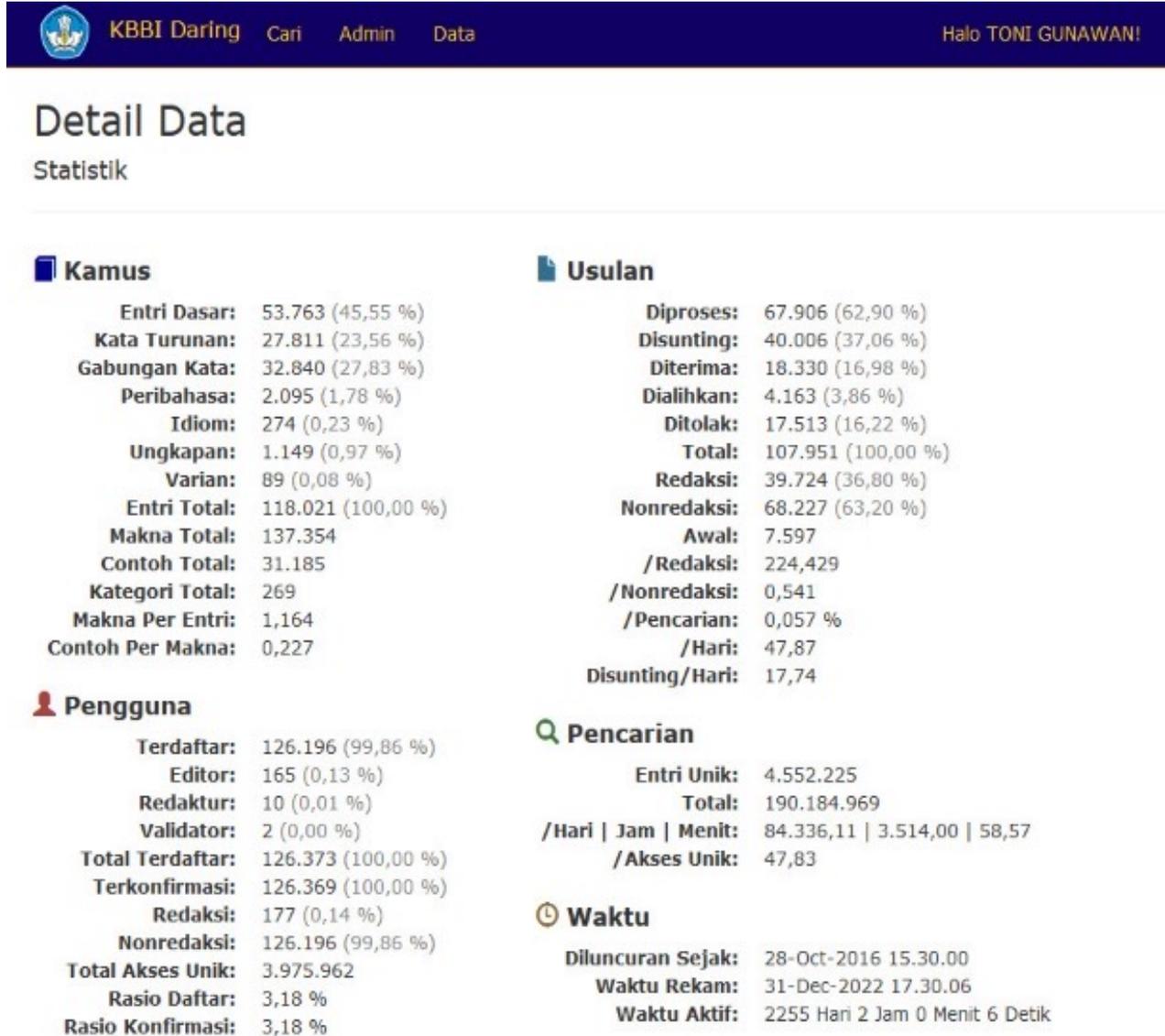
f. Penyediaan Produk Kodifikasi Bahasa

Untuk mendukung upaya pembinaan penutur bahasa Indonesia dan peningkatan literasi, penyediaan produk pengembangan bahasa berupa produk kodifikasi bahasa, seperti produk leksikografi dan kaidah kebahasaan. Penyediaan tersebut dilaksanakan secara konsisten untuk menjaga stabilitas ketersediaan produk pengembangan bahasa sehingga dapat menjadi alat untuk menyamakan persepsi terkait kebahasaan serta sebagai standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pada 2022 *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berhasil dimutakhirkan pada bulan April (1.138 entri) dan Oktober (1.138 entri). Dengan demikian, total entri baru yang ditambahkan dalam KBBI pada tahun 2022 sebanyak 2.382 entri baru. Dari tahun ke tahun jumlah entri dalam KBBI terus-menerus mengalami peningkatan. Statistik lengkap KBBI (berkaitan dengan entri, pengguna, pencarian kata, dsb.) dan perkembangan entri KBBI dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2
Perkembangan Jumlah Entri KBBI

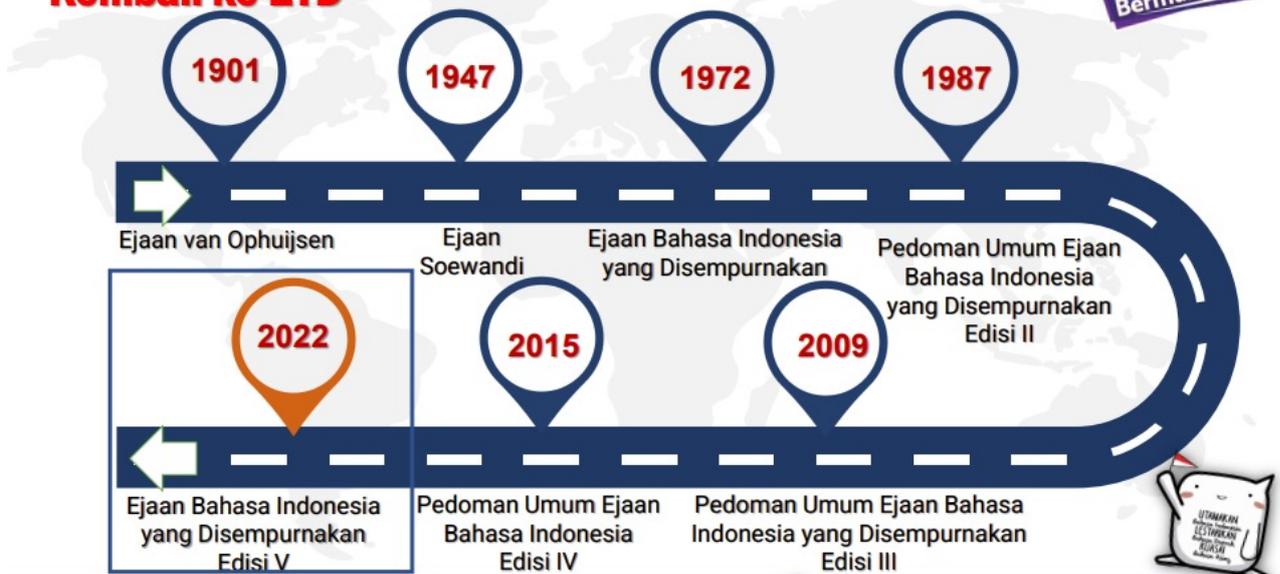




Gambar 12. Statistik Lengkap KBBI

Dalam penyediaan pedoman kebahasaan, pemutakhiran terhadap *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (PUEBI) dilakukan. Hasilnya adalah *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (EYD) edisi kelima yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa No. 0424/I/BS.00.01/2022 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. EYD edisi kelima ini ditetapkan pada 16 Agustus 2022, bertepatan dengan 50 tahun sejak pertama kali ditetapkan pada 16 Agustus 1972.

Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia: Kembali ke EYD



Gambar 13. Penyempurnaan Ejaan Bahasa Indonesia: Kembali ke EYD

Sementara itu, upaya pengembangan produk kodifikasi dilakukan dengan cara integrasi dengan TIK. Salah satunya adalah pengembangan Aplikasi Sistem Penyuntingan Bahasa Indonesia (Sipebi). Aplikasi ini tidak hanya sekadar membantu pengguna dalam hal penyuntingan secara otomatis, tetapi juga memberikan edukasi tentang bagaimana berbahasa yang baik dan benar. Hingga Desember 2022, aplikasi SIPEBI sudah diunduh sebanyak 84.546 kali.

Sipebi

Aplikasi Penyuntingan Ejaan Bahasa Indonesia

Merupakan aplikasi yang berfungsi untuk melakukan perbaikan/penyuntingan teks bahasa Indonesia secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan pangkalan data KBBI termutakhir dan masukan para ahli bahasa sebagai basis datanya.



Unduh Sipebi v1.0.1.0 (Windows)

Diunduh: 84.885 kali

Gambar 14. Aplikasi SIPEBI Sudah Diunduh Sebanyak 84.546 kali

Keberhasilan dalam pencapaian persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah

- a. kebutuhan penutur bahasa untuk meningkatkannya dalam berbahasa Indonesia;

- b. kebutuhan penutur bahasa untuk mengetahui kaidah bahasa Indonesia termutakhir karena perkembangan bahasa Indonesia yang harus terus diakomodasi;
- c. kepercayaan penutur bahasa kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai lembaga pembina bahasa di Indonesia;
- d. media pembinaan bahasa yang akomodatif dengan kondisi penutur bahasa, misalnya pembinaan daring atau luring;
- e. waktu pelaksanaan pembinaan penutur yang fleksibel;
- f. metode yang digunakan disesuaikan dengan kecenderungan sasaran pembinaan; dan materi yang sesuai dengan kebutuhan penutur bahasa Indonesia.

Tabel 14
Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Keterbatasan SDM	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM	Menerapkan pembinaan penutur bahasa yang berfokus dan terukur, bermitra, dan berkesinambungan dengan menetapkan waktu pendampingan dan fasilitasi bagi penutur bahasa dalam durasi yang panjang pada setiap tahunnya.
2. Metode belum mutakhir	Memutakhirkan metode	
3. Anggaran yang terbatas	Memanfaatkan media daring	
4. Ketuntasan keikutsertaan peserta dalam mengikuti kegiatan	Menentukan sasaran pembinaan yang tepat	

Indikator Kinerja Program 1.2: Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaannya

Penggunaan bahasa Indonesia saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Ruang-ruang publik bahasa Indonesia dapat dikatakan hampir tergeser oleh bahasa asing. Ruang publik yang seharusnya merupakan ruang yang menunjukkan identitas keindonesiaan melalui penggunaan bahasa Indonesia ternyata sudah disesaki oleh bahasa asing. Berbagai papan nama, baik papan nama pertokoan, restoran, pusat-pusat perbelanjaan, hotel, permukiman, iklan, maupun kain rentang hampir sebagian besar tertulis dalam bahasa asing. Peningkatan kualitas penggunaan bahasa dengan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dilakukan dalam upaya memperkuat identitas keindonesiaan. Penggunaan bahasa yang berkualitas oleh lembaga di ruang-ruang publik akan memajukan dan membiasakan masyarakat dengan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta mengutamakan bahasa negara. Makin banyak lembaga yang meningkatkan kualitas berbahasanya, makin baik pula ruang publik serta dokumen yang diterbitkan oleh lembaga tersebut. Oleh karena itulah, lembaga yang belum baik kualitas berbahasanya merupakan lembaga yang dibina untuk meningkatkan kualitas berbahasanya.

Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga (pemerintah dan swasta) yang karena tugas dan fungsinya, harus menggunakan bahasa Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya penggunaan papan nama, papan informasi, papan petunjuk, surat-menyurat, spanduk, selebaran. Pembinaan ini multitalun dengan menetapkan sejumlah lembaga saja dengan harapan akan terlihat perubahannya dari tahun ke tahun. Lembaga yang dipilih meliputi tiga lembaga, yaitu pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta.

Pada kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan bahasa pada lembaga, kegiatan dilakukan secara multitahun dengan langkah pembinaan sebagai berikut pada tahun pertama, yaitu 2022.



Gambar 15. Langkah Pembinaan tahun 2022

Pada tahun berikutnya, lembaga yang dibina adalah lembaga yang telah mulai dibina pada tahun 2022. Kegiatan pembinaan lembaga dilakukan dengan kegiatan utama berupa pendampingan kebahasaan dengan langkah

1. menentukan lembaga yang menjadi sasaran pembinaan;
2. melakukan pengambilan data penggunaan bahasa baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, kemudian memberi penilaian atas data-data tersebut pada format penilaian yang telah disediakan;
3. melakukan sosialisasi untuk menyampaikan materi dan strategi pengutamaan bahasa negara berdasarkan data kebahasaan yang telah diambil dan dianalisis dan memberi rekomendasi perbaikan jika penggunaan bahasanya belum mengutamakan bahasa negara;
4. melakukan pendampingan atau fasilitasi dengan mengaktifkan grup-grup WA dengan pengampu pengutamaan bahasa negara dari lembaga yang dibina atau melakukan kunjungan konsultatif secara periodik ke lembaga yang dibina;
5. melakukan evaluasi dengan pengambilan data sesudah pembinaan dilakukan pada tahun berjalan; dan
6. memberikan apresiasi atau penghargaan kepada lembaga terbina yang memperlihatkan perbaikan atau usaha yang signifikan dalam pengutamaan bahasa negara. Penghargaan ini dapat berupa pemberian sertifikat/piagam penghargaan atau memberikan uang pembinaan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah 3 tahun pembinaan, lembaga-lembaga yang dibina yang menunjukkan praktik penggunaan bahasa negara dengan baik secara konsisten dapat ditetapkan sebagai lembaga yang mengutamakan bahasa negara. Selanjutnya, lembaga ini dapat ditunjuk sebagai mitra pembinaan atau rujukan praktik baik pengutamaan bahasa negara.

Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas pengunaan bahasanya ditentukan dengan menerapkan metode penghitungan sebagai berikut.

$$PLT = \left(\frac{BRP}{LT} + \frac{BS}{LT} \right) \times \frac{100}{2}$$

Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya

$$27/45 + 27/45 : 2 \times 100 = 60\%$$

Keterangan:

PLT = Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya

BRP = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa ruang publiknya

BS = Jumlah lembaga yang naik nilai bahasa suratnya

LT = Lembaga terbina bahasa ruang publiknya

Tipe = Kumulatif

Tabel 15
Target dan Realisasi IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
1 Meningkatkan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	1.2 Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	43,9	-	59,93	60	100,11	91,99

Grafik 3
Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya



Pada tahun 2022, Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya sudah tercapai dengan baik. Target yang ditetapkan adalah 59,93, capaiannya adalah 60, dan persentase capaiannya sebesar 100,11%. Capaian Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya merupakan IKP yang baru sebagai usulan perubahan pada Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada revisi renstra, IKP Persentase Wilayah yang Mengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik yang merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada level tertentu (Terkendali I—Terkendali IV) diubah menjadi IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya. Perbedaan kedua IKP itu menyebabkan capaian IKP tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dilakukan. Capaian IKP Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya diupayakan terus meningkat capaiannya setiap tahun sehingga target pada akhir renstra pada tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

Tercapainya target persentase lembaga terbina yang meningkatkan kualitas berbahasanya pada tahun 2022, yaitu 59,93%, didukung oleh peningkatan kualitas berbahasa melalui berbagai

kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta 30 balai/kantor bahasa bersama dengan pemerintah daerah menentukan lembaga yang menjadi sasaran pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di 31 wilayah kerja, yaitu 1.395 lembaga yang terdiri atas lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan, dan lembaga swasta;
2. Balai/kantor bahasa serta Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan pengambilan data penggunaan bahasa baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, kemudian memberi penilaian atas data-data tersebut pada format penilaian yang telah disediakan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
3. Berdasarkan data penggunaan bahasa baik di ruang publik maupun pada dokumen lembaga, balai/kantor bahasa serta Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melakukan sosialisasi untuk menyampaikan materi dan strategi pengutamaan bahasa negara, kemudian memberi rekomendasi perbaikan jika penggunaan bahasanya belum mengutamakan bahasa negara (Instrumen Penilaian Penghargaan Wajah Bahasa Lembaga terlampir).
4. Balai/kantor bahasa serta Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra melalui ahli bahasanya melakukan pendampingan atau fasilitasi dengan mengaktifkan grup-grup WA dengan pengampu pengutamaan bahasa negara dari lembaga yang dibina atau melakukan kunjungan konsultatif secara periodik ke lembaga yang dibina.



Gambar 16. Pendampingan Ahli Bahasa melalui Grup WA

5. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta 30 balai/kantor bahasa melakukan evaluasi dengan pengambilan data sesudah pembinaan dilakukan pada tahun berjalan. Data tersebut juga dinilai dengan menggunakan format penilaian yang sama sebagaimana format penilaian pada analisis data pertama.

Berikut ini beberapa faktor keberhasilan capaian IKP Persentase Lembaga Bahasa Indonesia yang Meningkatkan Kualitas Bahasanya.

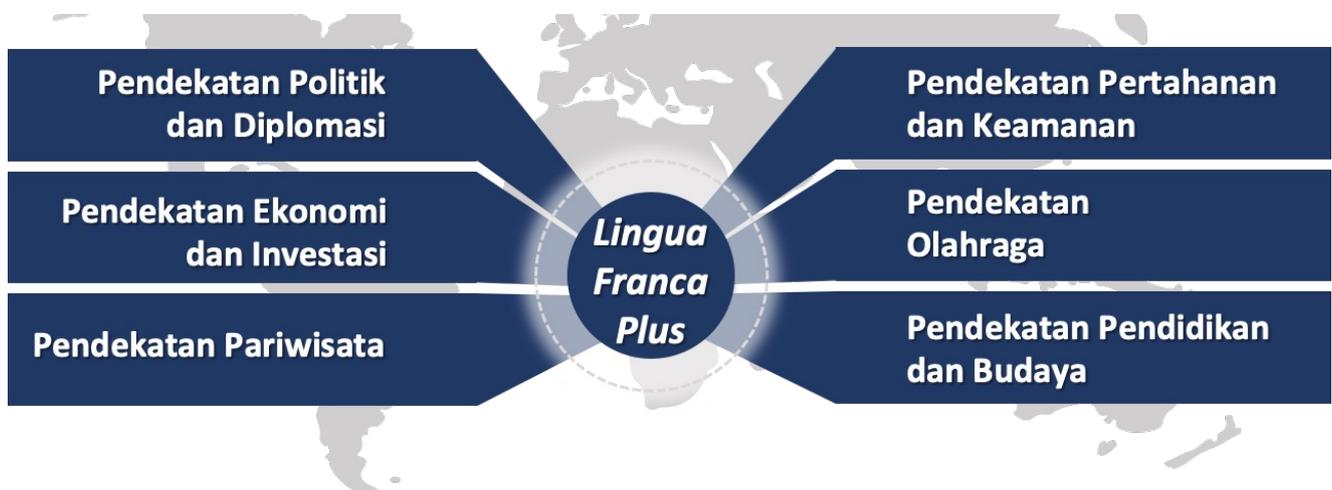
- a. Kebutuhan lembaga untuk memperbaiki kualitas penggunaan bahasanya di ruang publik
- b. Adanya nota kesepahaman yang memperkuat capaian IKP Persentase Lembaga Bahasa Indonesia yang Meningkatkan Kualitas Bahasanya

Tabel 16
Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi IKP Persentase Lembaga Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Pembinaan lembaga membutuhkan landasan yang kuat berupa nota kesepahaman dengan pemerintah daerah atau lembaga tertentu.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait.	Menyusun nota kesepahaman dengan pemerintah daerah atau lembaga tertentu.
2. Lini masa pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan.	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta balai/kantor bahasa melakukan pendekatan dan komunikasi yang intensif terhadap penanggung jawab atau narahubung untuk koordinasi pembinaan pada setiap lembaga.	

Sasaran Program 2: Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional

Komitmen negara terhadap peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional telah memadai. Sejumlah landasan hukum yang menegaskan perintah untuk menyebarkan bahasa negara untuk menjalankan mandat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan lain.



Gambar 17. Lingua Franca Plus, Peta Jalan Internasionalisasi Bahasa Indonesia Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pertama, amanat rakyat tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 36 serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen pada pasal yang sama, yakni “Bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. Kedua, kebijakan tentang peningkatan fungsi bahasa Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44, yang memberikan amanat kepada pemerintah untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Ketiga, amanat itu secara lebih konkret diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 2, yang sekaligus menjadi strategi implementasi dalam peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui beberapa upaya, yang salah satunya melalui pengembangan pengajaran bahasa Indonesia bagi orang asing. Upaya lain yang disebutkan dalam ayat tersebut, antara lain penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional, pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran di luar negeri, pengembangan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri, serta upaya lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sepanjang 2015—2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menyelenggarakan upaya strategis sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya berupa fasilitasi pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Upaya itu dikemas dalam diplomasi kebahasaan melalui jalur pendidikan atau pengajaran BIPA. Pengembangan diplomasi kebahasaan melalui program BIPA juga dilaksanakan melalui kemitraan dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yakni Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, serta Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya. Hingga tahun 2022, jumlah negara yang mengajarkan program BIPA tercatat sebanyak 52 negara.

Sepanjang 2015—2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan bahasa) menyelenggarakan upaya strategis sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya berupa fasilitasi pengembangan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Upaya itu dikemas dalam diplomasi kebahasaan melalui jalur pendidikan atau pengajaran BIPA. Pengembangan diplomasi kebahasaan melalui program BIPA juga dilaksanakan melalui kemitraan dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, yakni Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, serta Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya. Hingga tahun 2022, jumlah negara yang mengajarkan program BIPA tercatat sebanyak 52 negara.

CAPAIAN PROGRAM BIPA BADAN BAHASA TAHUN 2022

PERINCIAN NEGARA SASARAN

AMERIKA DAN EROPA

1. AMERIKA SERIKAT
2. AUSTRIA
3. **BELANDA** *
4. **BELGIA** *
5. BULGARIA
6. DENMARK
7. FINLANDIA
8. HUNGARIA
9. INGGRIS
10. ISLANDIA
11. ITALIA
12. JERMAN
13. **KANADA** *
14. LITHUANIA
15. NORWEGIA
16. POLANDIA
17. PORTUGAL
18. PRANCIS
19. RUSIA
20. **SPANYOL** *
21. SURINAME
22. SWISS
23. TURKI
24. YUNANI

ASIA, PASIFIK, DAN AFRIKA

1. **AFRIKA SELATAN** *
2. AUSTRALIA
3. BAHRAIN
4. BANGLADESH
5. FIJI
6. INDIA
7. JEPANG
8. KAZAKHSTAN
9. KOREA SELATAN
10. MESIR
11. PAKISTAN
12. PAPUA NUGINI
13. REPUBLIK RAKYAT TIONGGOK
14. QATAR
15. SENEGAL
16. SRI LANKA
17. TUNISIA
18. UNI EMIRAT ARAB
19. UZBEKISTAN

ASIA TENGGARA

1. FILIPINA
2. KAMBOJA
3. LAOS
4. MALAYSIA
5. MYANMAR
6. SINGAPURA
7. THAILAND
8. TIMOR LESTE
9. VIETNAM



*Capaian Negara pada Tahun 2022

Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia memiliki beberapa dampak positif, di antaranya:

- 1) Meningkatkan martabat bahasa Indonesia: upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.
- 2) Meningkatkan citra Indonesia: bahasa merupakan bagian penting dari identitas suatu negara. Dengan memperkenalkan bahasa Indonesia kepada dunia internasional, upaya internasionalisasi ini dapat membantu meningkatkan citra dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
- 3) Mendorong penguatan ekonomi: bahasa merupakan alat penting untuk berkomunikasi dan berbisnis. Dengan memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional, hal ini dapat membantu memperluas jejaring pasar ekspor dan menarik investasi dari negara lain.
- 4) Memperluas jejaring diplomasi: Upaya internasionalisasi bahasa Indonesia dapat membantu memperluas jejaring diplomasi Indonesia dengan negara lain dan membantu meningkatkan kerja sama dan hubungan diplomatik.
- 5) Memperkuat identitas nasional: upaya internasionalisasi bahasa Indonesia membantu memperkuat identitas nasional dan memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap diakui dan dihormati di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah bagian penting dari strategi pembangunan nasional dan dapat membantu memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dan memperkuat identitas nasional.

Indikator Kinerja Program 2.1: Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia



Gambar 18. Sebaran Program BIPA di Dunia

Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia merupakan banyaknya negara di dunia, yang melalui lembaga penyelenggara program BIPA yang berada di negara tersebut, menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Negara yang dimaksud merupakan negara berdaulat yang menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki potensi berdasarkan kajian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan rekomendasi Kementerian Luar Negeri. Lembaga penyelenggara program BIPA yang dimaksud meliputi lembaga pendidikan (formal dan nonformal), lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau komunitas serta lembaga perwakilan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) di negara setempat yang difasilitasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Fasilitasi yang dimaksud adalah bantuan teknis penyelenggaraan program pembelajaran BIPA, seperti penyediaan pengajar dan bahan ajar BIPA serta penyediaan bimbingan teknis ke-BIPA-an bagi pengajar dan lembaga.

$$\sum \text{NBI} = \text{NA} + \text{NB}$$

Keterangan:

- NBI : Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia
- NA : Akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu
- NB : Jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun tertentu

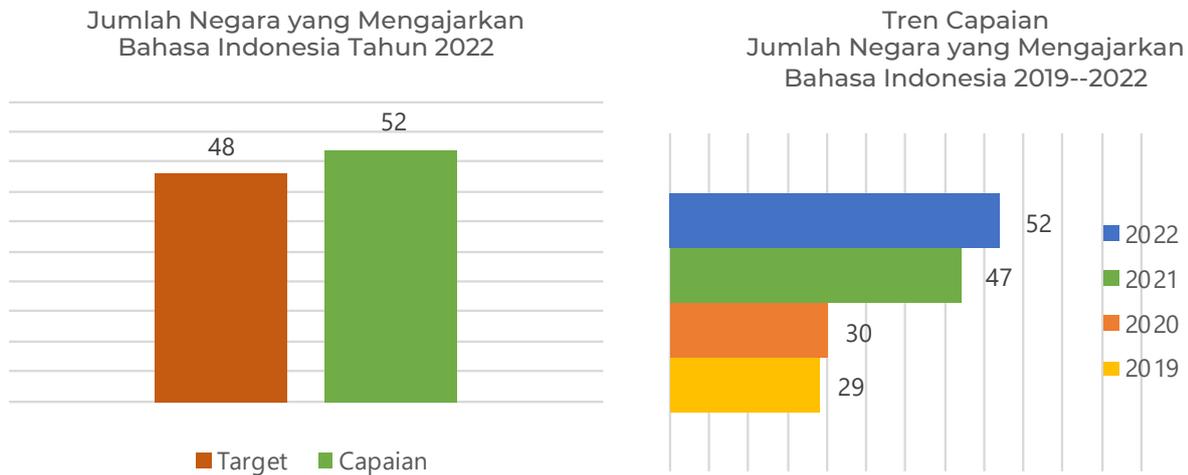
Metode penghitungan jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia adalah hasil penambahan akumulasi jumlah negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia hingga tahun tertentu dengan jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia (yang difasilitasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui fasilitasi penyelenggaraan program BIPA) pada tahun tertentu.

Pada tahun 2020, jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia adalah 30 negara. Pada 2021, jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 47 negara. Capaian jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 2022 adalah sebanyak 52 negara. Jumlah ini melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 48 negara. Capaian ini juga secara langsung sudah melampaui target renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebanyak 50 negara.

Tabel 17
Target dan Realisasi
IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024		
				Target	Realisasi	%			
2	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	2.1	Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	47	47	48	52	108,3	50

Grafik 4
Capaian IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

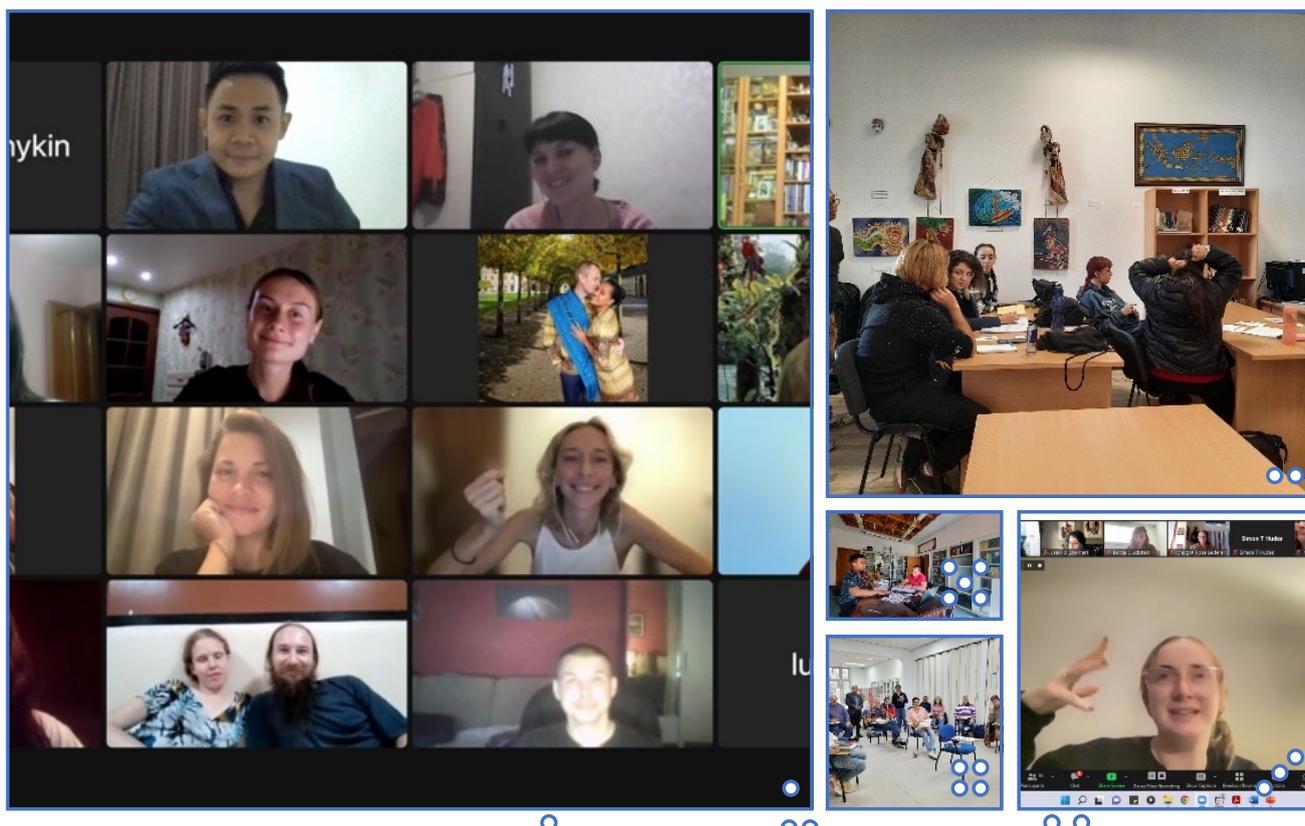


Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa memiliki tugas untuk mengoordinasi peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam implementasinya, upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) secara sistemik dan berkelanjutan. Salah satu bentuk program BIPA ialah Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA yang merupakan kegiatan penyediaan data, informasi, bahan, dan layanan bagi penerima manfaat dan pemangku kepentingan program BIPA, penyediaan regulasi dan kebijakan sebagai acuan nasional

dan internasional program BIPA, serta pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan nasional dan internasional program BIPA. Pelayanan itu meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

a. Bestari BIPA

Pada tahun anggaran 2022 telah terlaksana fasilitasi program BIPA melalui Bestari BIPA atau Penugasan Tenaga Pengajar BIPA untuk Luar Negeri. Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui pengiriman tenaga pengajar ke luar Indonesia, penugasan tenaga pengajar lokal, dan pembelajaran jarak jauh secara daring. Bestari BIPA dilaksanakan oleh Pustanda bekerja sama dengan Perwakilan RI di luar negeri.

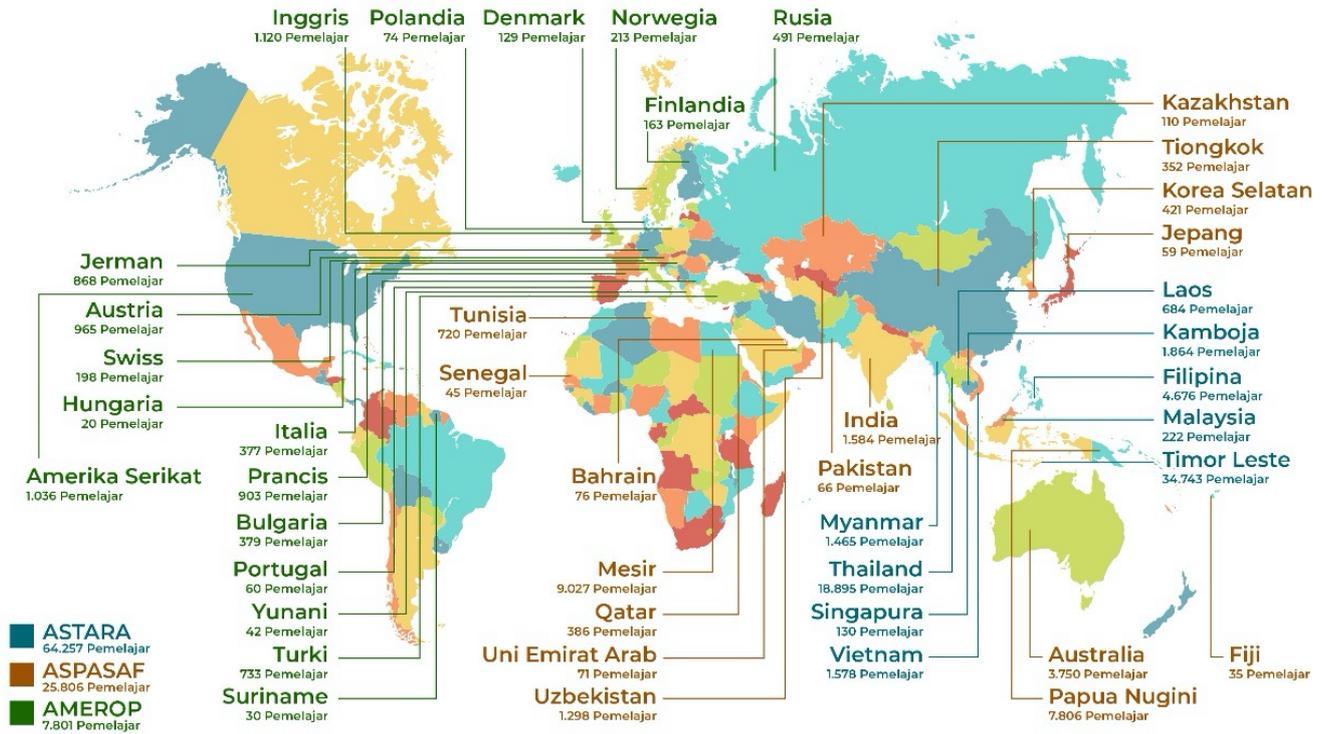


Gambar 19. Pelaksanaan Pembelajaran BIPA secara daring di KBRI Moskow, Rusia di Universitas Sofia, Bulgaria KBRI Den Haag, Belanda Tahun 2022

Capaian jumlah pemelajar dalam kegiatan ini adalah terfasilitasinya sebanyak 59.841 orang pemelajar BIPA di 185 lembaga penyelenggara program BIPA di dalam dan luar negeri. Fasilitasi tersebut dilaksanakan melalui 307 penugasan tenaga pengajar. Dengan demikian, capaian jumlah pemelajar dapat melampaui target. Sementara itu, untuk capaian negara, terdapat 5 negara baru yang terfasilitasi program BIPA. Negara-negara tersebut antara lain Afrika Selatan, Belanda, Belgia, Kanada dan Spanyol. Sama seperti capaian jumlah negara, capaian negara baru juga melampaui target. Adapun negara-negara yang terfasilitasi program BIPA pada tahun anggaran 2022 adalah sebanyak 39 negara, antara lain, Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belanda, Belgia, Bulgaria, Denmark, Filipina, Finlandia, Hungaria, India, Islandia, Italia, Jerman, Kamboja, Kanada, Kazakhstan, Korea Selatan, Laos, Lithuania, Mesir, Norwegia, Pakistan, Papua Nugini, Polandia, Portugal, Qatar, Rusia, Sri Lanka, Spanyol, Swiss, Timor Leste, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam. Secara kumulatif, negara yang terfasilitasi program BIPA hingga tahun 2022 adalah 52 negara.

Data Capaian Pemelajar BIPA

Tahun 2015--2022



Gambar 20. Data Capaian Pemelajar BIPA 2015--2022

b. Apresiasi Ke-BIPA-an



Apresiasi ke-BIPA-an dilaksanakan melalui Festival Handai Indonesia. Peserta yang mengikuti festival ini adalah sebanyak 206 orang warga negara asing. Kegiatan ini menghasilkan 3 orang peserta terbaik lomba bercerita, 1 orang peraih penghargaan kategori lomba berkomedit tunggal, 1 orang peraih penghargaan lomba bermain peran, 1 orang peraih penghargaan bermusikalisasi puisi, 3 orang peserta terbaik lomba bernyanyi, 3 orang peserta terbaik lomba berpidato, 3 orang peserta terbaik lomba membacakan puisi, serta 3 orang peserta terbaik lomba membawakan reportase.



c. Publikasi Program Ke-BIPA-an



Publikasi program ke-BIPA-an dilaksanakan sepanjang tahun. Subkegiatan publikasi meliputi pengembangan portal BIPA Daring, pengembangan Jurnal BIPA, publikasi melalui media sosial, dan alih wahana bahan diplomasi kebahasaan. Pengembangan BIPA Daring telah dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya pengembangan untuk memperbarui data pada setiap modul dan perencanaan konsep modul baru. Pengembangan Jurnal BIPA telah dilaksanakan melalui penerbitan 20 jurnal ke-BIPA-an. Publikasi

media sosial telah dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan melalui media sosial Instagram dan YouTube. Alih wahana bahan diplomasi kebahasaan telah dilaksanakan melalui kegiatan lokakarya alih wahana bahan ajar BIPA yang menghasilkan draf naskah transkrip *audiobook*.

d. Penguatan Regulasi dan Kemitraan Pengembangan Program BIPA

Capaian kegiatan Regulasi dan Kemitraan Pengembangan Program BIPA tahun anggaran 2022 adalah tersusunya draf Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) Pengajar BIPA dan draf Peta Jalan Internasionalisasi Bahasa Indonesia. Penyusunan RSKKN Pengajar BIPA dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan, antara lain, penyusunan naskah oleh tim perumus, pembahasan naskah dengan narasumber ahli, verifikasi internal, penyampaian hasil verifikasi internal, prakonvensi, verifikasi eksternal, dan konvensi nasional.

Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Upaya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional itu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan amanat tersebut diperlukan komitmen bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin agar program dan kegiatan yang mendukung kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara adaptif dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan peradaban dunia dan kebijakan pemerintah. Komitmen bersama itu dijabarkan dalam suatu dokumen yang memuat target, strategi pencapaian, dan peran tiap-tiap pihak. Target jangka pendek,

menengah, dan panjang penginternasionalan bahasa Indonesia serta keterlibatan para mitra kepentingan itu dimanifestasikan dalam bentuk peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia.

Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia



Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia memuat target yang akan dicapai dalam tiga periode, yaitu target jangka pendek, menengah, dan panjang. Penguatan regulasi, kebijakan, kelembagaan kebahasaan, serta jejaring kemitraan nasional dan internasional program bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) merupakan target jangka pendek yang diharapkan dicapai pada tahun 2025. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional di dalam dan luar Indonesia pada ranah nondiplomatik dan penggalangan komitmen serta dukungan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada organisasi internasional merupakan target jangka menengah yang dicanangkan akan dicapai pada tahun 2035. Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional tingkat tinggi di dalam dan luar Indonesia pada ranah diplomatik dan nondiplomatik serta pengusulan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa kerja pada organisasi internasional menjadi target jangka panjang yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.

Upaya penginternasionalan bahasa Indonesia dirancang dengan melibatkan multipihak dalam berbagai dimensi, meliputi dimensi politik dan diplomasi, ekonomi dan investasi, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertahanan dan keamanan, kepemudaan dan olahraga, serta pendidikan dan budaya. Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pencapaian dan target kerja bersama.

e. Penyusunan Bahan Fasilitasi Program BIPA

Kegiatan penyusunan bahan fasilitasi program BIPA telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi target kinerja tahun 2022 untuk menyediakan bahan fasilitasi pendukung diplomasi kebahasaan. Setelah dilaksanakan kegiatan sepanjang tahun 2022, berikut adalah capaian yang telah diraih.



1) Pengembangan Bahan Ajar BIPA

Target sebanyak 2 jenis bahan ajar BIPA tercapai dalam bentuk draf yang masih perlu ditelaah sebelum dipublikasikan. 13 draf bahan ajar BIPA telah dihasilkan, tetapi masih perlu dilanjutkan pengembangannya pada tahun 2023. Tahapan yang masih perlu dilaksanakan adalah penelaahan, uji coba, penyesuaian, perekaman audio, penyusunan sampul dan ilustrasi, dan publikasi. Tahapan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2022 karena adanya pengalihan anggaran untuk program prioritas Kemendikbudristek.

Berikut adalah draf bahan ajar BIPA yang telah disusun.

(a) Bahan Ajar BIPA Pengayaan Membaca Bermuatan Lokal

- (1) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Kepulauan Riau
- (2) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Bangka Belitung
- (3) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Jambi
- (4) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Banten
- (5) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Jawa Tengah
- (6) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Jawa Timur
- (7) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Kalimantan Selatan
- (8) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Gorontalo
- (9) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Sulawesi Tengah
- (10) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Sulawesi Selatan
- (11) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Maluku
- (12) Pengayaan membaca bermuatan Provinsi Nusa Tenggara Timur

(b) Bahan Ajar BIPA Berkonteks Negara
Bahan Ajar BIPA Berkonteks Filipina

2) Pengembangan Bahan Tes Ke-BIPA-an

Bahan tes ke-BIPA-an yang telah disusun adalah sebagai berikut.

(a) Tes Evaluasi Belajar

- (1) 1 baterai tes evaluasi belajar BIPA level BIPA 1
- (2) 1 baterai tes evaluasi belajar BIPA level BIPA 2

(b) Tes Penempatan

1 baterai tes penempatan

3) Pengembangan Bahan Siaran BIPA

Bahan siaran BIPA telah disusun terdiri atas 109 episode. Bahan siaran tersebut dikirimkan kepada RRI secara berkala. Tindak lanjut yang perlu dilakukan pada tahun 2023 adalah penyusunan antologi dan penyesuaian naskah siaran tersebut sehingga menjadi antologi bahan siaran BIPA.

f. Diseminasi Program BIPA

Pada tahun 2022 diseminasi program BIPA telah menyelenggarakan beberapa kegiatan yang terkait forum ilmiah, forum peningkatan kepakaran mitra program BIPA dan sosialisasi produk dan program. Berikut ini adalah capaian diseminasi program BIPA pada tahun 2022.

- 1) Bimbingan teknis pengajaran BIPA bagi Anggota DWP Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan secara daring.
- 2) Bimbingan teknis pengajaran BIPA bagi pengajar BIPA di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan secara bauran (*hybrid*)
- 3) Diseminasi produk dan program di Bali dan Nusa Tenggara Barat
- 4) Pelaksanaan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA XII bekerja sama dengan Universitas Pendidikan dan Indonesia.



Gambar 21. Pelaksanaan Konferensi Internasional Pengajaran BIPA XII di Universitas Pendidikan Indonesia, 8--10 November 2022

- 5) Diseminasi ke-BIPA-an bagi mahasiswa dan pegiat BIPA di Universitas Dian Nuswantoro, UIN Wali Songo, dan Universitas Muhammadiyah Semarang.



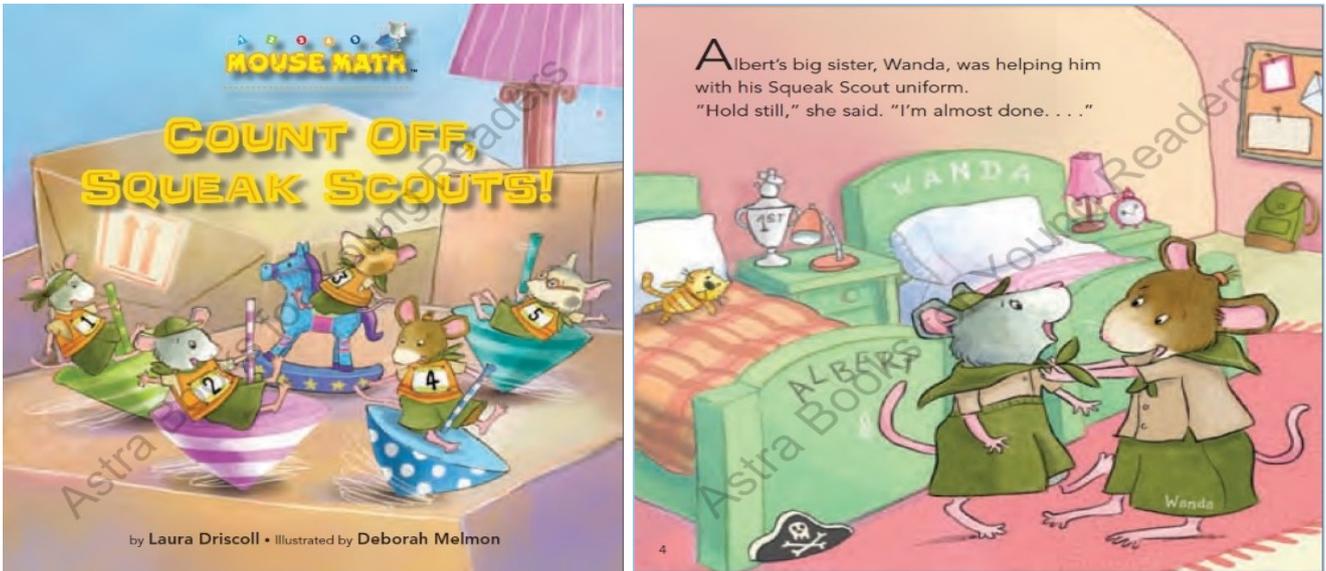
Gambar 21. Kerja Sama Program BIPA dengan Hankuk University of Foreign Studies, Jakarta 12 Agustus 2022

g. Penerjemahan Penunjang Diplomasi Kebahasaan

Untuk lebih mendorong pencapaian sasaran program Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional, pada tahun 2022 ini Badan Bahasa juga menyiapkan produk penunjang pelaksanaan diplomasi kebahasaan melalui pelaksanaan penerjemahan oleh KKLP Penerjemahan.

Produk penerjemahan merupakan buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk penerjemahan yang dihasilkan oleh Pustaka tersebut meliputi, [1] *Penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya*, [2] *Penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya*, [3] *Penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya*, [4] *Penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia*.

Melalui produk penerjemahan tersebut, diharapkan memberikan dampak positif bagi Indonesia yaitu untuk, [1] Mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui penajaman bahasa Indonesia di dunia internasional, [2] Memberikan pemahaman tentang nilai keindonesiaan kepada masyarakat internasional. [3] Mempercepat penyerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta peradaban dunia, [4] Melestarikan kearifan lokal dan mengembangkannya di tingkat nasional, [4] Meningkatkan pemerataan akses informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif.

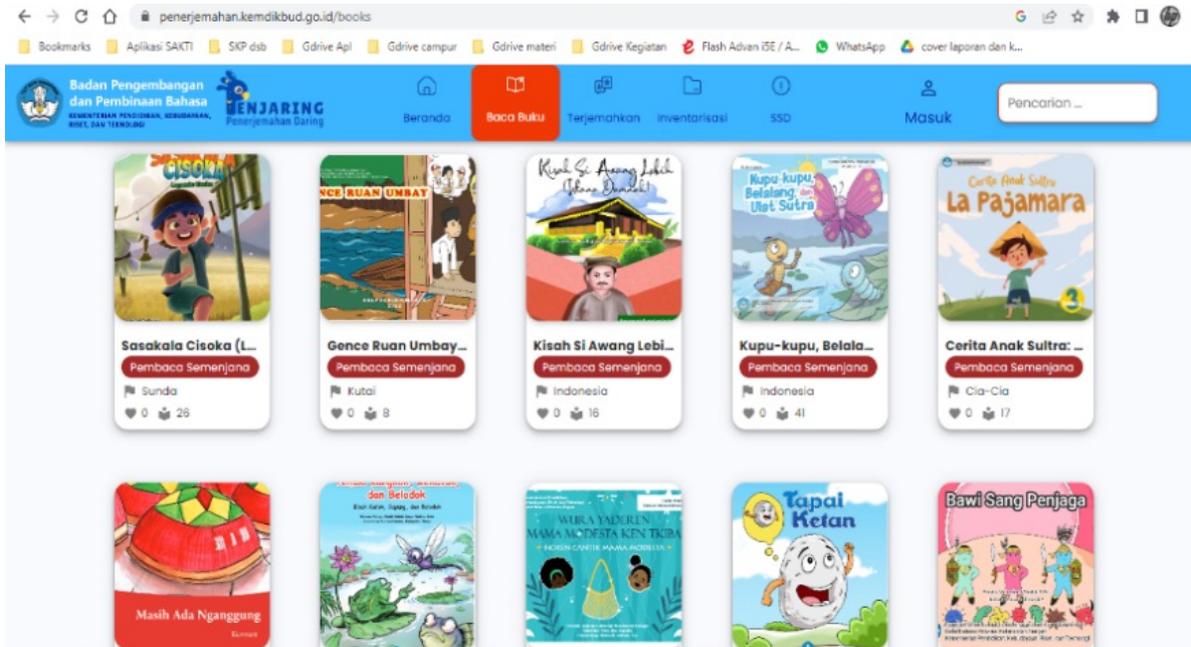


Gambar 22. Salah satu buku yang diterjemahkan

Untuk mendukung peningkatan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, dilakukan melalui penerjemahan produk buku cerita anak substansi STEAM (Sains, Teknologi, Teknik, Seni, Matematika), penerjemahan karya sastra pemenang penghargaan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, dengan total sebanyak 1175 produk penerjemahan (280 buku lisensi berbayar dan 895 buku lisensi non berbayar), serta 86 produk penerjemahan buku penunjang diplomasi kebahasaan untuk cinderamata para pemimpin negara pada Presidensi G-20 di Bali. Buku ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia, 10 bahasa daerah, 6 bahasa resmi PBB serta 6 aksara daerah.

Tabel 18
Produk Penerjemahan Buku Penunjang Diplomasi Kebahasaan untuk Cinderamata pada Presidensi G-20 di Bali

Penerjemahan dalam rangka Presidensi G-20	Penerjemahan substansi STEAM (Sains, Teknologi, Teknik, Seni, Matematika)
6 produk aksara daerah. 10 produk bahasa Indonesia 10 produk bahasa daerah. 10 produk bahasa Inggris. 10 produk bahasa Spanyol. 10 produk bahasa Arab. 10 produk bahasa Prancis. 10 produk bahasa Rusia. 10 produk bahasa Mandarin.	1.175 produk penerjemahan. Dihasilkan dari 280 buku lisensi berbayar dan 895 buku lisensi non berbayar.



Gambar 23. Laman Penjaring <https://penerjemahan.kemdikbud.go.id/>

Produk penerjemahan tersebut selanjutnya diunggah melalui laman Penerjemahan Daring (Penjaring) agar dapat dimanfaatkan publik. Dilengkapi beragam fitur untuk belajar menerjemahkan karya sastra Indonesia.



Gambar 24. SK Menaker Nomor 145 tahun 2022

Produk penerjemahan lainnya berupa Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penerjemah Teks Sastra, untuk meningkatkan mutu penerjemah teks sastra dan menunjang kegiatan penerjemahan buku. SKKNI tersebut telah diterbitkan dengan SK Menaker nomor 145 tahun 2022.

Berikut ini faktor keberhasilan IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia.

1. Memadainya landasan hukum dalam menjalankan mandat peningkatan fungsi bahasa Indonesia
2. Adanya lembaga kebahasaan yang berfungsi secara khusus menjalankan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia
3. Keberadaan perwakilan Republik Indonesia di lebih dari 125 negara (melalui fungsi Pensosbud dan Atdikbud) dengan sudut pandang baru tentang penginternasionalan bahasa Indonesia
4. Sistem kebahasaan bahasa Indonesia yang “relatif mudah” dipelajari

5. Jumlah sumber daya manusia Indonesia khususnya di bidang kebahasaan yang memadai (dalam dan luar negeri)
6. Terdapatnya pusat atau lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri secara mandiri
7. Adanya perangkat kebahasaan yang modern dan memadai
8. Besarnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia
9. Potensi dan daya tarik budaya dan alam Indonesia
10. Potensi dan daya tarik ekonomi Indonesia (sebagai produsen maupun pasar)
11. Dukungan generasi muda milenial dalam publikasi penginternasionalan bahasa Indonesia

Tabel 19
Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi
IKP Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Regulasi kebahasaan yang sudah ada belum sepenuhnya terimplementasi	Pengimplementasian regulasi kebahasaan khususnya tentang penginternasionalan bahasa Indonesia	Pemberdayaan program BIPA di perwakilan Republik Indonesia di lebih dari 125 negara (melalui fungsi Pensosbud dan Atdikbud) dengan sudut pandang baru tentang penginternasionalan bahasa Indonesia
2. Regulasi kebahasaan bagi warga negara asing belum komprehensif	Penguatan regulasi kebahasaan untuk tenaga kerja asing	Penguatan pusat atau lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri
3. Harmonisasi regulasi tidak berjalan dengan optimal	Harmonisasi regulasi lintas sektoral	Penyiapan peraturan pemerintah dalam memayungi peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia
4. Sumber daya yang dapat dimobilisasi masih terbatas	Penyediaan program pendidikan khusus ke-BIPA-an	Penguatan kompetensi pengajar BIPA berdasarkan SKKNI
5. Indonesia kurang dikenal oleh warga/negara-negara tertentu	Promosi potensi budaya Indonesia	Pengintegrasian komponen budaya dalam pengajaran BIPA
6. Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia yang mengintegrasikan program di berbagai instansi belum disusun secara optimal	Penyusunan peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia yang mengintegrasikan program di berbagai instansi	Pelibatan kementerian dan lembaga dalam penginternasionalan bahasa Indonesia
7. Sinergi dan dukungan pemangku kepentingan terhadap upaya penginternasionalan bahasa Indonesia belum optimal	Pengoptimalan sinergi dan dukungan pemangku kepentingan terhadap upaya penginternasionalan bahasa Indonesia	Penguatan jejaring kemitraan program BIPA
8. Pemahaman masyarakat yang belum optimal tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia	Sosialisasi kepada masyarakat tentang amanah penginternasionalan bahasa Indonesia	Kemitraan dengan lembaga terkait dalam upaya sosialisasi penginternasionalan Bahasa Indonesia.
9. Biaya lisensi berbayar buku bahan terjemahan di pasar global cukup tinggi, sehingga menyulitkan tim penerjemahan Pustaka untuk mendapatkan buku lisensi berbayar dalam jumlah banyak	Menggali informasi dari berbagai sumber tentang alternatif buku sumber penerjemahan dengan lisensi non berbayar.	Menjalin komunikasi secara intensif dengan penyedia lisensi non berbayar agar Pustaka mendapatkan alternatif sumber bahan terjemahan.

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
10. Tahapan pengadaan lisensi berbayar dari penyedia di luar negeri, ternyata cukup panjang dan memakan waktu. Hal ini merupakan pengalaman pertama kali bagi tim penerjemahan.	Berkonsultasi dengan pihak Biro Umum Kemendikbudristek dan LKPP tentang peluang dan metode untuk percepatan pembelian lisensi	Mempertimbangkan saran dan informasi dari Biro Umum Kemendikbudristek dan LKPP untuk percepatan pembelian lisensi.
11. Kendala teknis seperti fluktuasi nilai tukar, kendala sistem perbankan dalam negeri, perbedaan aspek hukum tentang kontrak pembelian antara dengan pihak penyedia lisensi berbayar, dan kendala teknis aplikasi Sakti Kemenkeu.	Koordinasi dengan pihak KPPN Nogor, perbankan, penyedia luar negeri terkait kendala teknis.	Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak KPPN Bogor, perbankan, dan penyedia agar kendala teknis segera terselesaikan.

Sasaran Program 3: Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan. Berdasarkan tujuan Kemendikbudristek tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan salah satu tujuan berupa peningkatan kelestarian bahasa daerah dan indikator kinerja dalam bentuk indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya.

Program revitalisasi bahasa daerah memiliki beberapa dampak positif, di antaranya:

- 1) Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahasa daerah: program revitalisasi bahasa daerah ini memfokuskan perhatian pada pentingnya bahasa daerah dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hal tersebut.
- 2) Memperkuat identitas budaya lokal: bahasa daerah merupakan bagian penting dari budaya dan identitas suatu komunitas tutur. Program revitalisasi bahasa daerah ini membantu memperkuat identitas budaya lokal dan memastikan bahwa bahasa daerah tetap hidup dan lestari serta diwariskan kepada generasi berikutnya.
- 3) Menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan: Program revitalisasi bahasa daerah ini membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memelihara dan memperkuat bahasa daerah mereka, sehingga membantu memastikan bahwa bahasa daerah akan tetap hidup dan lestari.
- 5) Membantu mencegah kepunahan bahasa daerah: sejumlah bahasa daerah saat ini sedang terancam punah. Program revitalisasi bahasa daerah ini membantu memperkuat dan memelihara bahasa daerah yang terancam punah sehingga memastikan bahwa bahasa-bahasa ini tetap hidup dan lestari.

Secara keseluruhan, program revitalisasi bahasa daerah memiliki dampak positif yang signifikan bagi konservasi dan pelestarian bahasa daerah, memperkuat identitas budaya lokal, dan memastikan bahwa bahasa daerah tetap hidup dan diteruskan ke generasi berikutnya.

Indikator Kinerja Program 3.1: Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

Indeks pemanfaatan bahasa daerah merupakan indeks yang menggambarkan upaya yang dilakukan oleh penutur bahasa daerah, baik perseorangan maupun kelompok untuk mempertahankan keberadaan bahasa daerahnya dengan cara menggunakan bahasa daerah tersebut dalam berbagai ranah, yaitu dalam berkomunikasi dengan keluarga, kebijakan di ranah pendidikan, dan gerakan di masyarakat. Variabel indeks pemanfaatan bahasa daerah diturunkan dari PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia terutama Pasal 21. Pada pasal ini dijelaskan mengenai pembinaan masyarakat pengguna bahasa daerah, pembinaan bahasa daerah, pembelajaran bahasa daerah, dan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelestarian bahasa daerah.

Variabel yang digunakan untuk menghitung pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya adalah:

1. Jumlah penutur bahasa daerah
2. Jumlah bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal
3. Jumlah guru bahasa daerah
4. Jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan
5. Jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik

Angka yang menunjukkan upaya memanfaatkan bahasa daerah oleh penuturnya dalam komunikasi sehari-hari, dalam pembelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di setiap jenjang pendidikan, serta dalam penerbitan buku, media massa, dan karya sastra.

Angka ini merupakan rerata dari nilai tiap variabel yang digunakan dalam penyusunan indeks, yaitu

1. Persentase penutur bahasa daerah (VPen),
2. Persentase bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal (VMul),
3. Persentase guru bahasa daerah (VGr); (guru yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya guru bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, tetapi juga termasuk penutur atau maestro bahasa daerah di lembaga pendidikan nonformal atau komunitas),
4. Persentase bahasa daerah yang memiliki terbitan (Vtb), dan
5. Persentase bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik (VEI).

Penghitungan terhadap masing-masing variabel menggambarkan kondisi ideal setiap variabel.

1. Kondisi ideal penutur bahasa daerah adalah jika setiap penduduk setidaknya menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi paling tidak di lingkungan keluarga.
2. Kondisi ideal muatan lokal bahasa daerah adalah jika setiap bahasa daerah dijadikan muatan lokal atau masuk ke dalam kurikulum pendidikan sesuai dengan peta persebaran bahasa daerah tersebut.

3. Kondisi ideal guru bahasa daerah adalah setiap wilayah memiliki tenaga pengajar mata pelajaran bahasa daerah
4. Kondisi ideal terbitan bahasa daerah adalah jika setiap bahasa daerah memiliki terbitan atau media publikasi.
5. Kondisi ideal publikasi elektronik adalah jika setiap bahasa daerah dipublikasikan di media elektronik.

Perhitungan terhadap masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

$$V_{Pen} = \frac{\text{jumlah penutur bahasa daerah}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\%$$

$$V_{Mul} = \frac{\text{jumlah bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \times 100\%$$

$$V_{Gr} = \frac{\text{jumlah guru bahasa daerah}}{\text{jumlah sekolah di wilayah persebaran bahasa}} \times 100\%$$

$$V_{Tb} = \frac{\text{jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan}}{\text{jumlah bahasa daerah}} \times 100\%$$

$$V_{El} = \frac{\text{jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik}}{\text{jumlah bahasa daerah}}$$

Variabel-variabel tersebut kemudian dihitung untuk memperoleh indeks pemanfaatan bahasa daerah di suatu provinsi dengan rumus sebagai berikut.

$$IPBD \text{ Provinsi} = \frac{V_{Pen} + V_{Mul} + V_{Gr} + V_{Tb} + V_{El}}{5}$$

Sementara nilai nasional indeks pemanfaatan bahasa daerah merupakan rerata jumlah indeks pemanfaatan bahasa daerah di seluruh provinsi.

$$IPBD \text{ Nasional} = \frac{\text{jumlah total IPBD provinsi}}{34}$$

Rentang nilai indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya dikategorikan sebagai berikut.

RENTANG NILAI	KATEGORI
71,00—100,00	tinggi
41,00—70,00	sedang
10,00—40,00	rendah

Berdasarkan rumus penghitungan di atas, berikut ini pemerolehan indeks pemanfaatan bahasa daerah yang dicapai pada tahun 2022.

Tabel 20
Rumus Penghitungan Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

RUMUS	HASIL	INDIKATOR
Jumlah Penutur Bahasa Daerah/Jumlah Penduduk	67.97	Indikator 1: Penutur
Jumlah Bahasa yang Dijadikan Mulok/Jumlah Bahasa	26.28	Indikator 2: Mulok
Jumlah Guru Bahasa Daerah/Jumlah Sekolah	2.15	Indikator 3: Guru
Jumlah Bahasa Daerah yang Memiliki Terbitan/Jumlah Bahasa Daerah	8.07	Indikator 4: Terbitan
Jumlah Bahasa Daerah yang Memiliki Program Di Media Elektronik/Jumlah Media Elektronik	8.07	Indikator 5: Media Elektronik
HASIL AKHIR	22.51	RENDAH

Indeks pemanfaatan bahasa daerah tahun 2022 sebesar 22.51 dengan ketercapaian target sebesar 120%. Hal ini menunjukkan peningkatan indeks pemanfaatan bahasa daerah sebesar 4.64 atau sebedar 26% dari baseline tahun 2021. Adapun cara pemerolehan angka indeks tersebut sebagai berikut.

1. Indeks penutur diperoleh dari jumlah penutur bahasa daerah/jumlah penduduk. Adapun perhitungan penutur masih menggunakan data sensus 2010 karena data sensus 2020 baru bisa diperoleh setelah diluncurkan pada Februari 2023.
2. Indeks mulok diperoleh dari jumlah bahasa yg dijadikan mulok/jumlah bahasa daerah. Mulok yang dihitung berdasarkan informasi balai/kantor bahasa tahun 2021.
3. Indeks guru diperoleh dari jumlah guru bahasa daerah/jumlah sekolah. Jumlah guru diperoleh dari data data guru utama pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022 yang merupakan keluaran dari kegiatan perlindungan bahasa di balai/kantor bahasa. Jumlah sekolah berdasarkan dari jumlah sekolah SD dan SMP di Dapodik, Kemdikbudristek periode 2021/2022 semester ganjil.
4. Indeks terbitan dihitung dari bahasa yang memiliki esai, penelitian, bahan ajar, alkitab, dan lain-lain. Jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan/jumlah bahasa daerah. Jumlah terbitan pada tahun 2022 ini dihitung dari laporan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022.
5. Indeks media elektronik diperoleh dari jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik/jumlah bahasa daerah. Jumlah pemublikasian elektronik berdasarkan dari laporan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022.

Indeks pemanfaatan bahasa daerah tahun 2022 sebesar 22.51 dengan ketercapaian target sebesar 120%. Hal ini menunjukkan peningkatan indeks pemanfaatan bahasa daerah sebesar 4.64 atau sebedar 26% dari baseline tahun 2021. Adapun cara pemerolehan angka indeks tersebut sebagai berikut.

1. Indeks penutur diperoleh dari jumlah penutur bahasa daerah/jumlah penduduk. Adapun perhitungan penutur masih menggunakan data sensus 2010 karena data sensus 2020 baru bisa diperoleh setelah diluncurkan pada Februari 2023.
2. Indeks mulok diperoleh dari jumlah bahasa yg dijadikan mulok/jumlah bahasa daerah. Mulok yang dihitung berdasarkan informasi balai/kantor bahasa tahun 2021.
3. Indeks guru diperoleh dari jumlah guru bahasa daerah/jumlah sekolah. Jumlah guru diperoleh dari data data guru utama pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022 yang merupakan keluaran dari kegiatan perlindungan bahasa di balai/kantor bahasa. Jumlah sekolah berdasarkan dari jumlah sekolah SD dan SMP di Dapodik, Kemdikbudristek periode 2021/2022 semester ganjil.
4. Indeks terbitan dihitung dari bahasa yang memiliki esai, penelitian, bahan ajar, alkitab, dan lain-lain. Jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan/jumlah bahasa daerah. Jumlah terbitan pada tahun 2022 ini dihitung dari laporan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022.
5. Indeks media elektronik diperoleh dari jumlah bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik/jumlah bahasa daerah. Jumlah pemublikasian elektronik berdasarkan dari laporan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022.

Daya hidup bahasa dapat diketahui dari rerata indeks sepuluh faktor vitalitas meliputi (1) pewarisan antargenerasi, (2) jumlah penutur dan proporsi penutur, (3) ranah penggunaan bahasa, (4) respons terhadap ranah dan media yang baru, (5) bahan ajar bahasa dan literasi, (6) sikap pemerintah dan

regulasi, (7) sikap penutur, (8) jenis dan kualitas dokumentasi, (9) bilingualisme, dan (10) kontak bahasa. Vitalitas bahasa memiliki enam tingkat, yakni aman (indeks 0,81—1,00), rentan (0,61—0,80), mengalami kemunduran (0,41—0,60), terancam punah (0,21—0,40), kritis (0,01—0,20), hingga punah (indeks 0,00). Pada tahun 2021 indikator kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mencapai indeks 0,58.

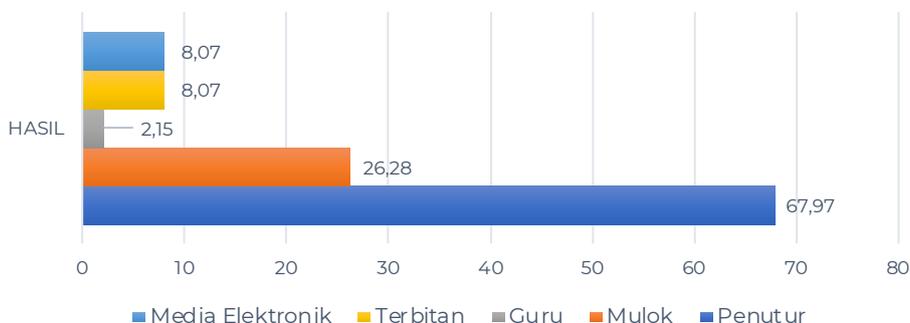
Tabel 21
Target dan Realisasi IKP Indeks Daya Hidup Bahasa Daerah Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024		
				Target	Realisasi	%			
3	Meningkatnya daya hidup bahasa daerah	3.1	Indeks daya hidup bahasa daerah	0.54	0.55	0.56	0.58	103.6%	0.59

Tabel 22
Target dan Realisasi IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya Tahun 2022

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024		
				Target	Realisasi	%			
3	Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	3.1	Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	17.87	17.87	18.73	22.51	120%	20.54

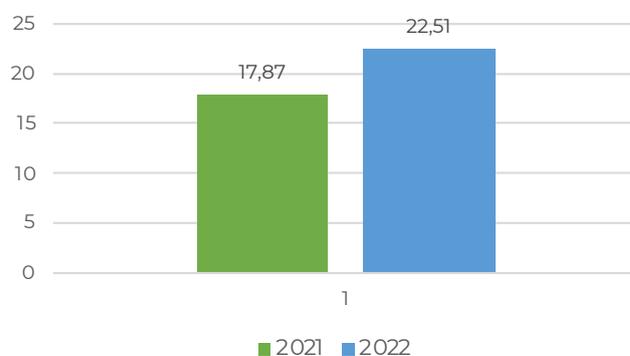
Grafik 5
Capaian Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya



Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya



Tren Capaian Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya



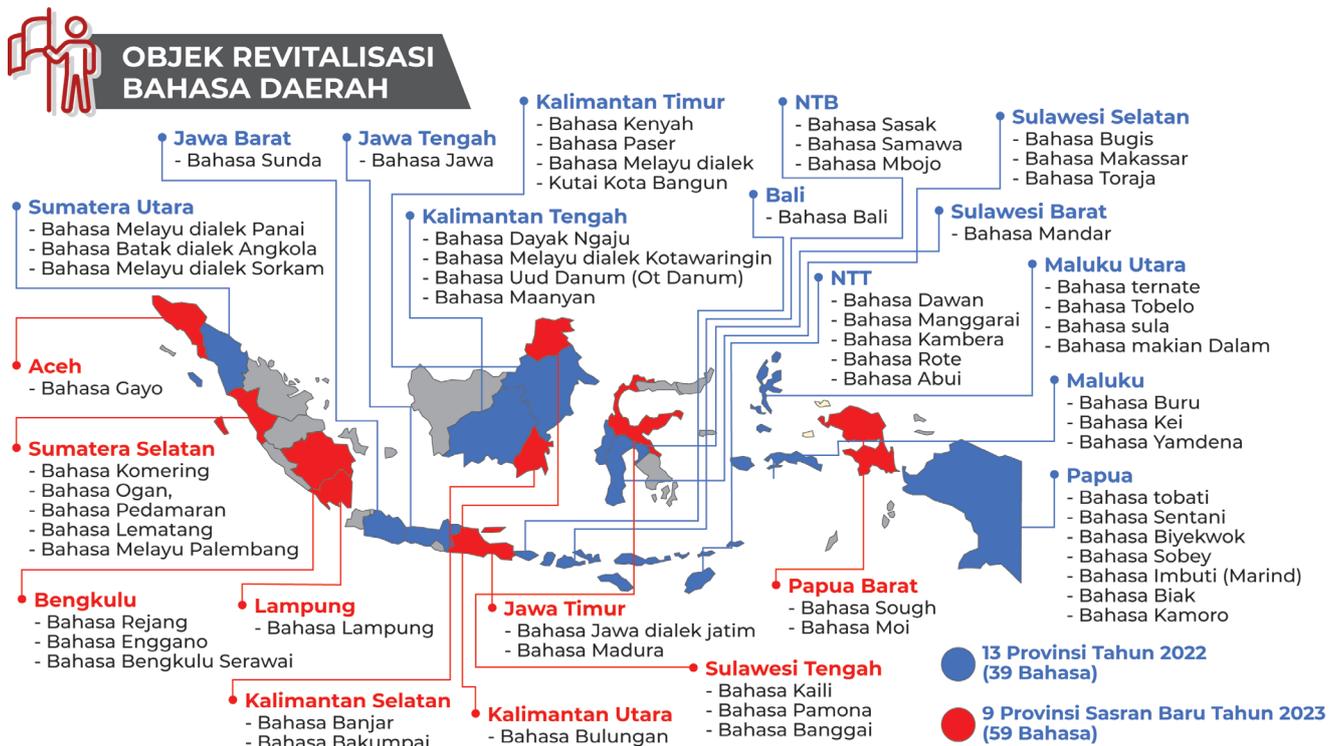
Kegiatan yang mendukung tercapainya target Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

A. Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ketujuh Belas: Revitalisasi Bahasa Daerah pada tanggal 22 Februari 2022. Program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan salah satu upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Upaya ini tentunya didasarkan pada amanat Pasal

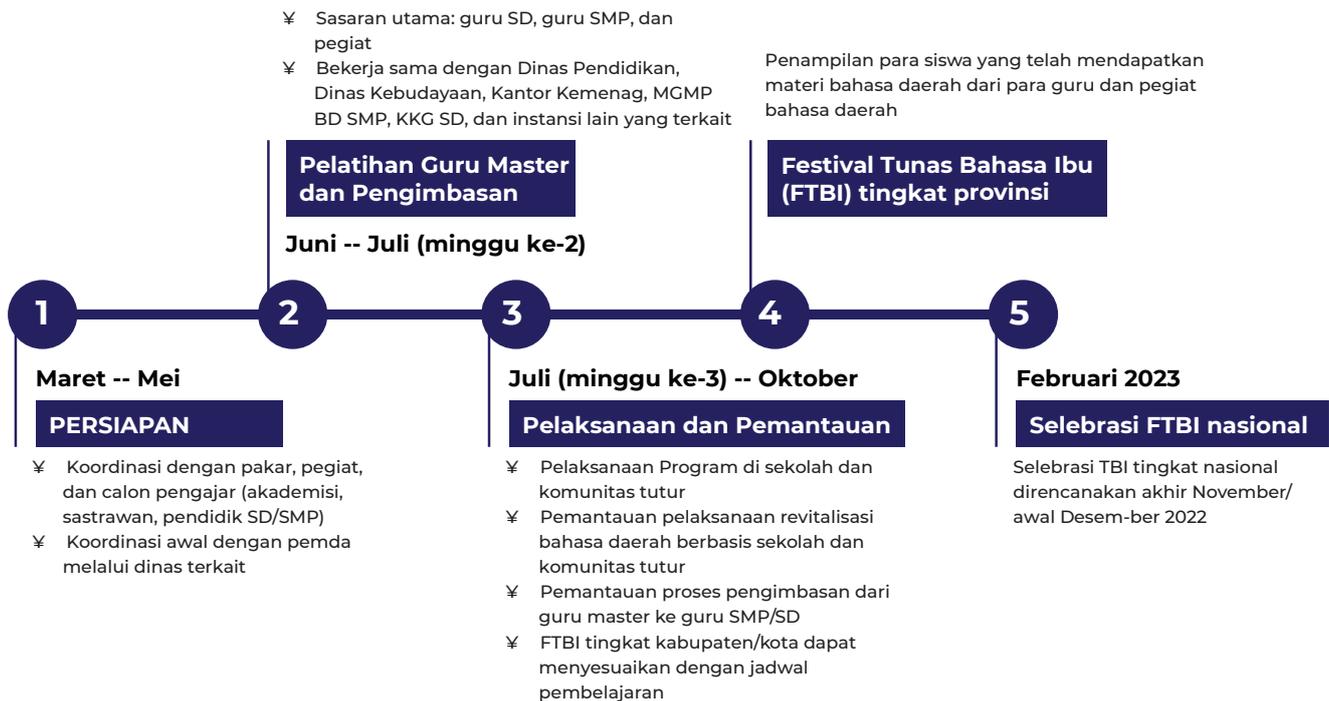
32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selain itu, upaya ini juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 (UU 24/2009) pada Pasal 41 (1) dan Pasal 42 (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP 57/2014). Peluncuran Program Merdeka Belajar Ketujuh Belas ini diimplentasikan kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang dilaksanakan di 12 Balai/kantor dengan menerapkan Revitalisasi Bahasa Model A, Model B, dan Model C. Adapun kedua belas Balai dan kantor yang telah melaksanakan revitalisasi bahasa tahun ini adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.



Gambar 25. Objek Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2022 dan Sasaran Baru Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa daerah terbagi menjadi 5 tahapan, yakni survei dan koordinasi, diskusi kelompok terpusat, penyusunan bahan ajar, pelatihan pengajar utama (guru utama), pengimbasan pengajar sejawat (guru sejawat) dan penutur muda (siswa), dan festival tunas bahasa ibu. Saat ini pelaksanaan revitalisasi di 12 Balai/kantor

telah selesai sampai festival tunas bahasa ibu. Adapun lini masa pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah sebagai berikut.



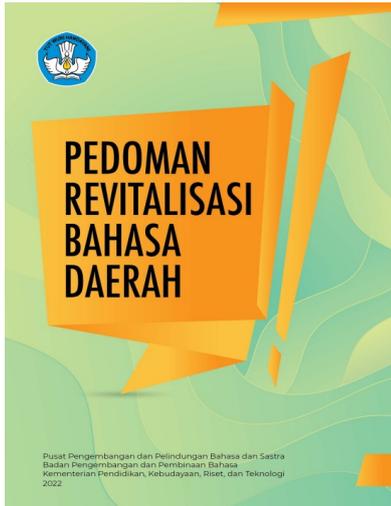
Gambar 26. Lini Masa Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah

Dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah untuk mencapai peningkatan indeks pemanfaatan bahasa daerah, terdapat pembagian tugas pelaksanaan yang berbeda antara Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra dengan UPT Badan Bahasa (balai/kantor bahasa). Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bertugas untuk menyusun panduan teknis pelaksanaan revitalisasi, dalam hal ini menyusun model revitalisasi bahasa daerah yang diwujudkan dalam pedoman dan petunjuk teknis. Selain itu, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra juga bertugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan revitalisasi bahasa secara substansi dan teknis. Adapun peran UPT Badan Bahasa (balai/kantor bahasa) menjadi pelaksanaan kegiatan pelindungan bahasa, khususnya revitalisasi bahasa.



Gambar 27 . Capaian Merdeka Belajar Revitalisasi Bahasa Daerah tahun 2022

B. Penyusunan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra



Untuk mendukung ketercapaian sasaran berupa Meningkatnya kelestarian bahasa daerah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki peran untuk menyusun model pelindungan bahasa dan sastra. Model ini akan dijadikan acuan oleh balai dan kantor bahasa sebagai pelaksana pelindungan bahasa dan sastra daerah. Pada tahun 2022 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memiliki target sasaran sebanyak 6 model pelindungan yang terbagi menjadi 3 model pelindungan bahasa dan 3 model pelindungan sastra. Adapun penjelasan keenam model tersebut sebagai berikut.

1. Revitalisasi Bahasa Model A

Revitalisasi bahasa model A diperuntukkan bagi bahasa daerah dengan karakteristik (1) daya hidup bahasanya aman atau rentan, (2) merupakan bahasa dominan di dalam masyarakat tuturannya, dan (3) mempunyai jumlah penutur yang besar. Untuk model A, revitalisasi dilakukan melalui pendekatan (1) pewarisan atau transmisi secara terstruktur dengan pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) atau pesantren dan (2) pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

2. Revitalisasi Bahasa Model B

Revitalisasi bahasa model B dikhususkan untuk bahasa-bahasa dengan ciri-ciri (1) daya hidup bahasa tergolong rentan, (2) jumlah penutur relatif banyak, dan (3) bahasa digunakan secara bersaing dengan bahasa-bahasa daerah lain di wilayah tersebut. Revitalisasi dapat dilakukan dengan pendekatan (1) pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah (berbasis sekolah) jika wilayah tutur bahasa itu memadai atau (2) dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas jika wilayah tutur bahasanya terbatas dan khas.

3. Revitalisasi Bahasa Model C

Pendekatan baru pelindungan bahasa di model C ditujukan untuk bahasa daerah dengan karakteristik daya hidup bahasa yang masuk dalam kategori mengalami kemunduran, terancam punah, atau kritis atau bahasa dengan jumlah penutur yang sedikit dan sebaran terbatas. Pada umumnya, ekologi bahasa-bahasa kecil ini tidak ada bahasa yang dominan. Pendekatan model C diterapkan melalui beberapa hal, yaitu pewarisan, pembelajaran, dan identifikasi aktor atau pelaku. Pewarisan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis komunitas untuk wilayah tutur bahasa yang terbatas dan khas. Pewarisan bahasa diharapkan dapat terjadi secara alamiah. Pembelajaran dilakukan dengan menunjuk dua atau lebih keluarga sebagai model tempat belajar atau dilakukan di pusat kegiatan masyarakat, seperti balai desa, tempat ibadah, kantor desa, atau taman bacaan masyarakat. Identifikasi aktor atau pelaku revitalisasi yang sudah ada di masyarakat penutur itu sendiri.

Pengembangan Model Revitalisasi Bahasa Daerah

**MERDEKA
BELAJAR**

Revitalisasi Bahasa Daerah



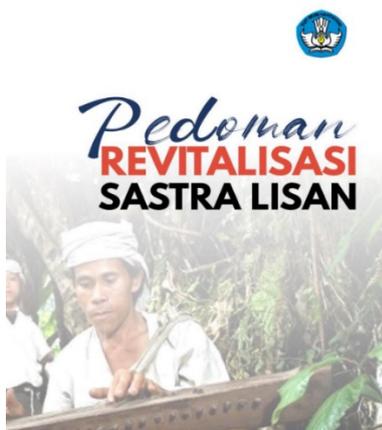
Gambar 28 . Pengembangan Model Revitalisasi Bahasa Daerah

4. Penyusunan Kekerabatan Sastra Lisan


 PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA
 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
 2022

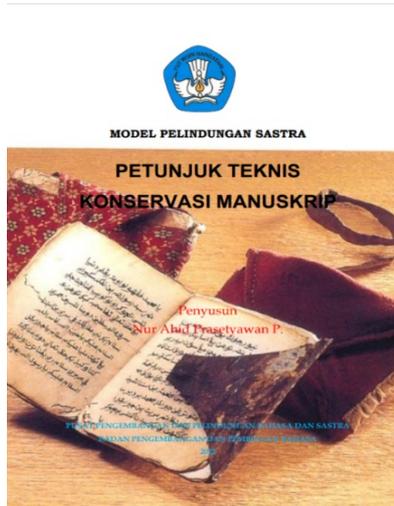
Penyusunan Kekerabatan Sastra Lisan ini berisi tentang penyusunan analisis sintesis hubungan atau keterkaitan antara satu sastra dengan sastra lainnya, bahkan dapat menjadi rujukan model geobudaya yakni pengelompokkan budaya atau kebudayaan berdasarkan kegeografian. Pedoman ini juga berisi tentang konsep kekerabatan sastra, unsur-unsur dalam kekerabatan sastra, dan metodologi dalam menerapkan kekerabatan sastra.

5. Revitalisasi Sastra Lisan



Revitalisasi Sastra Lisan ini berisi tentang konsep dan unsur-unsur sastra lisan, model sastra lisan tipe A, B, dan C, indikator dan langkah kerja masing-masing model revitalisasi sastra lisan, petunjuk untuk melaksanakan pendampingan. Revitalisasi sastra lisan model A berfokus pada keberadaan maestro, pewaris, dan pelaku dalam keberlangsungan sastra lisan. Revitalisasi sastra lisan model B berfokus pada kondisi sastra lisan. Karya sastra lisan yang dimaksudkan dilihat dari bentuk, isi, dan fungsi. Revitalisasi sastra lisan model C berfokus pada pementasan, komunitas, dan pemangku kepentingan dalam situasi sastra itu sedang berkembang.

6. Konservasi Manuskrip



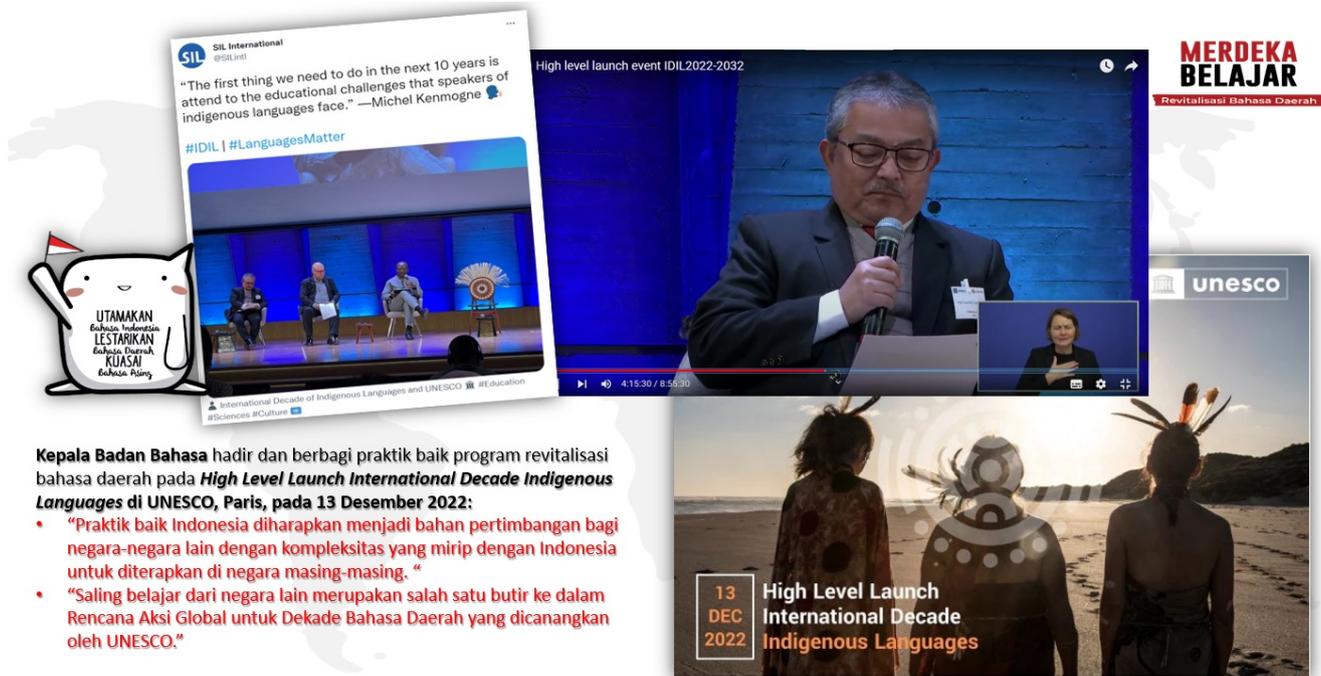
Konservasi Manuskrip berisi tentang prosedur kerja dalam mengonservasi manuskrip, alat-alat yang digunakan dalam konservasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan melakukan katalogisasi manuskrip. Hasil kegiatan konservasi manuskrip, dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian atau penelitian bagi para peneliti dan akademis maupun masyarakat umum. Dalam kerangka kerja perlindungan sastra, hasil kegiatan konservasi manuskrip dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Keberhasilan atau kegagalan target indikator kinerja dilihat pada faktor-faktor berikut ini

- Ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah (termasuk sastra lisan dan sastra tulis) yang masih difungsikan;
- ketersediaan data dan informasi mengenai pelaku/pegiat bahasa dan sastra daerah dalam kegiatan tradisional;
- ketersediaan data dan informasi mengenai sarana dan prasarana bidang bahasa dan sastra daerah;
- ketersediaan data dan dokumentasi bahasa, seperti kamus, tata bahasa, daftar kata, serta kajian-kajian tentang bahasa tersebut, serta ketersediaan data dan dokumentasi sastra daerah, seperti publikasi ataupun rekaman;
- ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang sudah tidak lagi difungsikan;
- ketersediaan data dan informasi tradisional bahasa dan sastra daerah yang sudah berubah fungsinya;
- ketersediaan data dan informasi mengenai bahasa dan sastra daerah yang dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah; dan
- ketersediaan data dan informasi ekosistem bahasa dan sastra daerah yang masih ada.

Tabel 23
Hambatan, Langkah Antisipasi, dan Strategi
IKP Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya

Hambatan	Langkah Antisipasi	Strategi Pencapaian
1. Data penutur bahasa yang terbaru belum bisa dipublikasikan	Menggunakan data yang tersedia di BPS	Data penutur bahasa yang digunakan adalah data hasil Sensus Penduduk tahun 2010
2. Perolehan data mengenai guru bahasa daerah, publikasi, dan media elektronik baru pada trimester keempat	Berkoordinasi dengan satker di daerah yang melaksanakan revitalisasi bahasa daerah secara intensif	Data diambil merupakan data final di akhir tahun setelah program revitalisasi selesai dilaksanakan
3. kegiatan baru dilaksanakan pada tengah tahun Karena dalam pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah tahun 2022 menggunakan dana tambahan dari Anggaran BA-BUN	Memaksimalkan pola monitoring pusat dengan balai/kantor bahasa sebagai pelaksana revitalisasi bahasa daerah	Memperketat lini masa pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah agar seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik



Kepala Badan Bahasa hadir dan berbagi praktik baik program revitalisasi bahasa daerah pada **High Level Launch International Decade Indigenous Languages** di UNESCO, Paris, pada 13 Desember 2022:

- “Praktik baik Indonesia diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi negara-negara lain dengan kompleksitas yang mirip dengan Indonesia untuk diterapkan di negara masing-masing.”
- “Saling belajar dari negara lain merupakan salah satu butir ke dalam Rencana Aksi Global untuk Dekade Bahasa Daerah yang dicanangkan oleh UNESCO.”

Gambar 29 . Berbagi Praktik baik program Revitalisasi Bahasa Daerah di forum UNESCO, Paris 13 Desember 2022

Sasaran Program 4: Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Badan Bahasa merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan *Good Governance*. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk meningkatkan akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Bahasa perlu menerapkan dan mengimplementasikan SAKIP di setiap satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa. Untuk mengukur ketercapaian itu, Badan Bahasa menetapkan indikator kinerja Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP di tahun 2022.

Implementasi SAKIP memberikan dampak positif terhadap: (1) seluruh capaian sasaran program beserta indikator kinerja program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2) SAKIP mendorong penganggaran pada satuan kerja berbasis pada capaian kinerja tahun sebelumnya. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran mendorong upaya perbaikan pada tahun berikutnya. (4) peningkatan layanan di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Indikator Kinerja Program 4.1: Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tipe penghitungan Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ialah nonkumulatif.

$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

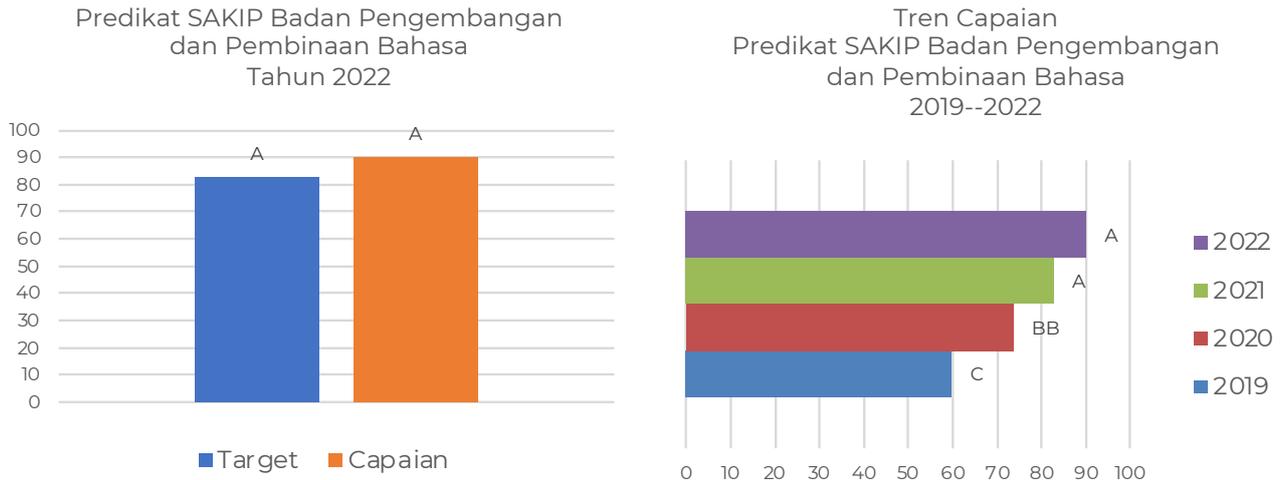
Tabel 24
Rentang Nilai, Predikat, dan Interpretasi Penilaian SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
> 90 – 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	A	Memuaskan
> 70 – 80	BB	Sangat Baik
> 60 – 70	B	Baik
> 50 – 60	D	Sangat Kurang

Tabel 25
Target dan Realisasi
IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024
				Target	Realisasi	%	
4 Meningkatkan Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	4.1 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	A	A	100	A

Grafik 6 Capaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa



Pada tahun 2019, Badan Bahasa memperoleh predikat C dengan nilai 59,75 (sangat kurang). Pada tahun 2020, Badan Bahasa memperoleh predikat BB dengan nilai 73,56 (sangat baik). Pada tahun 2021, Badan Bahasa memperoleh predikat A dengan nilai 82,66 (memuaskan). Pada tahun 2022, Badan Bahasa memperoleh predikat A dengan nilai 90 (memuaskan). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa predikat SAKIP Badan Bahasa terus meningkat setiap tahun. Meskipun pada tahun 2021 dan 2022 berpredikat sama (berpredikat A), nilai Badan Bahasa meningkat dari 82,66 menjadi 90.

Peningkatan predikat SAKIP Badan Bahasa juga diikuti oleh seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa memperoleh nilai SAKIP dengan predikat A. Jika disandingkan dengan nilai SAKIP Tahun 2021, masih terdapat 2 satker dengan predikat B, dan 17 satker dengan predikat BB, sedangkan hanya 14 satker dengan predikat A. Rincian nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja 34 satker di lingkungan Badan Bahasa pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26
Nilai SAKIP Seluruh Satker
di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No.	Nama Satker	2021		2022	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan	80,48	A	90,00	A
2	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	89,53	A	89,25	A
3	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	86,15	A	88,50	A
4	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	80,74	A	88,30	A
5	Balai Bahasa Provinsi Bali	87,27	A	88,05	A
6	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	74,57	BB	88,00	A
7	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	76,32	BB	87,45	A
8	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	82,85	A	87,10	A
9	Balai Bahasa Provinsi Aceh	71,97	BB	86,55	A
10	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	79,65	BB	85,15	A
11	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	72,19	BB	85,00	A

No.	Nama Satker	2021		2022	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
12	Balai Bahasa Provinsi Papua	66,44	B	85,00	A
13	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	86,77	A	84,90	A
14	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	75,58	BB	84,70	A
15	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	75,17	BB	84,70	A
16	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	74,41	BB	84,70	A
17	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	82,53	A	84,30	A
18	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	73,68	BB	84,25	A
19	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	81,60	A	84,10	A
20	Kantor Bahasa Provinsi Banten	83,25	A	84,10	A
21	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	82,98	A	83,20	A
22	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	72,33	BB	83,10	A
23	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	75,92	BB	82,90	A
24	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	80,83	A	82,75	A
25	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	77,93	BB	82,65	A
26	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	71,98	BB	82,60	A
27	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	82,91	A	82,60	A
28	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	72,91	BB	82,00	A
29	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	76,85	BB	81,90	A
30	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	74,84	BB	81,85	A
31	Balai Bahasa Provinsi Riau	80,42	A	81,70	A
32	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	72,77	BB	80,50	A
33	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	63,84	B	80,15	A



Gambar 30. Rapat Kerja II tahun 2022 yang dilaksanakan di Bandung dihadiri oleh seluruh kepala satker di lingkungan Badan Bahasa

Meskipun hampir seluruh satker mendapat predikat A, pada tahun 2022 Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa (Pustanda) tidak dinilai. Hal ini dikarenakan Pustanda baru berdiri pada bulan Februari 2022 dan dokumen data dukung SAKIP di tahun sebelumnya tidak ada sehingga Pustanda belum dapat dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dampak yang dapat dirasakan manfaatnya dari ketercapaian IKP ini adalah satker memiliki tata kelola dalam kinerja yang transparan, akuntabel, dan efisiensi serta efektif. Sehingga satker yang dinilai memiliki sistem yang akuntabel, transparan dan efisien yang baik, akan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja suatu lembaga.

Ketercapaian IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk memfasilitasi, mendampingi, dan mengordinasi seluruh satker untuk meningkatkan kinerja. Berikut ini kegiatan pendukung tercapainya IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berikut ini faktor keberhasilan pencapaian target Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1. Peran serta pimpinan dalam menghadapi mengimplementasikan SAKIP.
2. Pelatihan SAKIP bagi SDM yang menanganai SAKIP.
3. Pendampingan dari Tim Sekretariat Badan kepada seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa.
4. Koordinasi rutin dengan mitra terkait.



Gambar 31. Tahapan Pelaksanaan SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakin)

Lakin menjadi salah satu dokumen pendukung dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Badan Bahasa melaksanakan Penyusunan Lakin dibagi menjadi dua jenis kegiatan, yaitu penyusunan Lakin Eselon I dan Penyusunan Lakin Eselon II. Dalam hal penyusunan Lakin Satker di lingkungan Badan Bahasa, tim layanan evaluasi mengakomodasi dan melakukan sinkronisasi data capaian kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi anggaran di tahun berjalan seluruh indikator yang menjadi tujuan dan sasaran, baik di balai dan kantor, Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan Sekretariat Badan Bahasa.

a) Reviu dan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra)

Berikut proses pelaksanaan reviu dan evaluasi capaian Renstra yang dilaksanakan sepanjang tahun anggaran berjalan.



Gambar 32. Lini Masa Reviu Dan Evaluasi Renstra

Pada tahun 2022, Badan Bahasa telah melakukan reviu Renstra Tahun 2020—2021 dan melakukan reviu capaian Renstra Revisi Tahun 2022 pada bulan Juni. Seluruh capaian indikator di satker dikompilasi sehingga dapat terlihat progres capaian indikator Badan Bahasa di triwulan II.

b) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sekretariat Badan Bahasa melalui tim layanan evaluasi melakukan upaya pemantauan, inisiasi, dan evaluasi pengumpulan data dukung SAKIP satker di lingkungan Badan Bahasa. Upaya selanjutnya yang dilakukan dalam mencapai target indikator pada PK seluruh satker terkait nilai SAKIP adalah sinkronisasi dokumen data dukung di lingkungan Badan Bahasa melibatkan pihak ketiga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, dan penilaian mandiri SAKIP Tahun 2022 oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kemendikbudristek. Setelah seluruh proses pendampingan, sampai pada penilaian akhir dengan Tim Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang dilaksanakan pada tanggal 4—7 November 2022.



Gambar 33. Dokumentasi Penilaian Akhir SAKIP dengan Tim Inspektorat Jenderal

Pendampingan secara langsung juga telah dilakukan di bulan September ke sembilan balai dan kantor, yaitu.



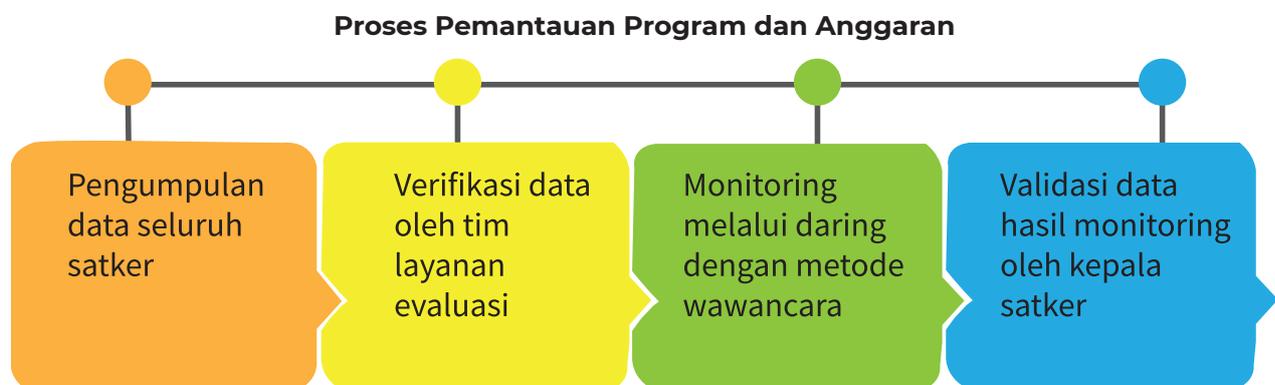
Gambar 34. Jadwal Pelaksanaan Pendampingan SAKIP di Balai dan Kantor

Berikut ini adalah tahapan pendampingan SAKIP di lingkungan Badan Bahasa di tahun 2022.



Gambar 35. Lini masa Tahapan Pendampingan SAKIP Tahun 2022

c) Pemantauan Pelaksanaan Program dan Anggaran



Gambar 36. Proses Pemantauan Program dan Anggaran

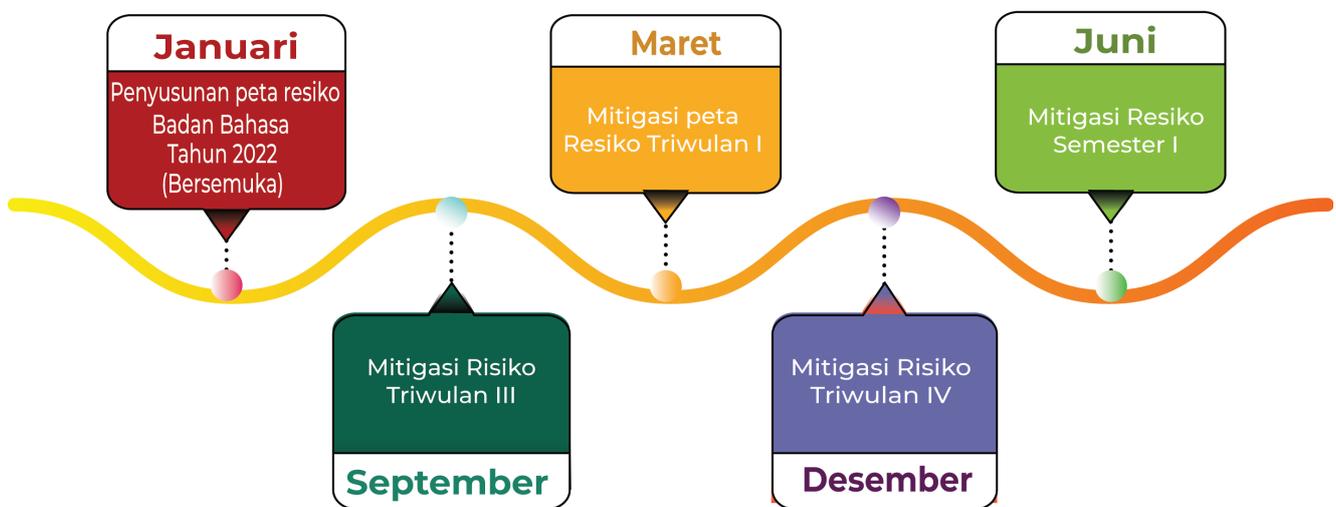
Badan Bahasa melaksanakan pemantauan secara daring setiap bulan melalui format pengukuran kinerja per indikator, per komponen, sampai dengan per belanja.

Pemantauan dilakukan untuk terus memantau perkembangan capaian kinerja dan penyerapan anggaran seluruh satker. Selain itu, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi serta mencari langkah antisipasi untuk memaksimalkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran.

d) Penyusunan dan Pendampingan Peta Risiko dan Mitigasi Risiko

Kegiatan dilaksanakan agar risiko kegiatan dapat mengalami perubahan seiring dengan lingkungan internal maupun eksternal yang selalu berubah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian risiko (mitigasi risiko) untuk setiap tingkatan, baik tingkat unit kerja maupun kegiatan. Format penyampaian mitigasi risiko dilaksanakan setiap triwulan dengan metode pengumpulan data secara daring.

Lini masa Pelaksanaan Manajemen Risiko



Gambar 37. Lini masa Pelaksanaan Manajemen Risiko

e) Optimalisasi Nilai Kinerja Anggaran

Dalam perhitungan Nilai Kinerja Anggaran, nilai EKA didukung oleh layanan evaluasi memiliki dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan bobot 40%, yang didukung oleh layanan Laporan Keuangan dan Perbendaharaan. Pemantauan yang dilakukan adalah dengan metode daring setiap bulan melalui instrumen pengukuran kinerja yang harus dilaporkan terkait progres, kendala, dan strategi seluruh indikator sampai aktivitas/kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan anggaran. Output dari kegiatan ini adalah tercapainya target NKA sesuai dengan PK yaitu minimal 91 di seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa.



Gambar 38. Dokumentasi Pendampingan NKA melalui Daring

Tabel 27
Kendala, Strategi, dan Langkah Antisipasi
IKP Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi
1. Pelaksanaan program dan anggaran yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan	Melakukan pemantauan secara daring dengan satker terkait dengan kesesuaian pelaksanaan jadwal yang telah direncanakan setiap bulan.	Fokus mendampingi satker terhadap hasil NKA tahun 2022 yang masih dibawah target Perjanjian Kinerja, yaitu 91.
2. Penetapan rencana penarikan dana belum sesuai dengan rencana aksi yang diatur dalam PerdirjenPB Nomor 5 Tahun 2021	Revisi lembar III DIPA	Menyusun rencana penyerapan dana yang sesuai dengan PerdirjenPB Nomor 5

Sasaran Program 5: Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek

Pelaksanaan ZI-WBK/WBBM atau pembangunan Zona Integritas berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Indikator ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola manajemen yang baik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Dampak Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek:

1. Meningkatkan pola pikir dan budaya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola yang efisien, efektif, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kualitas layanan publik.

Indikator Kinerja Program 5.1: Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Bahasa yang terdiri dari Pusat, Sekretariat Badan Bahasa, dan UPT. Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah satker yang memenuhi 6 komponen, di antaranya manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik. Dasar Hukum PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

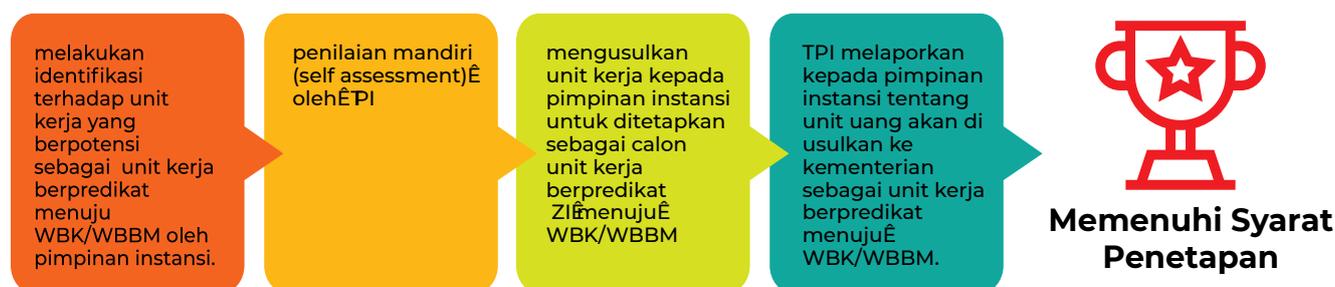
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM adalah jumlah satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Badan Bahasa melalui Sekretariat Badan Bahasa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi, telah melakukan seleksi terhadap 33 satuan kerja yang ada. Sesuai dengan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021 minimal persyaratan unit kerja/satuan kerja yang dicalonkan menjadi satuan kerja berpredikat ZI-WBK adalah

1. merupakan *core* layanan utama dari instansinya;
2. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
3. memiliki persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%;
4. melaporkan nilai LHKPN dan LHKASN 100%; dan
5. memiliki nilai minimal SAKIP B.

Berdasarkan kriteria tersebut, Badan Bahasa memiliki satu satuan kerja calon ZI-WBBM yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, serta delapan satuan kerja calon ZI-WBK/WBBM yaitu: 1) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 2) Balai Bahasa Provinsi D.I Yogyakarta, 3) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 4) Balai Bahasa Provinsi Bali, 5) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, 6) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, 7) Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan 8) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk kemudian diusulkan ke pada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Instansi (TPI) di lingkungan Kemendikbudristek dengan surat Nomor 0913/11/OT.01.03/2022 tanggal 25 maret 2022.

Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Badan Bahasa adalah melakukan pendampingan persiapan penilaian kepada sembilan satuan kerja calon ZI-WBK. Pendampingan dilakukan oleh tim RBI dan Asesor Badan Bahasa pada bulan April—Mei dengan tujuan untuk mereviu kembali data dukung, sarana dan prasarana serta kampanye publik terkait ZI-WBK pada tiap satuan kerja. Pada dasarnya setiap satuan kerja telah melaksanakan enam area perubahan, tetapi belum terdomentasikan dan di evaluasi secara berkala. Pada tahun 2022, KemenpanRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), terdapat mekanisme baru yaitu pembatasan pengusulan dari tiap Kementerian/Lembaga, untuk Kemendikbudristek pada Tahun 2022 maksimal dapat mengajukan 15 satuan kerja. Berdasarkan penilaian oleh TPI, dari sembilan satuan kerja yang diusulkan menjadi satker ZI-WBK/WBBM terdapat tujuh satker yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan penilaian pada tahap selanjutnya, hanya saja dikarenakan adanya perubahan pembatasan satuan kerja akan disaring kembali menjadi tiga sampai empat satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan mekanisme yang ditentukan di Kemendikbudristek. Berikut alur proses pengusulan satker untuk memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM.



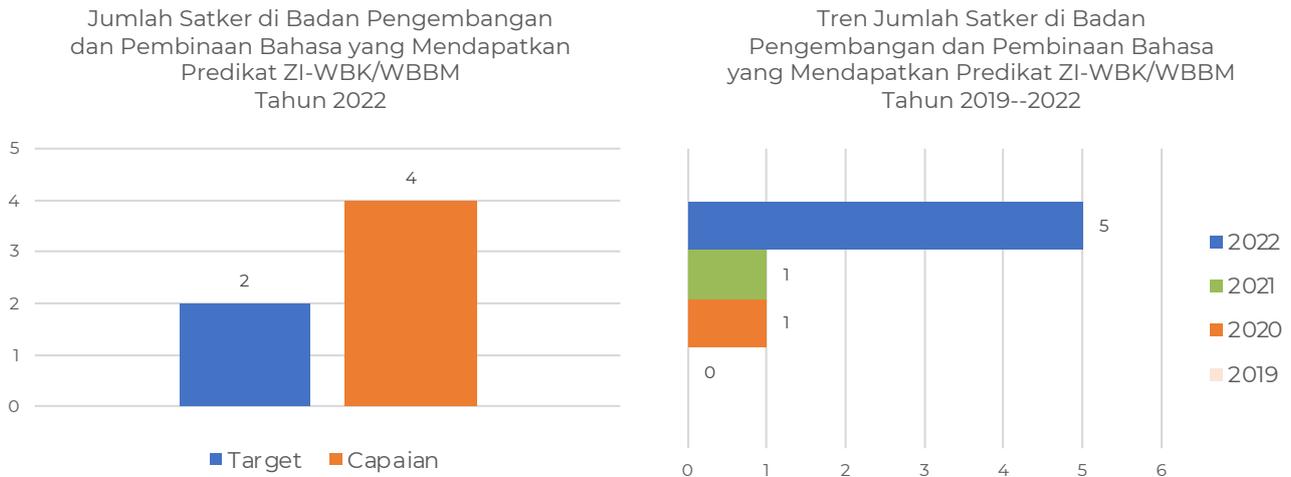
Gambar 39. Mekanisme Penilaian ZI-WBK/WBBM Satker Tahun 2022

Pada penetapan satker yang memperoleh predikat ZI-WBK/WBBM, empat satker Badan Bahasa, yaitu 1) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 2) Balai Bahasa Provinsi Bali, 3) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, dan 4) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditetapkan sebagai satker yang memperoleh predikat ZI-WBK. Dengan demikian, target Badan Bahasa pada IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM yang ditargetkan 2 telah tercapai 4 (200%). Berikut rincian target, capaian, dan sandingan dengan capaian tahun sebelumnya serta target yang akan dicapai sampai dengan akhir renstra pada tahun 2024.

Tabel 28
Target dan Realisasi IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Angka Dasar	2021	Tahun 2022			Target Renstra 2024		
				Target	Realisasi	%			
5	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	5.1	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	1	0	2	4	200	5

Grafik 7 Capaian IKP Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM



Program/Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Satker di Badan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Berikut kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa pada tahun 2022.

kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan di UPT dan pusat

dilaksanakan dengan maksud meminimalisir permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan para pengelola keuangan satuan kerja memiliki persepsi yang sama dalam memahami peraturan terkait pengelolaan keuangan.



Kegiatan kordinasi pelaksanaan anggaran dengan pihak eksternal

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar tugas dan fungsi dalam pengelolaan perbendaharaan dan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait aturan keuangan terkini



Kegiatan kordinasi fasilitas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjangring informasi dan permasalahan pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan Badan bahasa serta pemahaman yang sama terkait pengelolaan keuangan.



a) Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT dan Pusat

Kegiatan ini dilakukan untuk meminimalisir temuan atas audit operasional yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan dilaksanakan sampai dengan semester satu tahun anggaran 2022 di tujuh Balai/Kantor Bahasa. Pada semester dua dilakukan perubahan target pendampingan pengelolaan keuangan dialihkan pada dua belas Balai/Kantor Bahasa penerima tambahan dana BUN untuk mendukung kegiatan Revitalisasi Bahasa dan sastra daerah. Kedua belas satuan kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 29
Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT

Semester I		Semester II	
BBP D.I. Yogyakarta	BBP Sumatera Barat	BBP Jawa Barat	BBP Jawa Tengah
BBP Sumatera Selatan	BBP Kalimantan Tengah	BBP Sulawesi Selatan	BBP Bali
BBP Jawa Tengah	KBP Banten	KBP NTB	BBP Kalimantan Tengah
BBP Sulawesi Utara		BBP Papua	KBP Kalimantan Timur
		KBP Maluku	KBP Maluku Utara
		Sumatera Utara	NTT



Gambar 40. Pendampingan Pengelolaan Keuangan di KBP NTT dan BBP Papua

b) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dengan Pihak Eksternal

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan memperlancar tugas dan fungsi dalam pengelolaan perbendaharaan dan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait aturan keuangan terkini. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan peserta maupun nara sumber dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat-pusat, Balai Bahasa/Kantor Bahasa, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta 3, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pulogadung, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Direktorat Sistem Perbendaharaan (DSP).



Gambar 41. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan

Narasumber terkait diharapkan dapat memberikan informasi perkembangan aturan-aturan atau kaidah yang berlaku yang terkait antara lain tentang mekanisme

pengelolaan anggaran, pajak, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan keuangan sehingga tercipta harmonisasi yang baik dalam rangka pengelolaan pelaksanaan pencairan anggaran.

Kegiatan ini dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Februari, Agustus, dan Desember Tujuan kegiatan ini untuk memberikan kesamaan pemahaman dan penafsiran sehingga pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran dapat berjalan dengan lancar.

c) Kegiatan Koordinasi Fasilitas Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan



Gambar 42. Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjaring informasi dan permasalahan Pengelolaan keuangan satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta pemahaman yang sama terkait pengelolaan keuangan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta tatap muka dari pengelola keuangan Sekretariat Badan Bahasa, Pusat Pembinaan Bahasa, dan Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa, serta 30 peserta dari Balai/Kantor Bahasa yang mengikuti kegiatan melalui line zoom, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan serta unit-unit terkait.

Tabel 30
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM

Kendala/Hambatan	Strategi	Langkah Antisipasi
1. TUP tidak terpakai habis dan dikembalikan tidak tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> Menginformasikan kepada para pelaksana kegiatan agar melaksanakan kegiatan sesuai rencana pengajuan TUP Adanya lembar permohonan TUP dari masing masing penanggungjawab minimal 2 minggu sebelum pengajuan TUP 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi antara PPK, Bendahara dengan pelaksana kegiatan tentang dokumen SPJ yang akan diajukan Pengembalian sisa dana TUP tidak dilakukan di hari terakhir batas pengajuan SPJ PTUP Penerbitan dan penguploadan SPM tidak dilakukan di hari terakhir batas pengajuan SPJ PTUP Adanya aplikasi yang dapat menerima kiriman data dari pegawai yang melakukan perjalanan dinas di manapun sehingga bendahara dapat memproses data tersebut
2. Penyerapan anggaran di bawah persentase yang tertuang dalam Rencana Penarikan Dana (RPD).	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi penyerapan anggaran setiap Monitoring prognosis yang telah disusun. Membuat jadwal kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh kemenkeu Memanfaatkan POS 	<ol style="list-style-type: none"> Membuat jadwal kegiatan sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh Konsisten terhadap jadwal yang sudah dibuat melakukan rapat rutin perbulan tentang rencana dan penyerapan anggaran
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan identifikasi kegiatan atau belanja yang dapat dilaksanakan dan yang sulit dilaksanakan Meningkatkan disiplin dalam hal melengkapi dokumen pertanggungjawaban Memastikan pengajuan Tambahan Uang Persediaan telah memperhatikan kebutuhan riil secara akurat Memastikan kesesuaian Capaian Output dengan Target dan Ketepatan serta Pengiriman 	<ol style="list-style-type: none"> Para Pengelola Keuangan dan Penanggung Jawab kegiatan berkoordinasi dalam hal identifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan serta segera melengkapi berkas pertanggungjawaban untuk kegiatan yang telah terlaksana Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengajuan TUP yang sudah diproses Capaian Output harus segera dikirim dalam kesempatan pertama atau di awal bulan serta memastikan tidak ada GAP yang melebihi 20% persen antara Realisasi Anggaran dan Realisasi Fisik

B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

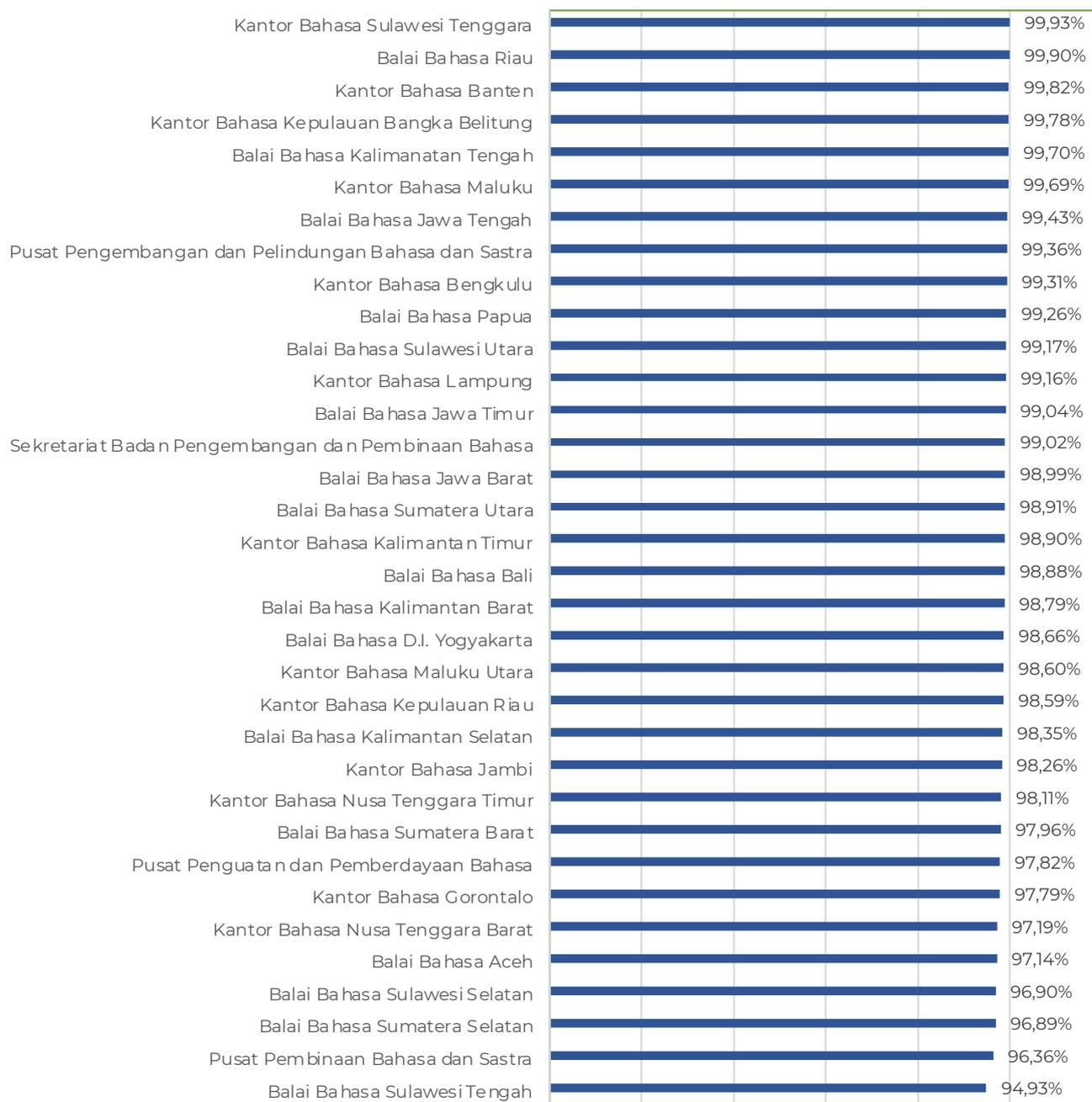
1. Realisasi Anggaran Per Satker

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada Tahun Anggaran 2022 memperoleh pagu anggaran sebesar **Rp517.468.963.000,00**. Anggaran tersebut didistribusikan ke seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Berikut rincian realisasi per satker.

Tabel 31
Realisasi Anggaran Per Satker

No	Satuan Kerja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Pusat		316.946.279.000	309.168.329.490	7.777.949.510	97,55%
1	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	18.061.997.000	17.946.199.987	115.797.013	99,36%
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	104.522.809.000	103.495.822.874	1.026.986.126	99,02%
3	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	29.655.912.000	29.008.290.160	647.621.840	97,82%
4	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	164.705.561.000	158.718.016.469	5.987.544.531	96,36%
30 UPT (Balai/Kantor Bahasa)		200.522.684.000	197.592.909.045	2.929.774.955	98,54%
1	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara	5.348.594.000	5.344.684.596	3.909.404	99,93%
2	Balai Bahasa Riau	6.738.968.000	6.732.293.158	6.674.842	99,90%
3	Kantor Bahasa Banten	4.483.730.000	4.475.793.262	7.936.738	99,82%
4	Kantor Bahasa Kepulauan Bangka Belitung	3.304.250.000	3.297.034.232	7.215.768	99,78%
5	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	9.289.068.000	9.260.747.727	28.320.273	99,70%
6	Kantor Bahasa Maluku	8.462.557.000	8.436.160.884	26.396.116	99,69%
7	Balai Bahasa Jawa Tengah	9.408.524.000	9.354.447.108	54.076.892	99,43%
8	Kantor Bahasa Bengkulu	3.213.020.000	3.190.986.310	22.033.690	99,31%
9	Balai Bahasa Papua	9.046.031.000	8.979.462.262	66.568.738	99,26%
10	Balai Bahasa Sulawesi Utara	4.261.594.000	4.226.202.529	35.391.471	99,17%
11	Kantor Bahasa Lampung	5.823.740.000	5.774.568.472	49.171.528	99,16%
12	Balai Bahasa Jawa Timur	6.784.905.000	6.719.859.564	65.045.436	99,04%
13	Balai Bahasa Jawa Barat	9.821.250.000	9.722.083.088	99.166.912	98,99%
14	Balai Bahasa Sumatera Utara	8.494.196.000	8.401.824.416	92.371.584	98,91%
15	Kantor Bahasa Kalimantan Timur	7.081.749.000	7.003.678.737	78.070.263	98,90%
16	Balai Bahasa Bali	8.746.837.000	8.648.881.346	97.955.654	98,88%
17	Balai Bahasa Kalimantan Barat	5.064.128.000	5.002.615.710	61.512.290	98,79%
18	Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	6.548.267.000	6.460.310.920	87.956.080	98,66%
19	Kantor Bahasa Maluku Utara	6.478.419.000	6.387.568.540	90.850.460	98,60%
20	Kantor Bahasa Kepulauan Riau	4.102.282.000	4.044.550.119	57.731.881	98,59%
21	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	5.630.563.000	5.537.924.432	92.638.568	98,35%
22	Kantor Bahasa Jambi	5.897.510.000	5.794.721.125	102.788.875	98,26%
23	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur	6.161.939.000	6.045.701.027	116.237.973	98,11%
24	Balai Bahasa Sumatera Barat	5.859.316.000	5.740.060.189	119.255.811	97,96%
25	Kantor Bahasa Gorontalo	5.247.679.000	5.131.772.589	115.906.411	97,79%
26	Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat	8.858.070.000	8.608.827.010	249.242.990	97,19%
27	Balai Bahasa Aceh	6.344.022.000	6.162.490.913	181.531.087	97,14%
28	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	9.833.306.000	9.528.521.947	304.784.053	96,90%
29	Balai Bahasa Sumatera Selatan	5.658.145.000	5.481.909.600	176.235.400	96,89%
30	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	8.530.025.000	8.097.227.233	432.797.767	94,93%
Total		517.468.963.000	506.761.238.535	10.707.724.465	97,93%

Grafik 8
Realisasi Anggaran Per Satker



2. Realisasi Per Belanja

Berikut ini rincian realisasi per belanja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022.

Tabel 32
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran (Rp)
Barang	366.079.589.000	357.669.772.636	97,70%	8.409.816.364
Modal	8.075.645.000	7.917.950.756	98,05%	157.694.244
Pegawai	143.313.729.000	141.173.515.143	98,51%	2.140.213.857
<i>Total</i>	517.468.963.000	506.761.238.535	97,93%	10.707.724.465

3. Realisasi Per Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Berikut ini realisasi per klasifikasi rincian output (KRO) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022.

Tabel 33
Realisasi Anggaran Per Klasifikasi Rincian Output (KRO)

KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa (Rp)
[2020] Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	244.889.426.000	240.936.339.910	98,39%	3.953.086.090
[EBA.962] Layanan Umum	45.335.369.000	44.362.195.917	97,85%	973.173.083
[EBA.994] Layanan Perkantoran	191.478.412.000	188.656.193.237	98,53%	2.822.218.763
[EBB.951] Layanan Sarana Internal	2.724.230.000	2.690.605.250	98,77%	33.624.750
[EBB.971] Layanan Prasarana Internal	5.351.415.000	5.227.345.506	97,68%	124.069.494
[2021] Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	48.210.710.000	47.906.440.918	99,37%	304.269.082
[DDA.001] Produk Kodifikasi Bahasa	6.525.682.000	6.478.590.500	99,28%	47.091.500
[DDA.002] Produk Pengembangan Sastra	3.964.050.000	3.922.510.784	98,95%	41.539.216
[DDC.001] Model Pelindungan Bahasa	1.102.465.000	1.094.833.651	99,31%	7.631.349
[DDC.002] Model Pelindungan Sastra	671.667.000	662.407.584	98,62%	9.259.416
[QDC.001] Partisipan pelindungan bahasa	31.904.131.000	31.750.208.119	99,52%	153.922.881
[QDC.002] partisipan pelindungan sastra	4.042.715.000	3.997.890.280	98,89%	44.824.720
[2022] Pembinaan Bahasa dan Sastra	193.238.610.000	187.294.285.087	96,92%	5.944.324.913
[BDB.001] Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	8.129.872.000	7.948.394.299	97,77%	181.477.701
[BDB.002] Komunitas Penggerak Literasi Terbina	6.437.341.000	6.394.826.473	99,34%	42.514.527
[DDA.003] Produk pengayaan pendukung literasi	133.383.833.000	132.598.307.462	99,41%	785.525.538
[QDC.001] Penutur bahasa terbina	10.391.150.000	10.120.466.612	97,40%	270.683.388
[QDC.002] Penutur bahasa teruji	5.740.112.000	5.109.797.251	89,02%	630.314.749
[QDC.003] Generasi muda terbina program literasi	29.156.302.000	25.122.492.990	86,16%	4.033.809.010
[6702] Penguatan Diplomas Kebahasaan	31.130.217.000	30.624.172.620	98,37%	506.044.380
[DDA.001] Produk Penerjemahan	17.147.858.000	16.942.660.057	98,80%	205.197.943
[QDB.001] Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	13.982.359.000	13.681.512.563	97,85%	300.846.437
Total	517.468.963.000	506.761.238.535	97,93%	10.707.724.465

4. Realisasi Per Sasaran Program

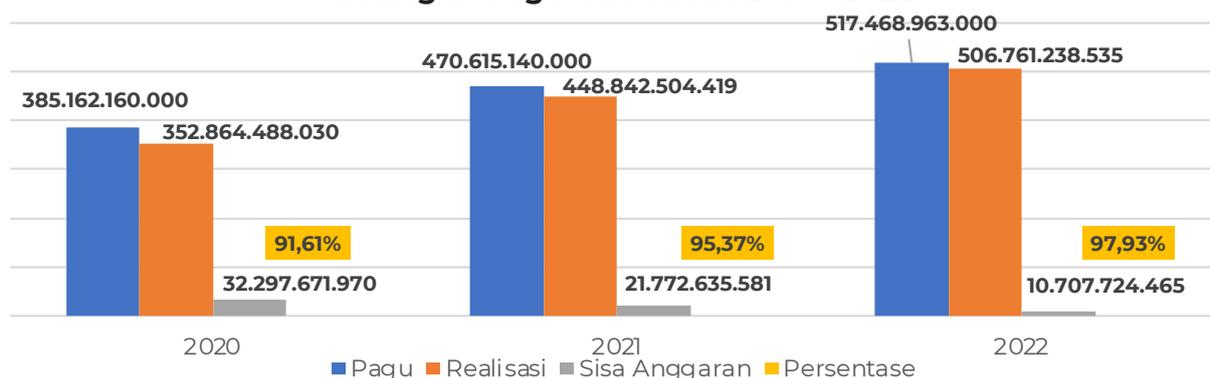
Berikut ini realisasi per sasaran program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022.

Tabel 34
Realisasi Per Sasaran Program

Sasaran Program	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa (Rp)
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	178.671.397.000	172.951.064.315	96,80%	5.735.436.335
	[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	14.567.213.000	14.343.220.772	98,46%	236.544.128
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	48.210.710.000	47.906.440.918	99,37%	340.501.732
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	31.130.217.000	30.624.172.620	98,37%	506.069.380
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	236.813.781.000	233.018.389.154	98,40%	3.866.234.584
[SP 5] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	8.075.645.000	7.917.950.756	98,05%	157.694.244
TOTAL		17.468.963.000	506.761.238.535	97,93%	10.707.724.465

5. Sandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020—2022

Grafik 9
Sandingan Pagu dan Tahun 2019—2022



6. Efisiensi Anggaran

Perjanjian kinerja yang ditandatangani Kepala Badan pada tanggal 30 Maret 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memperoleh anggaran sebesar **Rp403.348.485.000,00**. Anggaran tersebut enam kali direvisi dan direalokasi (*refocusing*) untuk program-program yang perlu dioptimalisasi, yaitu

- penambahan anggaran untuk literasi melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga;
- penambahan BA BUN untuk Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) dan pengalihan anggaran ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- pengalihan sisa blokir *automatic adjustment* (AA) ke BA BUN;
- pengembalian gaji pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang pindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengembalian blokir AA beberapa satker; dan
- pengembalian sisa anggaran pencetakan buku BA BUN literasi.

Optimalisasi anggaran tersebut tidak mengubah target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan semua target dapat tercapai dengan baik. Selain itu, optimalisasi yang dilakukan Badan Bahasa telah dinformasikan dalam revisi perjanjian kinerja tahun 2022, anggaran Badan Bahasa yang semula **Rp403.348.485.000,00** menjadi **Rp517.468.963.000,00**. Revisi pagu tersebut telah tercatat dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 29 Desember 2022.

Meskipun anggaran Badan Bahasa direvisi, capaian lima sasaran program dengan enam indikator kinerja program seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, optimalisasi anggaran yang dilakukan Badan Bahasa sangat efektif dilakukan sehingga seluruh capaian kinerja dapat tercapai dan melebihi target yang telah ditetapkan dan mampu menyerap sebesar **Rp506.761.238.535,00** atau **97,93%** dari pagu anggaran **Rp517.468.963.000,00**. Capaian kinerja dan realisasi anggaran Badan Bahasa dapat dilihat pada tabel capaian perjanjian kinerja berikut.

Tabel 35
Capaian Perjanjian Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	66	68,01	178.671.397.000	172.951.064.315
	[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	59,93	60	14.567.213.000	14.343.220.772
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	48	52	48.210.710.000	47.906.440.918

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	[[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	18.73	22,51	31.130.217.000	30.624.172.620
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	236.813.781.000	233.018.389.154
[SP 5] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[[IKP 5.1] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2	4	8.075.645.000	7.917.950.756

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Pencapaian Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilakukan melalui berbagai inovasi layanan di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inovasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kecepatan layanan dengan mengoptimalkan teknologi dan informasi. Berikut ini beberapa inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (secara lengkap dapat dilihat pada lampiran).

Pendekatan Baru dalam Revitalisasi Bahasa Daerah

Merdeka Belajar Episode #17 : Revitalisasi Bahasa Daerah

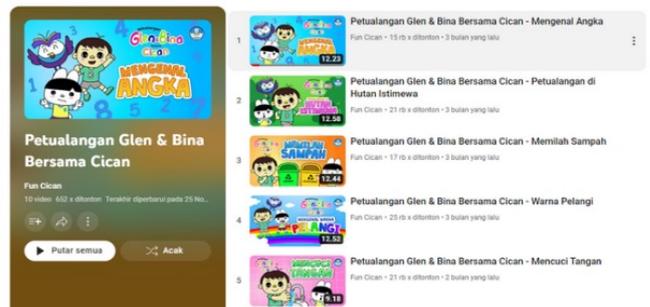




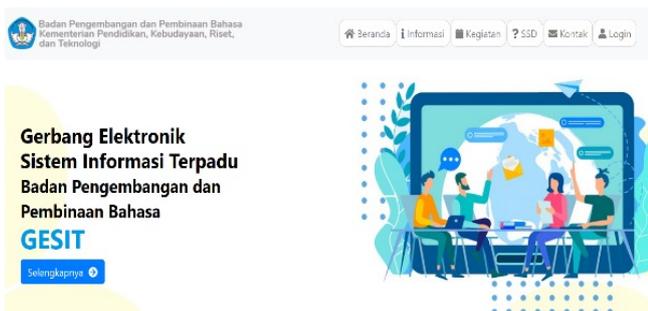
- Bekerja sama dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek
- Pelibatan Asosiasi Industri Animasi Indonesia (Ainaki), Asosiasi Program Studi Perguruan Tinggi, 86 dosen/guru, 203 mahasiswa, 290 siswa SMK
- Rencana tayang: RCTI Plus, Indonesiana TV, layar informasi di bandara dan stasiun KA



Inovasi Laman Buku Digital



Inovasi Video Pembelajaran



Inovasi Laman Gesit



Inovasi Laman Penjaring

2. Penghargaan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2022 telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kinerja. Kinerja yang diperoleh selain dalam upaya mencapai target seluruh sasaran program, juga dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, pendampingan hukum, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, peningkatan akses pendidikan, dan melakukan penguatan penggunaan bahasa Indonesia. Upaya itu mendapat apresiasi besar dari berbagai pihak dalam bentuk penghargaan. Berikut ini beberapa penghargaan yang diperoleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2022 (secara lengkap dapat dilihat pada lampiran).



Gambar 43. Penghargaan dari KBRI Helsinki (Finlandia dan Etonia) atas dukungan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) secara daring.



Gambar 44. Penghargaan dari KBRI Bern (Swiss dan Liechtenstein) atas kerja sama dan kolaborasi dalam pengembangan pengajaran bahasa Indonesia di Swiss dan Liechtenstein.



Program Merdeka Belajar Episode Ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah Meraih Penghargaan Kategori Kebijakan Sosial

IDEAS yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA memberikan penghargaan kepada organisasi, korporasi, atau individu yang memiliki praktik baik dalam kebijakan yang mengutamakan keragaman, kesetaraan, dan inklusi (*diversity, equity, and inclusion (DEI)*), serta lingkungan, sosial, dan pemerintahan (*environmental, social, and governance (ESG)*).

"...kriteria utama dalam meraih penghargaan kategori kebijakan sosial adalah adanya strategi komunikasi yang sistematis dan terukur, karena program yang dijalankan berhubungan dengan masyarakat luas"

HUMAS Indonesia



Gambar 45. Penghargaan IDEAS 2022 Kategori Kebijakan Isu Sosial melalui Program Komunikasi Revitalisasi Bahasa Daerah dari Humas Indonesia diterima langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bahasa (Badan Bahasa), E. Aminudin Aziz, pada Jumat, 5 Agustus 2022 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

3. Program Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi (*Collaborative and Crosscutting Program*)

Salah satu manfaat dari program kolaborasi dan integrasi lintas fungsi ini adalah berbagi peran dan sumber daya sehingga program atau kegiatan antarlembaga (pemerintah dan nonpemerintah) yang memiliki fungsi berbeda (lintas fungsi) dapat dikerjakan bersama, tidak tumpang tindih, dan mendukung efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam upaya mewujudkan salah satu program Kemendikbudristek, yaitu pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, Badan Bahasa berupaya melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi pada tiga fokus utama yang juga menjadi program prioritas Badan Bahasa, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah,
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.

Selain itu, untuk menunjang tercapainya tiga fokus tersebut, Badan Bahasa terkait dukungan manajemen juga melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi dengan berbagai lembaga.

Berikut ini pemetaan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi berdasarkan tiga fokus utama Badan Bahasa.

3.1 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Penguatan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Tabel 36
Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
Literasi Kebahasaan dan Kesastraan

Fokus Utama	Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	<p>Badan Bahasa melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi terkait literasi, tidak hanya internal Kemdikbudristek, tetapi juga dengan beberapa kementerian, antara lain Kemenko PMK, Kemenag, Perpustakaan Nasional. Bentuk kolaborasi dan integrasi yang dihasilkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usulan peraturan presiden tentang pembudayaan literasi; • Program Gerakan Literasi Nasional (GLN), kebijakan pengadaan buku penguatan literasi di daerah 3T; • Gerakan Literasi Sekolah dengan fasilitasi pemerintah daerah melalui infrastruktur dan program penguatan sumber daya manusia; • Inisiasi Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah (program pojok baca); • TBM pada Ditjen Paud Dasmeng; • Dana Desa pada Kemendes untuk mendukung aktivitas peningkatan literasi di desa; • BSKAP penilaian mutu buku sebelum dicetak, untuk menjamin hasil cetakan buku sesuai dengan standar ketentuan yang ada; • Direktorat PAUD untuk menyeleksi, mengkurasi buku yang sesuai minat anak PAUD melalui kajian dan FGD; • Direktorat SD untuk Penyediaan Modul-modul baca yang dikembangkan guru, sebagai buku pengayaan literasi; • Pusat Asesmen Pendidikan untuk mendukung sasaran satuan pendidikan yang prioritas untuk penerima buku, berdasarkan nilai asesmen nasional sekolah yang tingkat literasi rendah; • Diseminasi Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Pemangku Kepentingan; • Komunitas Literasi di seluruh Indonesia. <p>Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Badan Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat. Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaan lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.</p>



Gambar 46. Penandatanganan Komitmen Bersama untuk Memanfaatkan UKBI sebagai Instrumen Uji bagi Pegawai, Karyawan, Anggota Asosiasi, Mahasiswa, atau Pelajar di Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Jawa Barat

3.2 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Tabel 37
Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah

Fokus Utama	Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
<p>Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah</p>	<p>Badan Bahasa berupaya melaksanakan mandat pelindungan bahasa dan sastra diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 24 tahun 2009, UU Nomor 23 tahun 2014, PP Nomor 57 tahun 2014, Permendagri Nomor 40 tahun 2007, dan UU 23 tahun 2014. Mandat tersebut mendorong kolaborasi dan integrasi lintas fungsi harus diimplementasikan dalam bentuk pembagian kewenangan terkait pelindungan bahasa dan sastra daerah.</p> <p>Untuk megimplementasikan mandat itu, Badan Bahasa melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi sebagai upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah.</p> <p>Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi. Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan. Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.</p>

Fokus Utama	Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
	<p>Selain itu, Badan Bahasa juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi sebagai upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah. Berikut ini upaya yang dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkolaborasi dengan AINAKI (Asosiasi Industri Animasi Indonesia) untuk pembuatan 32 film animasi berdasarkan legenda dari 30 provinsi di Indonesia. • Berkolaborasi dengan dinas pendidikan untuk uji coba program Kamus Masuk Sekolah (KMS) • Berkolaborasi dengan Mitrasdudi di bawah Direktorat Vokasi, Kemendikbudristek, untuk membentuk tim produksi pembuatan produk pemodernan sastra. • Berkolaborasi dengan Asosiasi Program Studi Desain Komunikasi Visual (Asprodi DKV) untuk membentuk tim produksi pembuatan produk pemodernan sastra.



Siaran Pers

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor: 74 /sipers/A6/II/2022

Bangun Jembatan Lintas Generasi, Revitalisasi Bahasa Daerah Didorong Lewat Muatan Lokal di Sekolah

Jakarta, 22 Februari 2022 — Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Ketujuh Belas: Revitalisasi Bahasa Daerah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, mengungkapkan salah satu penyebab punahnya bahasa daerah adalah karena para penutur jadinya tidak lagi mewariskan Bahasa daerah ke generasi berikutnya.

"Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah, namun sayangnya banyak yang terancam punah. Penyebab utamanya adalah para penutur jadinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya pada generasi berikutnya," ungkap Menteri Nadiem pada kegiatan peluncuran Merdeka Belajar Episode Ketujuh Belas: Revitalisasi Bahasa Daerah secara daring, Selasa (22/2).

Oleh karenanya, salah satu strategi revitalisasi bahasa daerah adalah dengan mendorong satuan pendidikan memuat pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Hal ini juga perlu didorong oleh kebijakan pemerintah daerah masing-masing. Pada provinsi, kabupaten, serta kota yang memiliki bahasa daerah dominan seperti Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, kami berharap muatan lokal yang diwajibkan adalah pelajaran bahasa daerah. "Tetapi, wilayah-wilayah yang tidak punya bahasa daerah yang dominan, maka muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi, pilihannya benar-benar ada di masing-masing sekolah," kata Menteri Nadiem.

"Namun, wajib tidaknya bahasa daerah menjadi muatan lokal di sekolah, akan tergantung kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Kalau bukan kebebasan masing-masing daerah, berarti bukan Merdeka Belajar. Jadi tergantung," lanjut Mendikbudristek.

Hadinya program Revitalisasi Bahasa Daerah makin menggugah sekolah untuk bergerak mengembangkan pembelajaran bahasa daerah yang membangkitkan kreativitas peserta didik. "Saya juga berharap, sekolah-sekolah menggerakkan bahasa daerah bagi para pelajar dan membuat jembatan lintas generasi, kembali pada identitas kita dan merayakan kebinekaan," harap Menteri Nadiem.

Untuk melindungi penutur asli bahasa daerah, dijelaskan Menteri Nadiem, strategi terbaik adalah dengan memberi peluang seluas-luasnya pada semua penutur asli bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya. "Itulah mengapa kami mengembangkan tiga model revitalisasi yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Pertama, bagi bahasa daerah yang daya hidup bahasanya masih aman, kami melakukan pewarisan lewat pembelajaran di sekolah. Bagi bahasa daerah yang daya hidupnya tergolong rentan, walau jumlah penuturnya relatif banyak, kami gunakan model kedua, di mana kita fokus bukan hanya ke sekolah tapi juga komunitas-komunitas," jelasnya.

Model ketiga, lanjut Menteri Nadiem, di mana daya hidup bahasa daerah kategori ini mengalami kemunduran, terancam punah, dan kritis, Kemendikbudristek akan berfokus pada komunitas, masyarakat, dan melibatkan komunitas tutur, keluarga-keluarga, forum-forum, dan tempat-tempat ibadah yang dapat dimasukkan pembelajaran bahasa daerah.

"Mengapa bahasa daerah yang berkategori aman juga masuk revitalisasi? Karena kita tidak ada jaminan bahwa bahasa akan aman selama-lamanya. Bahkan, jumlah penuturnya selalu berkurang. Karena itulah pada 2022, kami menargetkan 38 bahasa sebagai obyek revitalisasi. Harapannya, penuturnya akan bertambah," disampaikan Menteri Nadiem.



Gambar 47. Para pemangku kebijakan menandatangani nota komitmen bersama dan rekomendasi terkait pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah di Maluku Utara

3.3 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Tabel 38
Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Fokus Utama	Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
Internasionalisasi Bahasa Indonesia	<p>Badan Bahasa berupaya mewujudkan upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan.</p> <p>Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.</p> <p>Upaya itu tidak akan terwujud tanpa kolaborasi dan integrasi lintas fungsi. Berikut bentuk kolaborasi dan integrasi lintas fungsi yang dilakukan dalam upaya internasionalisasi bahasa Indonesia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sebagai upaya diplomasi, Badan Bahasa berkolaborasi dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri (Kemenlu); • Kerja sama dengan penerbit dalam rangka penerjemahan buku dari luar negeri; • Berkolaborasi dengan Kemenlu dan UNESCO dalam penyusunan Peta Jalan Internasionalisasi Bahasa Indonesia; • Berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk melibatkan Diaspora dan Indonesiana; • Berkolaborasi dengan Biro PKLN melalui program Darmasiswa sebagai agen pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri; • Berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berupa pengelolaan jurnal publikasi ke-BIPA-an. • Berkolaborasi dengan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI berupa pelatihan pasukan Kontingen Garuda TNI.



JANTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA
Jakarta, 16 Agustus 2022

Nomor : B/ 117/ VIII/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran :
Perihal : Permohonan tenaga pengajar

Kepada
Yth: Ka PPBDS
Kemendikbud
di
Bogor

1. Dasar:
a. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1654/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang perintah merencanakan dan menyelenggarakan latihan pratugas operasi Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-I MINUSCA CAR TA 2022; dan
b. Perimbangan Pimpinan dan Staf Umum Kodam Jaya.

2. Sehubungan dasar di atas, dengan hormat diajukan permohonan bantuan tenaga pengajar bahasa Inggris dan bahasa Perancis dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (PPBDS) Kemendikbud untuk mendukung kegiatan latihan pratugas operasi Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-I MINUSCA CAR TA 2022, yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. tanggal : Minggu I s.d. II September 2022.
b. tempat : Aula PMPP TNI dan ruang kelas PPSDK, Sentul Bogor.

3. Dimohon konfirmasi melalui:
a. Mayor Czi Huzami Amin, Paslopiat Lat Pratugas Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-I MINUSCA CAR (081219788469), dan
b. Mayor Inf Samuel Edward Rampo Lolewen, Kaslops Lat Pratugas Satgas Kompi Zeni TNI Konga XXXVII-I MINUSCA CAR (081219788469).

4. Demikian mohon dimaklumi.



Tembusan:
1. Panglima TNI
2. Dan PMPP TNI
3. Kasdam Jaya
4. Dirbintal PMPP TNI
5. Dansatlat PMPP TNI

Gambar 48. Pelatihan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis untuk Pasukan Satgas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda XXXVII-MINUSCA CAR



Gambar 49. Kunjungan Kepala Badan Bahasa ke UNESCO, Jakarta, dalam rangka Melaporkan Hasil Karya Penerjemahan Antologi Cerita Anak Indonesia, pada tanggal 31 Januari 2023



Gambar 50. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan kunjungan kerja ke Université de La Rochelle (ULR) pada tanggal 14 Desember 2022

3.4 Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi Dukungan Manajemen

Selain tiga fokus utama, dalam menunjang tercapainya program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Badan Bahasa juga berupaya melakukan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi terkait dukungan manajemen. Berikut ini pemetaan kolaborasi dan integrasi lintas fungsi dukungan manajemen.

Tabel 39
Pemetaan Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
Dukungan Manajemen

Layanan	Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi
<p>Dukungan Manajemen</p>	<p>BBP Bahasa berupaya agar kolaborasi dan integrasi lintas fungsi menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan dukungan manajemen.</p> <p>Pelaksanaan kolaborasi terkait dengan penyusunan permendikbudristek tentang jabatan fungsional (jafung) Widyabahasa. Jabatan fungsional tersebut memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Pengusulan jabatan fungsional di bidang kebahasaan dan kesastraan ini diharapkan dapat memperkuat serta mengukuhkan fungsi kelembagaan Badan Bahasa beserta unit pelaksana teknis Balai/Kantor Bahasa. Pengusulan jafung ini juga dalam rangka melaksanakan salah satu program prioritas reformasi birokrasi pemerintahan, yakni meningkatkan profesionalisme, kompetensi serta karier aparatur sipil negara (ASN) secara sistematis, terus-menerus, dan berkelanjutan.</p> <p>Untuk itu, Badan Bahasa berkolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk turun berperan dalam penyusunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa.</p> <p>Selain Permenpan RB, Badan Bahasa juga berkolaborasi dalam penyusunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permendikbudristek tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa; • Permendikbudristek tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyabasa; • Standar Kompetensi JF Widyabasa, • Permendikbudristek Uji Kompetensi Widyabasa, • Permendikbudristek Kualitas Hasil Kerja; • Peraturan Presiden tentang Tunjangan Fungsional Jabatan Fungsional Widyabasa; <p>Dalam menyusun peraturan tersebut dengan melibatkan Biro Hukum Kemdikbudristek, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbudristek, Biro SDM Kemdikbudristek, KemenpanRB, BKN, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham.</p> <p>Selain itu, Badan Bahasa juga berkolaborasi ke Kementerian Hukum dan HAM untuk pengusulan Hak Cipta maupun Hak Merek.</p> <p>Badan Bahasa juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah kota, dan pemerintah daerah selama tahun 2022.</p>



Gambar 51. Hasil Kolaborasi dengan Biro Hukum Kemdikbudristek, Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemdikbudristek, Biro SDM Kemdikbudristek, KemenpanRB, BKN, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, dan Kemenkumham.

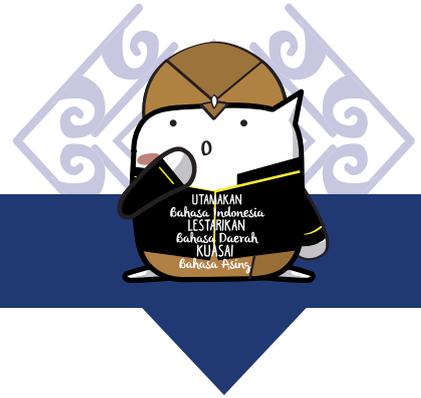
**PETA KERJA SAMA BADAN BAHASA DENGAN PERGURUAN TINGGI,
PEMKOT, DAN PEMDA JANUARI—DESEMBER 2022**



Gambar 52. Peta Kerja Sama tahun 2022

BAB IV

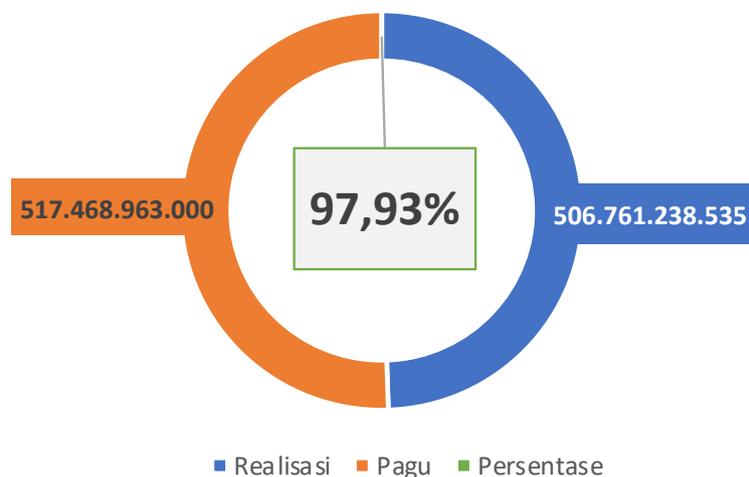
PENUTUP



Selama tahun 2022, Badan Bahasa berhasil mencapai target setiap indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Tabel 40
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SP 1] Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	[IKP 1.1] Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	66	68,01	103,04
	[IKP 1.2] Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	59,93	60	100,11
[SP 2] Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional	[SP 2] Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia	48	52	108,3
[SP 3] Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah	[IKP 3.1] Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya	18,73	22,51	120,2
[SP 4] Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A	A	100
[SP 5] Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM	2	4	200



Badan Bahasa untuk terus berupaya meningkatkan kinerja. Upaya tersebut tentu saja berjalan seiringan dengan upaya optimalisasi anggaran. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pengendalian penggunaan anggaran. Hasil upaya tersebut, pada tahun 2022, Badan Bahasa mampu menyerap anggaran 97,93%.

Selain capaian kinerja dalam perjanjian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022. Badan Bahasa juga telah melaksanakan program prioritas. Berikut ini capaian Prioritas Nasional.

Tabel 41
Rincian Output (RO) Prioritas

RO Prioritas		Satuan	Sasaran		
			Target	Realisasi	Persentase
1	Penutur Bahasa Terbina	Orang	8.641	11.645	134,76
2	Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	14.248	20.207	141,82
3	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	Lembaga	250	419	167,60
4	Penutur Bahasa Teruji	Orang	83.441	225.567	270,33
5	Partisipan Pelindungan Bahasa	Orang	4.518	5.057	111,93
6	Partisipan Pelindungan Sastra	Orang	730	1.030	141,10

Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi Badan Bahasa dalam pencapaian perjanjian kinerja.

1. Masih terdapat pelaksanaan kegiatan yang tidak selaras dengan pedoman/petunjuk teknis KKLP
2. Belum maksimalnya pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi untuk peningkatan capaian kinerja
3. Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia belum mengintegrasikan program di berbagai instansi secara optimal
4. Belum seluruh pegawai memahami SAKIP dengan baik dan benar
5. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pembangunan ZI-WBK masih perlu ditingkatkan

Kendala tersebut dapat teratasi dengan komitmen dan dukungan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seluruh kepala satker, dan staf untuk bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Bahasa. Selain itu, Badan Bahasa juga berupaya mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh satker agar terjalin dengan baik untuk mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi. Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Badan Bahasa untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah dicapai untuk perbaikan pada masa yang akan datang adalah sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kepada seluruh pegawai.
2. Menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara rutin, dilengkapi dengan rekomendasi dan rencana tindaklanjutnya.
3. Peta jalan penginternasionalan bahasa Indonesia yang mengintegrasikan program di berbagai instansi belum ada.
4. Peningkatan pelibatan seluruh pegawai dalam implementasi SAKIP.
5. Peningkatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai melalui pendampingan ke Satker bersama mitra kerja terkait.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja Triwulan IV
4. SK Tim Penyusun LAKIP
5. SK Tim Reviu LAKIP
6. Pernyataan Telah Direviu
7. Catatan Hasil Reviu Itjen Kemendikbudristek
8. Inovasi
9. Penghargaan
10. Lembar Hasil Evaluasi Kinerja
11. SK Penghargaan ZI-WBK
12. Judul Buku Bacaan Literasi

Perjanjian Kinerja Awal



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



Nadiem Anwar Makarim



E. Aminudin Aziz

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKP 1.1] Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	66
		[IKP 1.2] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	59.93
2	[SP 2] Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	[IKP 2.1] Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	48
3	[SP 3] Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	[IKP 3.1] Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	18.73
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 283.231.760.000
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 22.700.794.000
3	2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp. 62.214.674.000
4	6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	Rp. 35.201.257.000
		TOTAL	Rp. 403.348.485.000

Jakarta,30 Maret 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



Nadiem Anwar Makarim



E. Aminudin Aziz

Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim

Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,**



Nadiem Anwar Makarim



E. Aminudin Aziz

Target Kinerja

#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKP 1.1] Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	66
		[IKP 1.2] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	59.93
2	[SP 2] Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	[IKP 2.1] Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	48
3	[SP 3] Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	[IKP 3.1] Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	18.73
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	2

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 244.889.426.000
2	2021	Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Rp. 48.210.710.000
3	2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	Rp. 193.238.610.000
4	6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	Rp. 31.130.217.000
		TOTAL	Rp. 517.468.963.000

Jakarta, 29 Desember 2022

**Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,
Riset, dan Teknologi,**



Nadiem Anwar Makarim



E. Aminudin Aziz

Pengukuran Kinerja Triwulan IV



**Pengukuran Indikator Kinerja Program
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	-----------------	---------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKP 1.1] Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	%	66	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 66	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 57.8 TW4 : 68.006	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : IKP ini lebih dibuat spesifik dengan pengukuran Indeks Kemahiran Berbahasa (IKB) yang lebih mempertimbangkan standar kemahiran setiap profesi yang diuji sesuai dengan Permendikbud Nomor 70 tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Kendala / Permasalahan : Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan definisi operasional dari Renstra yang telah direvisi. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui aktivitas peningkatan kompetensi berbahasa dan apresiasi sastra.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Indikator kinerja yang mendukung program ini adalah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya, produk pengembangan bahasa dan sastra, bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat, penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan, dan komunitas penggerak literasi yang terbina. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai progres yaitu, pengujian UKBI Adaptif Merdeka, peningkatan kemahiran berbahasa, penyuluhan kebahasaan bagi Duta Bahasa, dan diseminasi nasional kemahiran berbahasa, yang dilakukan baik dengan metode daring maupun luring. Berikut bentuk-bentuk pembinaan kebahasaan dan kesastraan. Kendala / Permasalahan : 1. Minat peserta peningkatan kemahiran berbahasa melalui metode daring yang sudah melebihi dari target. 2. Di triwulan pertama, di beberapa daerah masih mengalami kendala izin ke satgas covid untuk melakukan kegiatan apresiasi sastra secara berseamuka. 3. Kegiatan pembinaan masyarakat dalam rangka Bulan Bahasa masih belum dapat direncanakan karena anggaran masih terblokir sebagian. 4. Dalam kegiatan pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka di daerah terdapat kendala jaringan internet yang kurang maksimal dan Beberapa peserta uji atau pemangku kepentingan pengguna layanan. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mengakomodasi peserta peningkatan kemahiran berbahasa dengan menambah kuota peserta melalui metode daring. 2. Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan di triwulan II dengan aturan pembatasan berkala yang mulai akan dilonggarkan. 3. Agar Kegiatan Pembinaan Masyarakat dalam rangka Bulan Bahasa dapat berjalan sesuai dengan rencana yaitu pada bulan Oktober, telah dilakukan upaya koordinasi antara pimpinan dan pihak-pihak terkait terutama tim penanggungjawab kegiatan dan tim perencanaan untuk mengajukan pembukaan blokir. 4. Kegiatan pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka di daerah dapat tetap berjalan dengan baik setelah tim kelompok kepakaran UKBI membuat fitur pendaftaran kolektif baik bagi peserta pelajar maupun PNPB dan membuat fitur layanan seri pelatihan untuk membantu peserta mempersiapkan diri sebelum UKBI.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kemajuan Kegiatan yang mendukung IKP tersebut adalah sebagai berikut 1. Peningkatan Kemahiran Berbahasa: Penyuluhan Kebahasaan bagi Duta Bahasa Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi Duta Bahasa sudah terlaksana pada 19--31 Maret. 2. Peningkatan Apresiasi Sastra: Festival Musikalisasi Puisi 1) Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Festival Digital Musikalisasi Puisi Tahun 2022 pada 29 Juli 2022 dan 1--3 Agustus 2022. 2) Festival Digital Musikalisasi Puisi Tahun 2022 tingkat DKI Jakarta pada 23 Agustus--13 September 2022. 3) Kegiatan Penjurian dan Rapat Pleno Musikalisasi Puisi tingkat DKI Jakarta dilaksanakan pada 20--23 September 2022 4) Kegiatan tingkat nasional menjadi bagian dari kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra 2022 dan dilaksanakan hingga 28 Oktober 2022. 3. Diseminasi Kepakaran Pembinaan Bahasa Direncanakan dilaksanakan pada November 2022. 4. Pembinaan Masyarakat dalam Rangka Bulan Bahasa Dilaksanakan pada September (persiapan) dan Oktober (penyelenggaraan). 5. Pembinaan Generasi Muda melalui Pemilihan Duta Bahasa Kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Tingkat DKI Jakarta dilaksanakan mulai bulan Mei sampai Agustus 2022. Pada 24 Mei 2022, sudah dilaksanakan rapat persiapan dan publikasi kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Tingkat DKI Jakarta telah dipublikasikan pada akhir Mei 2022. Pada bulan Juni, kegiatan Pemilihan Duta Bahasa Tingkat DKI Jakarta berfokus pada penjurian peserta. Pada bulan Juli, kegiatan berfokus pada seleksi wawancara dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif. Penyampaian materi Pemilihan Duta Bahasa Tingkat DKI Jakarta Tahun 2022 sudah dilaksanakan pada 19 dan 21 Agustus 2022 secara daring. Adapun penilaian Pemilihan Duta Bahasa Tingkat DKI Jakarta Tahun 2022 sudah dilaksanakan pada 20 Agustus 2022 secara daring dan 25--27 Agustus 2022 di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kendala / Permasalahan : Proses penghitungan ideal keseluruhan nilai pos tes dan pre tes peserta pembinaan bahasa Indonesia yang meningkat minimal 10%, baru dapat dihitung pada akhir proses kegiatan pembinaan di akhir tahun. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan penghitungan cepat peserta pembinaan bahasa Indonesia yang sudah mendapatkan pembinaan Bahasa Indonesia di bulan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK ini.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Capaian IKP Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya adalah 68,006% untuk Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra (Pusbin) dan 47,34% untuk rata-rata untuk pembinaan penutur bahasa yang dilakukan oleh Pusbin bersama Balai/kantor bahasa. Nilai ini diperoleh melalui pengukuran kenaikan kualitas yang dilakukan dengan mengadakan tes awal dan tes akhir pada peserta pembinaan bahasa. Materi tes awal dan tes akhir adalah materi yang diberikan oleh narasumber/pengajar saat pembinaan (penyuluhan, bimtek, dll.). Peserta dengan nilai tes akhir lebih tinggi daripada tes awal dengan minimal kenaikan 10% dianggap telah meningkat kualitas berbahasanya. Jika melihat dasar penentuan nilai ini, pada dasarnya pembinaan penutur bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa sudah mampu meningkatkan kualitas berbahasa Indonesia para penutur bahasa tersebut. Nilai persentase yang ditargetkan dalam Renstra Kemendikbud untuk tahun 2022 adalah 66%. Pada dasarnya tidak ada kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini. Pada satu sisi, selisih antara rerata capaian persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya dengan target renstra tersebut disebabkan oleh pembinaan yang dilakukan sudah memberikan peningkatan yang sangat besar, tetapi cukup berarti bagi peningkatan kualitas berbahasa penutur bahasa. Di sisi lain, selama ini penutur bahasa yang turut serta dalam berbagai kegiatan pembinaan tidak melakukannya dengan sangat sungguh-sungguh, sebagian turut serta karena penugasan dari kantor atau karena memenuhi undangan semata. Sehingga untuk memenuhi target pada Renstra Tahun 2022, capaian yang digunakan adalah hanya hasil penghitungan dari capaian Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Untuk penghitungan dari capaian Balai dan kantor akan disertakan di tahun 2023, dan akan dilakukan upaya konsolidasi, koordinasi, dan upaya pelaksanaan pembinaan di setiap satker agar memenuhi kriteria kenaikan 10% seperti yang terdapat pada definisi operasional Renstra. Kendala / Permasalahan : Proses penghitungan ideal keseluruhan nilai pos tes dan pre tes peserta pembinaan bahasa Indonesia yang meningkat minimal 10%, baru dapat dihitung pada akhir proses kegiatan pembinaan di akhir tahun. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan penghitungan cepat peserta pembinaan bahasa Indonesia yang sudah mendapatkan pembinaan Bahasa Indonesia di bulan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK ini.</p>
---	--	--	---	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

2	[SP 1] Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	[IKP 1.2] Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	%	59.93	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 59.93	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 59 TW4 : 60	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Sudah dilaksanakan kegiatan Audiensi dan Pengambilan Data di 16 Lembaga Pendidikan di DKI Jakarta, Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik ke Kanwil kemenag DKI Jakarta, dan tindak lanjut nota kesepakatan antara BPP Bahasa dengan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (untuk pembinaan lembaga pemerintah) dan Kanwil Kemenag (untuk pembinaan lembaga pendidikan MA dan MTs). Adapun kerja sama BPP Bahasa dengan Dinas Pariwisata DKI Jakarta (untuk pembinaan lembaga swasta) akan berjalan setelah penandatanganan nota kesepakatan antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Proses penyusunan dan tindak lanjut (reviu) nota kesepakatan antara BPP Bahasa dengan Sekretariat Daerah Provinsi DKI dan Kanwil Kemenag membutuhkan waktu. Pembinaan terhadap lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan MA/MTs belum dapat terlaksana sebelum penandatanganan nota tersebut dilakukan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : BPP Bahasa menjalin koordinasi yang intensif dengan instansi induk yang menaungi lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Progres pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sampai dengan triwulan II sebesar 79,4%. Capaian progres pelaksanaan indikator diperoleh dari kegiatan-kegiatan, yaitu. (1) pelayanan profesional ahli bahasa, (2) pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara (dalam ruang publik dan dokumen lembaga); (3) penyusunan bahan pembinaan lembaga; dan (4) diseminasi kepakaran pembinaan bahasa pada lembaga. Total lembaga yang telah dilakukan audiensi di balai/kantor sebanyak 27 lembaga oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dan 608 lembaga oleh balai/kantor.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Adanya perubahan juknis terbaru yang mengakibatkan perubahan target kinerja yang semula 34 lembaga menjadi 45 lembaga yang didapat dari komponen Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik, dimana sebelumnya 34 lembaga dapat diambil dari komponen pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik dan komponen Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum. 2. Masih adanya lembaga yang tidak berkenan dilakukan audiensi dalam rangka Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum maupun Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik. 3. Tidak semua lembaga yang menjadi objek pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia, tidak tersedia atau memiliki dokumen persuratan.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Menyesuaikan target kinerja yang baru sesuai juknis terbaru dengan memberikan catatan pada laporan kinerjanya dan merevisi target Perjanjian Kinerja pada akhir tahun anggaran 2022. 2. Berkoordinasi dengan tim dan pemerintah daerah setempat untuk mencari lembaga yang dapat dijadikan sasaran audiensi. 3. Mengajukan dan mengarahkan objek pengutamaan bahasa untuk mengadakan dokumen yang menjadi sasaran atau target analisis.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : a. Tahapan yang sudah dilaksanakan. DKI Jakarta 1. Kegiatan Audiensi dan Pengambilan Data di 16 Lembaga Pendidikan di DKI Jakarta sudah terlaksana 2. Audiensi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik ke Kanwil Kemenag DKI Jakarta sudah terlaksana 3. Rapat Pembahasan Kerja Sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah terlaksana 4. Audiensi Pengambilan Data di 11 Lembaga Pendidikan di DKI Jakarta sudah terlaksana 5. Sosialisasi Pembinaan Lembaga (untuk lembaga pendidikan di DKI Jakarta) secara daring sudah terlaksana Pusat dan Balai/Kantor Pelaksanaan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara secara nasional sudah sampai pada tahap pendampingan dengan sebagian ada pada tahap audiensi, penentuan lembaga, pengumpulan data, dan sosialisasi. Jumlah lembaga yang dibina adalah 1.482 lembaga. b. Tahapan yang akan dilaksanakan. 1. Memberikan pelayanan narasumber kebahasaan, penyuluh bahasa/sastra, penyunting bahasa, dan ahli bahasa ranah hukum secara profesional, khususnya untuk kepentingan secara nasional. Balai/Kantor 1. Melaksanakan kegiatan pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara; 2. Memberikan pelayanan narasumber kebahasaan, penyuluh bahasa/sastra, penyunting bahasa, dan ahli bahasa ranah hukum secara profesional, khususnya di tingkat daerah/provinsi.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Pelaksanaan koordinasi lanjutan dilaksanakan dengan landasan berupa nota kesepakatan dengan pemprov. Beberapa MoU saat ini masih dalam proses penyusunan dengan Pemprov DKI Jakarta. 2. Lembaga/instansi yang tidak kooperatif saat tim KKL Pembahu dari Balai/Kantor hadir secara formal dan bersurat resmi untuk melakukan pembinaan Bahasa Indonesia.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Tim Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan tim balai/kantor bahasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan (misalnya, Sekretariat Daerah DKI Jakarta) secara berkala. Catatan: Nota Kesepahaman dengan Pemda Provinsi DKI Jakarta udah selesai per 4 Oktober 2022" 2. Tetap melakukan koordinasi dengan lembaga, dan pemerintah daerah setempat yang menjadi sasaran dari pembinaan bahasa Indonesia di ruang publik.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Capaian lembaga terbina yang meningkat kualitas berbahasanya yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra adalah sebesar 60% dari target 59,93%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata ada 27 lembaga yang meningkat kualitas berbahasanya dari 45 lembaga yang dibina. Sementara itu, capaian pembinaan lembaga di seluruh Indonesia (Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk wilayah DKI Jakarta dan 30 balai/kantor bahasa untuk 30 wilayah lainnya adalah 36,02%. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah menunjukkan peningkatan persentase yang baik mengingat perubahan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara adalah 16,03% dalam setiap tahunnya. Artinya, perlu ada minimal 16 titik perbaikan dari 100 titik pembinaan yang ditentukan. Dengan langkah pembinaan yang telah ditetapkan, nilai tersebut dapat dicapai dengan baik. Namun, hal yang menjadi kendala dan hambatan adalah tidak semua lembaga binaan dapat dibina dari langkah audiensi sampai evaluasi. Hal ini disebabkan oleh titik awal langkah pembinaan tidak dimulai pada waktu yang sama karena lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga swasta membutuhkan nota kesepakatan mengenai pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Perancangan hingga penetapan nota kesepakatan membutuhkan waktu 3--8 bulan. Selain itu, ada pula lembaga yang pada awalnya bersedia untuk bekerja sama dalam kegiatan ini kemudian memgundurkan diri dengan tidak memberi respons kepada pembina bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Oleh karena itu, pemaksimalan peningkatan persentase tersebut dapat dilakukan jika tersedia waktu yang cukup dengan dasar kesepakatan yang tepat. Sehingga untuk memenuhi target pada Renstra Tahun 2022, capaian yang digunakan adalah hanya hasil penghitungan dari capaian Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Untuk penghitungan dari capaian Balai dan kantor akan disertakan di tahun 2023, dan akan dilakukan upaya konsolidasi, koordinasi, dan upaya pelaksanaan pembinaan di setiap satker agar memenuhi kriteria kenaikan 10% seperti yang terdapat pada definisi operasional Renstra. Sehingga untuk memenuhi target pada Renstra Tahun 2022, capaian yang digunakan adalah hanya hasil penghitungan dari capaian Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. Untuk penghitungan dari capaian Balai dan kantor akan disertakan di tahun 2023, dan akan dilakukan upaya konsolidasi, koordinasi, dan upaya pelaksanaan pembinaan di setiap satker agar memenuhi kriteria kenaikan 10% seperti yang terdapat pada definisi operasional Renstra. Capaian tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan persentase peningkatan kualitas berbahasa pada lembaga pengguna bahasa dengan kegiatan utama berupa Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara (dalam ruang publik dan dokumen lembaga). Sementara itu, kegiatan pendukungnya adalah kegiatan sebagai berikut. 1. Pelayanan Profesional Ahli Bahasa 2. Penyusunan Bahan Pembinaan Lembaga 3. Diseminasi Kepakaran Pembinaan Bahasa pada Lembaga</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. tidak semua lembaga binaan dapat dibina dari langkah audiensi sampai evaluasi. Hal ini disebabkan oleh titik awal langkah pembinaan tidak dimulai pada waktu yang sama karena lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan/atau lembaga swasta membutuhkan nota kesepakatan mengenai pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Perancangan hingga penetapan nota kesepakatan membutuhkan waktu 3--8 bulan. 2. Selain itu, ada pula lembaga yang pada awalnya bersedia untuk bekerja sama dalam kegiatan ini kemudian memgundurkan diri dengan tidak memberi respons kepada pembina bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Koordinasi dilakukan pada awal tahun untuk mengantisipasi waktu koordinasi yang lama. 2. Menyusun nota kesepakatan dengan lembaga yang membawahi lembaga/instansi sasaran utama.</p>
---	--	---	---	-------	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

3	[SP 2] Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah internasional	[IKP 2.1] Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	48	TW1 : 24 TW2 : 36 TW3 : 44 TW4 : 48	TW1 : 24 TW2 : 48 TW3 : 51 TW4 : 52	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Capaian per akhir Maret yaitu 24 negara. Negara: Mesir dan Papua Nugini (pengajar lokal). PJJ Daring: Filipina, Kamboja, Vietnam, India, Qatar, Australia, Uzbekistan, Austria, Bulgaria, Italia, Jerman, Norwegia, Islandia, Denmark, Lithuania, Swiss, Portugal, Rusia, Hungaria, Turki, Finlandia, dan Amerika Serikat. Januari - Maret: 2.472 orang pemelajar, jumlah penugasan 79 penugasan (PJJ daring dan Pengajar lokal), 34 lembaga penyelenggara BIPA. Jumlah target di renstra 2020-2024 versi revisi yaitu 49.899 (tahun 2022).</p> <p>Kendala / Permasalahan : Jumlah Pemelajar di 3 negara belum diidentifikasi karena masih dalam proses hitung.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan percepatan koordinasi dengan lembaga BIPA di luar negara Indonesia.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Capaian 24 negara diperoleh tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, dengan realisasi jumlah negara, secara kumulatif sebanyak 48 negara, jumlah pemelajar sebanyak 4.017 orang, dari lembaga terfasilitasi sebanyak 54 lembaga, dan jumlah penugasan pengajar sebanyak 141 penugasan. Capaian sebesar 200% secara parsial di triwulan II dikarenakan adanya penugasan pengajar lokal dan metode pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring dan luring. Sehingga total capaian negara yang mengajarkan BIPA secara kumulatif sebesar 133,33%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1, Lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri sudah mulai memberlakukan kembali pembelajaran secara luring. 2. Terbatasnya pengajar lokal yang kompeten di negara sasaran. 3. Terbatasnya bahan ajar acuan dan pengayaan di luar negeri, khususnya bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pemelajar BIPA di negara sasaran.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mendata dan memberdayakan alumni program BIPA dari Program Darmasiswa, KNB, dan BSBI, serta simpul Indonesia (PPI dan diaspora Indonesia). 2. Menyiapkan pengajar-pengajar lokal BIPA melalui sebuah program pelatihan yang terstruktur dan sistematis melalui Beasiswa BIPA. 3. Mendukung penyusunan bahan ajar bermuatan local/berkonteks negara sasaran dalam rangka menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan pengajar.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia salah satunya dicapai melalui kegiatan Bestari BIPA yang meliputi pengiriman pengajar, penugasan pengajar lokal, dan PJJ secara daring. Total Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia ini merupakan capaian akumulatif dari tahun 2021, sesuai dengan definisi operasional penghitungan, yaitu hasil penambahan akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu dengan jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia (yang difasilitasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPP Bahasa). Sampai dengan Triwulan III perincian capaiannya ialah sebagai berikut. 1. Jumlah penugasan 249 penugasan, 2. jumlah pemelajar 7.415 orang (penugasan langsung, pengajar lokal, dan PJJ secara daring) serta 930 orang melalui fasilitasi tidak langsung di UPT. Selain itu, capaian pemelajar diperoleh melalui fasilitasi tidak langsung melalui perwakilan RI (Peru, Belgia, Panama, Prancis, Spanyol, Jepang, Timor Leste) sebanyak 8.579 orang, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16.924 orang. 3. Jumlah lembaga terfasilitasi program BIPA adalah sebanyak 135 lembaga.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Capaian pemelajar dari fasilitasi langsung melalui penugasan langsung, pengajar lokal, dan PJJ secara daring kurang maksimal jumlahnya karena saat ini lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri sudah memberlakukan pembelajaran secara luring, sedangkan alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk penugasan pengajar secara langsung terbatas 2. Terbatasnya SDM pengajar lokal yang kompeten di negara sasaran tidak sebanding dengan permintaan pembelajaran BIPA oleh lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melaksanakan penugasan secara langsung pengajar BIPA ke negara-negara tertentu dan mengoptimalkan peran penugasan pengajar lokal. 2. Menyiapkan pengajar-pengajar lokal BIPA, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pengajar lokal BIPA.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia merupakan banyaknya negara di dunia, yang melalui lembaga penyelenggara program BIPA yang berada di negara tersebut, menyelenggarakan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA), baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal. Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia salah satunya dicapai melalui kegiatan Bestari BIPA yang meliputi pengiriman pengajar, penugasan pengajar lokal, dan PJJ secara daring. Total Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia ini merupakan capaian akumulatif dari tahun 2021, sesuai dengan definisi operasional penghitungan, yaitu hasil penambahan akumulasi jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia hingga tahun tertentu dengan jumlah negara baru yang mengajarkan bahasa Indonesia (yang difasilitasi secara langsung ataupun tidak langsung oleh BPP Bahasa). Sampai dengan Triwulan III perincian capaiannya ialah sebagai berikut. 1. Jumlah penugasan 307 penugasan, 2. jumlah pemelajar 150.290 orang. 3. Jumlah lembaga terfasilitasi program BIPA adalah sebanyak 185 lembaga penyelenggara.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Capaian pemelajar dari fasilitasi langsung melalui penugasan langsung, pengajar lokal, dan PJJ secara daring kurang maksimal jumlahnya karena saat ini lembaga penyelenggara program BIPA di luar negeri sudah memberlakukan pembelajaran secara luring, sedangkan alokasi anggaran perjalanan dinas luar negeri untuk penugasan pengajar secara langsung terbatas 2. Terbatasnya SDM pengajar lokal yang kompeten di negara sasaran tidak sebanding dengan permintaan pembelajaran BIPA oleh lembaga penyelenggara BIPA di luar negeri.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melaksanakan penugasan secara langsung pengajar BIPA ke negara-negara tertentu dan mengoptimalkan peran penugasan pengajar lokal. 2. Menyiapkan pengajar-pengajar lokal BIPA, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pengajar lokal BIPA.</p>
---	--	---	--------	----	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

4	[SP 3] Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	[IKP 3.1] Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	18.73	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 18.73	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 22.51	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Masih dalam proses pengumpulan data responden dengan suplai data dari satker BPP Bahasa. Persentase progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan per Mei sebesar 40%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Data yang harus dikumpulkan dari berbagai sumber sehingga sampai dengan saat ini masih belum seluruhnya terkumpul.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Satker di lingkungan BPP Bahasa berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan data yang diperlukan.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Progres capaian indikator pada triwulan kedua pada proses persiapan kegiatan penyusunan model perlindungan bahasa dan sastra serta proses pelaksanaan revitalisasi bahasa dan sastra di balai/kantor. Penentuan indeks oleh penuturnya masih pada proses pengumpulan data dasar dari responden maupun balai/kantor. Persentase progress pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I sebesar 45%. Capaian tersebut diperoleh dari: 1. Persentase penutur bahasa daerah, 2. Persentase bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal, 3. Persentase guru bahasa daerah; (guru yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya guru bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, tetapi juga termasuk penutur atau maestro bahasa daerah di lembaga pendidikan nonformal atau komunitas), 4. Persentase bahasa daerah yang memiliki terbitan, dan 5. Persentase bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik. Tahapan yang akan dilaksanakan adalah penyusunan model revitalisasi bahasa daerah; peluncuran program Merdeka Belajar Ketujuh Belas; penyusunan pedoman revitalisasi bahasa daerah; revitalisasi bahasa daerah di 12 provinsi dengan tahapan survei koordinasi, pembinaan penutur jati bahasa daerah (pelatihan guru master), dan Festival Tunas Bahasa Ibu; publikasi; dan penghitungan indeks pemanfaatan bahasa daerah.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Kondisi bahasa daerah yang berbeda mengharuskan adanya pendekatan model perlindungan yang berbeda 2. Proses pelaksanaan revitalisasi bahasa di dua belas provinsi mundur beberapa bulan karena adanya kendala anggaran</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1a. Mengadakan rapat beberapa kali bersama para narasumber penyusun model perlindungan bahasa dan para kepala balai dan kantor yang melaksanakan revitalisasi bahasa pada tahun 2022. b. Mengadakan konsinyasi penyusunan model Pelindungan Bahasa bersama staf Pelindungan Bahasa c. Percepatan pelaksanaan revitalisasi bahasa di 12 balai/kantor d. Kerja sama dengan Universitas untuk melaksanakan MBKM sebagai mitra pelaksanaan revitalisasi bahasa e. Melaksanakan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan revitalisasi bahasa f. Peliputan Revitalisasi bahasa daerah dan pembuatan konten bahasa daerah g. Memasukkan pertanyaan tentang penggunaan bahasa daerah pada Sensus Penduduk. 2a. Percepatan penambahan anggaran dengan pengajuan BA-BUN b. Pelaksanaan revitalisasi dipadatkan dengan percepatan jarak waktu antara survei dan koordinasi dengan pemberdayaan penutur jati c. Penambahan pelibatan pemangku kepentingan dalam kegiatan survei koordinasi dan penyusunan bahan revitalisasi bahasa.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Masih dalam proses melakukan koordinasi ke Badan Pusat Statistik dan Balai/Kantor yang melakukan Revitalisasi Bahasa Daerah secara langsung.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Penghitungan indeks pemanfaatan bahasa daerah masih memiliki kendala di pihak ke-3 yang memiliki long form untuk melakukan sensus penduduk (BPS).</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan koordinasi secara langsung dan akan bersurat secara resmi ke pihak eksternal yang memiliki wenang dan kompeten untuk melakukan penghitungan bersama dengan BPP Bahasa.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Data persentase penutur bahasa daerah disepakati diperoleh dari data penutur revitalisasi bahasa daerah di 34 provinsi seluruh Indonesia di tahun 2022. Perolehan data persentase bahasa daerah yang masuk ke dalam kurikulum/muatan lokal diperoleh dari 27 provinsi yang jumlah bahasa daerah masuk ke kurikulum pendidikan di tahun 2022. Persentase guru bahasa daerah (VGr); (guru yang termasuk dalam kategori ini tidak hanya guru bahasa daerah di lembaga pendidikan formal, tetapi juga termasuk penutur atau maestro bahasa daerah di lembaga pendidikan nonformal atau komunitas), didasarkan pada data yang diperoleh di 12 balai dan kantor bahasa yang telah melaksanakan Revitalisasi Bahasa Daerah Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), dengan realisasi masing-masing per satker 251 Guru Master. Jumlah total guru yang telah mendapatkan pelatihan revitalisasi bahasa daerah dirata-rata dengan data jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diperoleh dari Data Pokok Pendidikan Tahun 2022. Pada saat pengambilan data variabel ini, tim KKLK Pelindungan Bahasa Daerah mengalami kendala karena guru bahasa daerah yang menyampaikan data baru Provinsi Jawa Tengah. Sehingga hal ini yang menyebabkan, KKLK bersepakat bahwa target pada variabel ini diambil dari target Pelatihan Guru Master Bahasa Daerah (BA BUN RBD dari 12 balai dan kantor bahasa). Guru Master yang dimaksud adalah jumlah penutur atau maestro diambil dari data siswa SMP dan SD yang mengikuti pendidikan formal dan nonformal (pengajar lainnya dalam proses pembelajaran bahasa daerah). Variabel persentase guru bahasa daerah, variabel jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan, dan persentase bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik, diperoleh dari sumber yang sama, yaitu 12 balai dan kantor bahasa yang melakukan BA BUN Revitalisasi Bahasa Daerah di tahun 2022. Balai dan kantor bahasa tersebut menggunakan data revitalisasi bahasa menggunakan data identifikasi revitalisasi bahasa daerah tahun 2021. Untuk variabel jumlah bahasa daerah yang memiliki terbitan, dan persentase bahasa daerah yang dipublikasikan di media elektronik menggunakan data terkini di tahun 2022 setelah 12 balai dan kantor bahasa selesai melaksanakan Pelatihan Guru Master, Festival Tunas Bahasa Ibu, dan Pengimbasan ke sekolah di wilayah 3T. Penghitungan IPBD ini mendapat intervensi dari Badan Pusat Statistik yang memasukkan penghitungan penutur bahasa daerah dari 718 bahasa daerah melalui long form. Namun saat ini penghitungan variabel tersebut masih menggunakan data BPS Tahun 2010 yang hanya berasal dari 10 bahasa daerah. Data BPS di tahun 2020 merupakan penjarangan penutur dari 718 bahasa daerah yang datanya baru selesai diolah pd bulan Juni tahun 2023. Sehingga hasil penghitungan variabel ini akan dijadikan dasar penghitungan capaian IPBD tahun 2023.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Penghitungan yang dilakukan oleh pihak ke-3 (BPS) terhambat oleh pandemi.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Perlu melakukan koordinasi dan menyampaikan surat resmi terkait menjalin kerjasama untuk melakukan kerja sama penghitungan IPBD.</p>
---	---	--	--------	-------	--	--	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

5	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	<p>TW1 : -</p> <p>TW2 : -</p> <p>TW3 : -</p> <p>TW4 : A</p>	<p>TW1 : -</p> <p>TW2 : -</p> <p>TW3 : BB</p> <p>TW4 : A</p>	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I, progres pencapaian target IKK Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB, Sekretariat Badan Bahasa baru melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian nilai SAKIP, diantaranya, - Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja - Sosialisasi Perjanjian Kinerja - Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja bulanan dan triwulanan - Pendampingan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa - Penyelarasan Rencana Strategis 2020—2024 Progress capaian kinerja triwulan I sebesar 10%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala hambatan pada pencapaian kinerja pada triwulan I adalah pada system informasi pelaporan tahun 2022 yang terlambat diluncurkan sehingga pada proses penyusunan perjanjian kinerja, penyusunan rencana aksi, pelaporan triwulan I, dan proses pemantauan perkembangan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja terkendala/terlambat.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Badan dalam mengatasi kendala/permasalahan yaitu dengan cara, sebagai berikut. - Melakukan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran satuan kerja dengan menggunakan instrument manual - Koordinasi/konsultasi dengan lembaga/instansi terkait untuk menanyakan perkembangan penggunaan aplikasi tahun 2022 - Melakukan pendampingan langsung dengan petugas pelaporan satuan kerja</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : BPP Bahasa telah melakukan penyusunan RKT, PK, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, dan Revisi Renstra 2020–2024. Melalui Sekretariat BPP Bahasa, BPP juga telah melakukan pendampingan awal persiapan penilaian SAKIP Tahun 2022 ke satker di lingkungan BPP Bahasa, sehingga menghasilkan rekomendasi dokumen yang harus diperbaiki dan dilengkapi dalam menghadapi penilaian SAKIP Tahun 2022. Sehingga sampai dengan triwulan II progres tindak lanjut pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator sebesar 40%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Adanya perubahan penilaian sesuai PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 sehingga membutuhkan penyesuaian dalam penyiapan dokumen yang diperlukan dalam penilaian. 2. Terbatasnya waktu yang diberikan untuk menyiapkan dokumen data dukung SAKIP dengan kesiapan KKE yang masih terus disusun.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait dengan format penilaian dan KKE terbaru, serta melakukan pendampingan awal ke seluruh satker di lingkungan BPP Bahasa untuk memastikan kesiapan dokumen pendukung SAKIP. 2. Melakukan percepatan penyiapan dokumen data dukung SAKIP dan koordinasi ke Biro Perencanaan terkait dokumen-dokumen yang wajib disiapkan melalui KKE terbaru.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Nilai yang dicantumkan adalah hasil dari penilaian mandiri oleh Biro Perencanaan di ICE BSD Tangerang tanggal 13–15 Juli 2022. Progres pelaksanaan IKP. 1. Melakukan sosialisasi Permenpan No 88 Tahun 2021 dan tindak lanjut penilaian 2021 dengan Satker di lingkungan BPP Bahasa dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Menpan 2. Melakukan pendampingan awal dengan Satker di lingkungan BPP Bahasa dengan melibatkan Biro Perencanaan 3. Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2022 dengan Satker di lingkungan BPP Bahasa dan Biro Perencanaan 4. Melakukan pendampingan secara daring dan luring dengan seluruh Satker. Tahapan yang akan dilaksanakan Menunggu penilaian dokumen data dukung SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek yang sudah dimulai di akhir bulan September tahun 2022.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Satker tidak langsung menindaklanjuti hasil catatan evaluasi 2. Terdapat beberapa dokumen atau data dukung yang belum lengkap atau belum ada 3. Perspektif pendamping terkait kertas kerja evaluasi sesuai dengan permenpan 88 tahun 2021 masih berbeda sehingga menyulitkan untuk memahami kebutuhan data dukung agar memenuhi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan 4. Belum seluruh kepala satker memahami dan berkomitmen untuk mengimplementasikan SAKIP di Satker masing-masing</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan sosialisasi permenpan nomor 88 Tahun 2021 tentang Penilaian SAKIP 2. Melakukan pemantauan dan pendampingan kesiapan satker dalam menghadapi penilaian SAKIP. 3. Menyampaikan saran kepada tim pendamping dari Biro Perencanaan agar tim penilai memiliki standar penilaian yang sama. 4. Mengingatkan seluruh kepala satker agar memiliki komitmen dalam pelaksanaan SAKIP.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : 1. Melakukan sosialisasi Permenpan No 88 Tahun 2021 dan tindak lanjut penilaian 2021 dengan Satker di lingkungan BPP Bahasa dengan melibatkan Biro Perencanaan dan Menpan 2. Melakukan pendampingan awal dengan Satker di lingkungan BPP Bahasa dengan melibatkan Biro Perencanaan 3. Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2022 dengan Satker di lingkungan BPP Bahasa dan Biro Perencanaan 4. Melakukan pendampingan secara daring dan luring dengan seluruh Satker 5. Masa konfirmasi terkait hasil evaluasi dokumen data dukung SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek pada bulan November 2022. BPP Bahasa telah mengupayakan langkah akhir yaitu pada saat dilakukan masa konfirmasi dokumen data dukung SAKIP setelah dilakukan penilaian secara daring oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi bersemuka bersama dengan satker yang masih memiliki nilai akumulasi SAKIP di bawah target minimal dengan predikat BB. Hasil akumulasi nilai dari komponen-komponen penilaian dokumen data dukung SAKIP BPP Bahasa Tahun 2022, BPP Bahasa mendapatkan nilai 90, dengan predikat A.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. 1. Satker tidak langsung menindaklanjuti hasil catatan evaluasi 2. Terdapat beberapa dokumen atau data dukung yang belum lengkap atau belum ada 3. Perspektif pendamping terkait kertas kerja evaluasi sesuai dengan permenpan 88 tahun 2021 masih berbeda sehingga menyulitkan untuk memahami kebutuhan data dukung agar memenuhi aspek pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan 4. Belum seluruh kepala satker memahami dan berkomitmen untuk mengimplementasikan SAKIP di Satker masing-masing</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan sosialisasi permenpan nomor 88 Tahun 2021 tentang Penilaian SAKIP 2. Melakukan pemantauan dan pendampingan kesiapan satker dalam menghadapi penilaian SAKIP. 3. Menyampaikan saran kepada tim pendamping dari Biro Perencanaan agar tim penilai memiliki standar penilaian yang sama. 4. Mengingatkan seluruh kepala satker agar memiliki komitmen dalam pelaksanaan SAKIP.</p>
---	---	--	----------	---	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	satker	2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 2	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I, Sekretariat Badan Bahasa telah melakukan pendampingan 7 unit kerja calon ZI-WBK/WBBM, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Lampung, Kantor Bahasa Provinsi NTB, Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Balai Bahasa Provinsi Bali, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta. Progress pelaksanaan kegiatan sebesar 25%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : - Masih belum berjalannya monitoring evaluasi secara berkala dan tindak lanjut movev pada setiap area perubahan - Peran agen perubahan belum maksimal - Belum ada inovasi yang nyata - Kelengkapan data dukung ZI-WBK</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : - Pembangunan pola pikir semua pegawai terkait target dan ukuran keberhasilan - Pembangunan komitmen antara pimpinan dan staf dalam menyusun rencana kerja dan anggaran - Menentukan target budaya kerja dan pola pikir apa yang akan diusung dan ditentukan mekanismenya - Komitmen Bersama seluruh pegawai untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring secara berkala - Meningkatkan peran pimpinan sebagai penggerak seluruh pegawai dalam melaksanakan program yang telah ditetapkan pada tiap area perubahan - Perlu adanya komitmen Bersama antara pimpinan, tim RBI, dan seluruh pegawai, untuk melaksanakan tiap rencana kerja pada tiap area perubahan dan mendokumentasikan dengan baik</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada bulan April-Mei, BPP Bahasa melalui Sekretariat BPP Bahasa melalui tim Asesor dan RBI melakukan upaya melakukan pendampingan persiapan penilaian kepada sembilan satuan kerja calon ZI-WBK, dengan tujuan untuk merevisi kembali data dukung, sarana dan prasarana serta kampanye publik terkait ZI-WBK pada tiap satuan kerja. Dari total sembilan satker yang diajukan untuk menjadi satker ZI-WBK, yang lolos sampai dengan triwulan II yaitu BBP Bali, BBP Jawa Timur, BBP Kalimantan Tengah, dan KBP Nusa Tenggara Barat. Pendampingan sampai dengan tahap seleksi yang telah dilakukan tim asesor dan RBI sampai dengan triwulan II telah mencapai progress 50%.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Kurangnya SDM yang kompeten dalam melakukan pembinaan tentang ZI-WBK/WBBM 2. Komitmen seluruh pegawai di lingkungan BPP Bahasa terkait dengan ZI-WBK/WBBM masih kurang. Hal ini karena belum seluruh lapisan pegawai memiliki pemahaman yang sama tentang ZI-WBK/WBBM.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan pembinaan terhadap SDM/tim RBI tentang wawasan ZI-WBK/WBBM. 2. Meningkatkan komitmen satuan kerja agar dapat mengimplementasikan SAKIP dengan baik, dan melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan pegawai agar memiliki pemahaman sama tentang ZI-WBK/WBBM.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Progres Pelaksanaan kegiatan: 1. seleksi satuan kerja yang mengusulkan ZI-WBK 2. evaluasi dokumen satuan kerja yang mengusulkan ZI-WBK 3. pendampingan dan penilaian satuan kerja yang mengusulkan ZI-WBK 4. penetapan satuan kerja ZI-WBK di lingkungan Badan 5. pengusulan satuan kerja ZI-WBK ke Biro Ortala 6. penilaian tim TPI (itjen kemendikbud) 7. hasil penilaian tim TPI 8. pengusulan satker lolos dari tim TPI ke Biro Ortala 9. pendampingan satker ZI-WBK antara Biro Ortala dengan Badan Bahasa 10. pengusulan satker ZI-WBK ke TPN (Menpan) 11. evaluasi pelaksanaan ZI-WBK oleh tim TPN pusbanglin lolos TPI evaluasi terkait satuan kerja yang mengajukan zi-wbk, yang mengajukan 11, yang diajukan 9, yang lolos itjen ada 4 satker, yaitu bali, kalteng, ntb, dan jatim yang tahapan saat ini baru selesai proses penilaian dari menpan hari rabu 28 september. Tahapan yang akan dilaksanakan tahapan yang masih harus dilakukan 1. survei eksternal 2. pleno 3. hasil 4. penetapan ZI-WBK/WBBM</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Belum seluruh pegawai berkomitmen untuk melaksanakan ZI-WBK. 2. Belum seluruh dokumen atau data dukung lengkap atau dibuat.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan pendampingan daring mulai dari pemenuhan LKE sampai perbaikan paparan. 2. Memberikan panduan pelaksanaan ZI-WBK.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Berdasarkan kriteria minimal pengajuan calon satker ZI-WBK/WBBM, maka didapatkanlah satu satuan kerja calon ZI-WBBM yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, serta delapan satuan kerja calon ZI-WBK/WBBM yaitu: 1) Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, 2) Balai Bahasa Provinsi D.I Yogyakarta, 3) Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 4) Balai Bahasa Provinsi Bali, 5) Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, 6) Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara, 7) Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan 8) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk kemudian diusulkan ke pada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilai Instansi (TPI) di lingkungan Kemendikbudristek dengan surat Nomor 0913/11/OT.01.03/2022 tanggal 25 maret 2022. Pendampingan persiapan penilaian kepada sembilan satuan kerja calon ZI-WBK dilakukan melalui Sekretariat BPP Bahasa. Pendampingan dilakukan oleh tim RBI dan Asesor BPP Bahasa pada bulan April—Mei dengan tujuan untuk merevisi kembali data dukung, sarana dan prasarana serta kampanye publik terkait ZI-WBK pada tiap satuan kerja. Pada dasarnya setiap satuan kerja telah melaksanakan enam area perubahan, tetapi belum terdomentasikan dan di evaluasi secara berkala. Pada tahun 2022, KemenpanRB mengeluarkan Surat Edaran Nomor 15 tahun 2022 tentang Pengusulan Unit Kerja Dalam Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM), terdapat mekanisme baru yaitu pembatasan pengusulan dari tiap Kementerian/Lembaga, untuk Kemendikbudristek pada Tahun 2022 maksimal dapat mengajukan 15 satuan kerja. Berdasarkan penilaian oleh TPI, dari sembilan satuan kerja yang diusulkan menjadi satker ZI-WBK/WBBM terdapat tujuh satker yang dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan penilaian pada tahap selanjutnya, hanya saja dikarenakan adanya perubahan pembatasan satuan kerja maka nantinya akan disaring kembali menjadi tiga sampai empat satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berdasarkan mekanisme yang ditentukan di Kemendikbudristek. Pada tanggal 6 Desember 2022, berdasarkan Surat Kemendikbudristek Nomor 11587/G.OT.01.02/2022, telah diumumkan satuan kerja yang mendapatkan predikat ZI-WBK. Kemendikbudristek dari 15 satuan kerja yang diusulkan, tiga satuan kerja berhasil mendapatkan predikat tersebut dan dua diantaranya merupakan satuan kerja dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan Balai Bahasa Provinsi Bali.</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Belum seluruh pegawai berkomitmen untuk melaksanakan ZI-WBK. belum seluruh dokumen atau data dukung lengkap atau dibuat. 2. Belum seluruh dokumen atau data dukung lengkap atau dibuat.</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan pendampingan daring mulai dari pemenuhan LKE sampai perbaikan paparan. 2. Memberikan panduan pelaksanaan ZI-WBK.</p>
---	---	--	--------	---	--	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Jakarta,30 Desember 2022

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



E. Aminudin Aziz

SK Tim Penyusun LAKIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330

Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0365/I/PR.06.00/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;
- b. menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;

- c. menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- d. merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 atas arahan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- e. menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 untuk ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- f. menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- g. memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA BADAN,



E. AMINUDIN AZIZ

hm

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
NOMOR 0365/I/PR.06.00/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

TIM PENYUSUN LAKIP
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Hafidz Muksin	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah
2.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua Tim
3.	Ratna Perwitosari	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
4.	Sun'an Yohantho	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota

5.	Sri Haryanti	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Anggota
6.	Ganjar	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Anggota
7.	Danang Harry Wibowo	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
8.	Uud Suyuhuddin	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
9.	Dinar Kartika Apriliani Wijayanti	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
9.	Yiying Yuningsih	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
10.	Nurjaman	Penyusun Informasi dan Publikasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota

11.	Dede Saputra	Penyusun Laporan Keuangan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Anggota
-----	--------------	--	---------

KEPALA BADAN,



E. AMINUDIN AZIZ

SK Tim Reviu LAKIP



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET
DAN TEKNOLOGI

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330

Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0366/I/PR.06.00/2023

TENTANG

TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tentang Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717); dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Tim Reviu LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Reviu LAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 berkualitas; dan

- b. menyusun rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

KEPALA BADAN,



E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
NOMOR 0366/I/PR.06.00/2023
TENTANG
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2023

TIM REVIU LAKIP
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Muh. Abdul Khak	Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pengarah
2.	Hafidz Muksin	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Ketua Tim
3.	Imam Budi Utomo	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Anggota
4.	Iwa Lukmana	Kepala Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	Anggota
5.	Margiyati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota

6.	Tri Indira	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	Oka Wahyu Setiya Adi	Analisis Jabatan	Anggota

KEPALA BADAN,



E. AMINUDIN AZIZ

Penyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 31 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Hafidz Muksin

197001221990011001

Catatan Hasil Reviu Itjen Kemendikbudristek



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi
Inspektorat Jenderal

Disusun oleh/
Tanggal

03 Feb 2023

1. Fanni Arimulia Nugraha (AT)
2. Firdaus Rahmad Akbar (AT)
3. Nur Fadlli (AT)

Direviu oleh/
Tanggal

04 Feb 2023

1. Iwan Mustafa (PT)
2. Agung Prasetyo (KT)

Disetujui oleh/
Tanggal

05 Feb 2023

Fauziah (PM)

Unit Organisasi Eselon I Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Pemenuhan Aspek LAKIP

Pemenuhan Aspek LAKIP

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPP Bahasa) Tahun 2022 telah menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Pedoman Penyusunan LAKIP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut yaitu:

BAB I Pendahuluan

Telah disajikan gambaran umum, dasar hukum, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan Kinerja

Telah disajikan visi, misi ringkasan perjanjian kinerja tahun 2022 dan sasaran strategis. Amanah untuk menjalankan tugas dan fungsi BPP Bahasa dalam rangka pembangunan pengembangan dan pembinaan bahasa dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) BPP Bahasa tahun 2022-2024 yang sudah direvisi, dan Rencana Kinerja Tahun 2022, dilakukan penetapan kinerja/kontrak kinerja Kepala BPP Bahasa dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk mencapai Sasaran Program (SP) dan target kinerja BPP Bahasa sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, dengan menetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program (IKP), sebagai berikut:

a. Sasaran Program:

- 1) Meningkatkan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan;
- 2) Meningkatkan Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional;
- 3) Meningkatkan Kelestarian Bahasa Daerah;
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 5) Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek.

b. Indikator Kinerja:

- 1) IKP Literasi Kebahasaan dan Kesetaraan
 - a) Persentase Penutur Bahasa Indonesia Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya;

- b) Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya;
- 2) IKP Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional:
 - a) Jumlah Negara yang Mengajarkan Bahasa Indonesia.
- 3) IKP Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah:
 - a) Indeks Pemanfaatan Bahasa Daerah oleh Penuturnya.
- 4) IKP Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi:
 - a) Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPP Bahasa;
- 5) IKP Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek:
 - a) Jumlah satuan kerja (satker) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapat Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM).

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Telah disajikan data-data mengenai realisasi terhadap upaya pencapaian terhadap target kinerja serta realisasi anggaran disertai dengan hambatan-hambatan yang ditemui serta upayaantisipasi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

BAB IV Penutup

Telah disajikan simpulan dari keseluruhan upaya pencapaian terhadap target pencapaian kinerja serta serapan anggaran secara singkat.

Uraian Catatan Hasil Reviu

1. Terdapat permasalahan pada pemenuhan format LAKIP:
 - a. cover LAKIP BPP Bahasa kurang menarik;
 - b. belum terdapat pengesahan pada halaman Kata Pengantar berupa tandatangan dan stempel basah serta penanggalan pada kata pengantar seharusnya dituliskan **Februari 2023**;
 - c. belum dicantumkan NIP pejabat Eselon I pada pengesahan Kata Pengantar;
 - d. nomor halaman pada Daftar Isi yang belum teridentifikasi;
 - e. nomor halaman pada Daftar Tabel yang belum teridentifikasi;
 - f. nomor halaman pada Daftar Grafik yang belum teridentifikasi;
 - g. ikhtisar Eksekutif belum ada;
 - h. terdapat penyajian foto/gambar yang tidak memiliki korelasi dengan uraian antara lain terdapat pada BAB I hal 9. Gambar/Foto Gedung BPP Bahasa;
 - i. belum adanya deskripsi mengenai *crosscutting/colaborative* pada LAKIP;
 - j. belum terlihat adanya kesinambungan antara isu strategis yang diungkapkan dalam BAB I dengan bagian kendala-kendala yang dihadapi pada BAB III di masing-masing SP.
2. Terdapat permasalahan pada penyajian substansi LAKIP:
 - a. tabel pada SP I terkait dengan "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan" pada IKP persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya, belum dijelaskan angka dasar, tahun 2021 dan target renstra 2024;
 - b. belum adanya penjelasan perhitungan dan data untuk persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya pada SP I terkait dengan "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan" pada IKP persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya;
 - c. pada SP I terkait dengan "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan" pada IKP persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya, khususnya tabel belum dijelaskan angka dasar, tahun 2021 dan target renstra 2024;

- d. pada SP 1 "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan pada IKP persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya, perhitungan dan data untuk persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya belum dijelaskan;
 - e. pada SP 3 "Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah" pada tabel target dan realisasi IKP nilai target dan realisasi Tahun 2022 mempunyai nilai yang sama dengan target dan realisasi pada tahun 2021 (target 18.73 dan realisasi 22.51);
 - f. pada SP 4 "Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi" dan SP 5 terkait dengan "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek" telah dijelaskan secara terperinci sampai pada tahap kegiatan pendukung SP, namun belum disertai dengan kendala dan langkah antisipasi secara umum terkait dengan pemenuhan SP;
 - g. pada SP 4 "Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi" dan SP 5 terkait dengan "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek" belum terdapat ilustrasi terkait dengan pemenuhan target pada tahun 2020 dan 2021 yang tidak dicantumkan pada LAKIP.
3. Terdapat kesalahan penyajian data pada LAKIP 2022 yang disebabkan oleh kesalahan penulisan, diantaranya:
- a. penulisan istilah baku belum ditulis secara konsisten dalam LAKIP seperti penulisan "Badan Bahasa" atau "BPP Bahasa" sebagai singkatan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
 - b. penyajian grafik pada SP 4 terkait dengan Capaian IKP Predikat SAKIP BPP Bahasa yang dibuat dengan mengkalkulasi jumlah SAKIP satuan kerja tidak sesuai dengan deskripsi Indikator Kinerja SP yaitu "Predikat SAKIP BPP Bahasa;"
 - c. penyajian grafik pada SP 5 terkait dengan Capaian IKP Jumlah satker di BPP Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM tidak sesuai dengan deskripsi Indikator Kinerja SP yaitu "Jumlah Satker di BPP Bahasa yang mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM."

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), agar memerintahkan kepada tim penyusun LAKIP Tahun 2022 segera melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. terkait permasalahan Pemenuhan Format LAKIP, untuk:
 - a. menyempurnakan desain cover LAKIP BPP Bahasa menjadi lebih menarik, misalnya dengan menambahkan foto-foto kegiatan atau ilustrasi dari program prioritas;
 - b. mengesahkan LAKIP dan memperbaiki penulisan tanggal pada kata pengantar LAKIP;
 - c. mencantumkan NIP pejabat Eselon 1 pada pengesahan Kata Pengantar;
 - d. membuat ringkasan eksekutif pada LAKIP;
 - e. mencantumkan nomor halaman pada Daftar Isi;
 - f. mencantumkan nomor halaman pada Daftar Tabel;
 - g. mencantumkan nomor halaman pada Daftar Grafik;
 - h. menghilangkan foto/gambar yang tidak relevan dengan substansi LAKIP;
 - i. membuat isi dari *crosscutting / collaborative* pada LAKIP;
 - j. merumuskan isu strategis organisasi yang berkorelasi dengan kendala-kendala/permasalahan pada BAB III sehingga terlihat adanya kesinambungan antara isu strategis dengan permasalahan yang dihadapi pada masing-masing SP.

2. terkait permasalahan penyajian Substansi LAKIP, untuk:
 - a. memberikan penjelasan tabel pada angka dasar, khususnya tahun 2021 dan target renstra 2024 didalam SP 1 "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan" pada IKP persentase penutur bahasa indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya;
 - b. menjelaskan secara terperinci terkait dengan data nilai dan daftar lembaga sebagai proses perhitungan realisasi dan untuk mengisi, tabel terkait dengan pemenuhan SP 1 "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan" pada IKP persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya;
 - c. menyesuaikan nilai target Tahun 2022 dengan nilai yang terdapat pada Renstra BPP Bahasa, serta apabila kondisi tersebut disebabkan karena adanya kesalahan dalam penulisan agar memperbaiki nilai target dan realisasi yang terdapat pada draft LAKIP pada SP 3 terkait dengan "Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah;"
 - d. menjelaskan dengan memadai tentang perhitungan dan data untuk persentase penutur terbina yang meningkat kualitas berbahasanya pada SP 1 terkait dengan "Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastraan khususnya IKP persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya;
 - e. perlu penjelasan SP 3 terkait dengan "Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah" pada tabel target dan realisasi IKP nilai target dan realisasi Tahun 2022 mempunyai nilai yang sama dengan target dan realisasi pada tahun 2021 (target 18.73 dan realisasi 22.51);
 - f. menjabarkan rincian kendala dan langkah antisipasi secara umum terkait dengan pemenuhan SP 4 terkait dengan "Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi" dan SP 5 terkait dengan "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek;"
 - g. mencantumkan dan menjelaskan pemenuhan target pada tahun 2020 dan 2021 pada LAKIP untuk SP 4 terkait dengan "Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi" dan SP 5 terkait dengan "Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemendikbudristek."
3. Terkait permasalahan kesalahan penyajian data pada LAKIP 2022, untuk:
 - a. memperbaiki penulisan istilah baku terhadap nomenklatur organisasi secara konsisten di dalam LAKIP;
 - b. melakukan perbaikan penyajian grafik pada SP 4 terkait dengan Capaian IKP Predikat SAKIP BPP Bahasa;
 - c. merevisi penyajian grafik pada SP 5 terkait dengan Capaian IKP Jumlah satker di BPP Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM sesuai dengan deskripsi substansi SP.

Mengetahui/Menyetujui

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa Kemendikbudristek,

Dr. E. Aminudin Aziz, M.A.,-Ph.D.
NIP 19671116 199203 1 001

Jakarta, Februari 2023

Pengendali Mutu

Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek,

Fauziah

NIP 19610730 198802 2 001



Inovasi

INOVASI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2022

No	Satker	Inovasi	Keterangan
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengembangan Laman GESIT	Laman GESIT https://gesit.kemdikbud.go.id/ dikembangkan fungsinya untuk penilaian pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pemberkasan widyabasa.
2		Pengembangan Laman PASTI (Padanan Istilah)	PASTI merupakan gabungan dari dua buah aplikasi daring yang sebelumnya sudah digunakan oleh masyarakat, yaitu aplikasi Glosarium daring dan SPAI (Senarai Padanan Asing Indonesia). Aplikasi Pasti dikembangkan sebagai salah satu cara untuk menyebarkan padanan bahasa Indonesia untuk istilah asing yang telah dipadankan. Aplikasi Pasti dapat diakses melalui alamat https://pasti.kemdikbud.go.id/
3		Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2022	Pada tahun 2022 telah disusun data statistik kebahasaan dan kesastraan oleh Badan Bahasa bekerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) dalam bentuk buku.
4	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kamus Masuk Sekolah	Kegiatan ini merupakan program baru yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mengenalkan kemahiran merujuk (reference skill) kepada siswa, mulai dari tingkat dasar sampai dengan menengah.
5		Kata Tahun Ini	Penetapan Kata Tahun Ini (KTI) didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu daftar kata terpopuler menurut KBBI, frekuensi kemunculan di Google Trends, penanda berbagai peristiwa, penggunaan kata itu di berbagai kalangan, dan keluasan distribusi kata tersebut. KTI yang telah ditetapkan adalah milenial (2019), pandemi (2020), vaksin (2021) dan metamesta (2022).
6		Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah	Merdeka belajar episode revitalisasi bahasa daerah merupakan program baru yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelindungan bahasa daerah.
7		Aplikasi Daya Hidup Bahasa (VIBA)	Untuk memudahkan pengumpulan data daya hidup bahasa, tahun 2022 dibuat sebuah aplikasi pengukuran daya hidup bahasa yang disebut VIBA App. Aplikasi ini merupakan alih wahana kuesioner cetak ke dalam bentuk aplikasi yang berbasis paperless.
8	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Pembuatan Video Animasi	Video animasi tersebut dapat digunakan untuk menunjang pembelajaran literasi numerasi bagi anak usia SD kelas rendah.
9		Pemutakhiran Laman budi.kemdikbud.go.id	Tampilan dan fitur baru pada laman budi.kemdikbud.go.id agar masyarakat dapat mengakses buku bacaan literasi yang telah disusun Badan Bahasa secara gratis (baik buku digital, komik, buku video, maupun buku audio)
10		Pengembangan Aplikasi Halo Bahasa	Aplikasi Halo Bahasa dikembangkan dengan versi IOS untuk menjangkau lebih banyak pengguna gawai.
11		Pembuatan Laman Simulasi UKBI	Pembuatan laman simulasi UKBI yang bertujuan untuk membantu calon peserta UKBI dalam mengenali bentuk soal, memahami sistem pengujian, dan mendapatkan pengalaman UKBI Adaptif Merdeka secara menyeluruh. Laman tersebut dapat diakses melalui tautan simulasiukbi.kemdikbud.go.id .
12	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Majalah Duta Bahasa (Montesa)	Terdokumentasi dan terpublikasikannya giat kebahasaan dan kesastraan dan literasi hasil praktik baik dari Duta Bahasa Sulawesi Tengah, Manfaat: Tersedianya ruang menulis dan bahan bacaan tentang Bahasa, sastra dan

No	Satker	Inovasi	Keterangan
			literasi yang dihasilkan oleh duta Bahasa (generasi muda Prov Sulteng)
13		Majalah Mola	Terdokumentasi dan terpublikasikannya Informasi Bahasa sastra budaya tradisi literasi masyarakat Sulawesi Tengah dalam bentuk majalah. Manfaat: Ruang menulis Bahasa daerah dalam rangka perlindungan dan pengembangan Bahasa daerah di Sulawesi Tengah
14	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Kamus Digital (kamus dwibahasa Jawa-Indonesia)	Kamus Digital (kamus dwibahasa Jawa-Indonesia)
15		Adabay (layanan data dan informasi bby)	Adabay (layanan data dan informasi bby)
16	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Digitalisasi Peta Literasi Lampung	Digitalisasi Peta Literasi Lampung
17		Digitalisasi Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Berbasis Aplikasi (IOS dan Android)	Digitalisasi Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Berbasis Aplikasi (IOS dan Android)
18		Buku Terjemahan Digital	Buku Terjemahan Digital
19		Inisiator Pembentukan APPBIPA Lampung	Inisiator Pembentukan APPBIPA Lampung
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Majalah Informasi Bahasa dan Sastra (INBAS)	Majalah Informasi Bahasa dan Sastra (INBAS)
21	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Penerbitan Kamus Bahasa Palembang-Indonesia Daring (Digital)	Penerbitan Kamus Bahasa Palembang-Indonesia Daring (Digital)
22		Program Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka Massal	Program Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka Massal
23	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Laman Daulat	Laman Daulat
24	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Penyusunan kamus dwibahasa bergambar (Daerha--Indonesia)	Penyusunan kamus dwibahasa bergambar (Daerha--Indonesia)
25	Balai Bahasa Provinsi Papua	Pemutakhiran Fitur Website Balai Bahasa Provinsi Papua tentang SAKIP	Pemutakhiran Fitur Website Balai Bahasa Provinsi Papua tentang SAKIP
26	Balai Bahasa Provinsi Papua	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penyimpanan Arsip dan Perangkat Data (SIPAPEDA) yang berfungsi sebagai database penyimpanan dokumen-dokumen kegiatan	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penyimpanan Arsip dan Perangkat Data (SIPAPEDA) yang berfungsi sebagai database penyimpanan dokumen-dokumen kegiatan
27	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Kamus Budaya Jawa dalam bentuk digital (https://senaraiistilahjawa.kemdikbud.go.id .)	Kamus Budaya Jawa dalam bentuk digital (https://senaraiistilahjawa.kemdikbud.go.id .)
28		Wisata Tiga Bahasa (WISTIBA) yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa dialek Banyumas, dan bahasa Inggris. (Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berhasil menginisiasi Hotel Owabong untuk berinovasi menyajikan WISTIBA)	Wisata Tiga Bahasa (WISTIBA) yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa dialek Banyumas, dan bahasa Inggris. (Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berhasil menginisiasi Hotel Owabong untuk berinovasi menyajikan WISTIBA)
29	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Layanan Sosialisasi kebahasaan dan kesastraan melalui SAHABAT (Sinier	Layanan Sosialisasi kebahasaan dan kesastraan melalui SAHABAT (Sinier Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat).

No	Satker	Inovasi	Keterangan
		Bahasa dan Sastra Bermartabat Bermanfaat).	
30	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Pembaruan Aplikasi Kedan Literasi	fitur terbaru dalam aplikasi ini, yaitu menu peta komunitas literasi. Peta literasi adalah salah satu menu dalam aplikasi Kedan Literasi yang menampilkan data lokasi setiap komunitas literasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Dalam menu ini juga tersaji data manajemen komunitas literasi tersebut.
31	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Kamus Android Bahasa Melayu Manado-Indonesia	Kamus Android Bahasa Melayu Manado-Indonesia
32		Penayangan Materi Seri Penyuluhan via Media Sosial Balai	Penayangan Materi Seri Penyuluhan via Media Sosial Balai
33	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	LIBAS-T (Layanan Informasi Bahasa dan Sastra Terpadu)	LIBAS-T (Layanan Informasi Bahasa dan Sastra Terpadu)
34		Butapin (Buku Tamu Pintar)	Butapin (Buku Tamu Pintar)
35		KOMDIK (Komunitas Literasi Digital)	KOMDIK (Komunitas Literasi Digital)
36		Perpustakaan Digital	Perpustakaan Digital
37	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	Jelajah Bahasa, Kampus Merdeka	Jelajah Bahasa, Kampus Merdeka
38	Balai Bahasa Provinsi Bali	SICANDI (Koleksi Cerita Anak Digital)	SICANDI (Koleksi Cerita Anak Digital)
39		SIBALUKARING (Inventarisasi Bahasa Melalui Kamus Daring)	SIBALUKARING (Inventarisasi Bahasa Melalui Kamus Daring)
40		SITARIB (Koleksi Lontar Balai Bahasa Bali)	SITARIB (Koleksi Lontar Balai Bahasa Bali)
41		SIBANDIL (Fasilitasi Pengajaran BIPA dengan Balai Bahasa Provinsi Bali)	SIBANDIL (Fasilitasi Pengajaran BIPA dengan Balai Bahasa Provinsi Bali)
42		SINIAR (Subasita, Sibasindo, Sibasali)	SINIAR (Subasita, Sibasindo, Sibasali)
43			Kamus digital bahasa Minangkabau, dapat diakses secara sarung melalui laman https://limpapeh.id
44	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Peta komunitas Literasi Sumatera Barat dapat diakses melalui laman https://palitosumbar.kemdikbud.go.id/	Peta komunitas Literasi Sumatera Barat dapat diakses melalui laman https://palitosumbar.kemdikbud.go.id/
45		Seminar yaitu pemberian informasi ke masyarakat yang bernama Sinar Badaso dapat akses melalui kanal youtube	Seminar yaitu pemberian informasi ke masyarakat yang bernama Sinar Badaso dapat akses melalui kanal youtube
46	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Siaga Bahasa Mantap (Sigap)	a.Klik Bastra (Klinik Kebahasaan dan Kesastraan) b. Asli Bastra (Asistensi dan Fasilitasi Kebahasaan/Kesastraan) c. Info Bastra (Informasi Kebahasaan dan Kesastraan) d. Layanan Pengaduan
47	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	Siniar (podcast) Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	disiarkan melalui kanal Youtube Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Dari pembuatan siniar tersebut, diperoleh video-video kebahasaan dan kesastraan yang dapat mengedukasi masyarakat serta video-video mengenai program kerja Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat sebagai sarana promosi.
48		Pembuatan permohonan layanan daring melalui web	Melalui layanan tersebut, masyarakat luas dapat langsung mengajukan permohonan layanan melalui web sehingga

No	Satker	Inovasi	Keterangan
		Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat.	akses terhadap layanan menjadi semakin mudah dan cepat.
49	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	KBDKT - Kamus Bahasa Daerah Kaltim (http://kamus.kantorbahasakaltim.kemdikbud.go.id/)	KBDKT - Kamus Bahasa Daerah Kaltim (http://kamus.kantorbahasakaltim.kemdikbud.go.id/)
50		SERAYA - Siniar Literasi Raya (https://www.youtube.com/c/Kantorbahasakalimantantimur)	SERAYA - Siniar Literasi Raya (https://www.youtube.com/c/Kantorbahasakalimantantimur)
51		KLISARA - Klinik Bahasa Negara (https://sites.google.com/view/klinikbahasanegarakaltim)	KLISARA - Klinik Bahasa Negara (https://sites.google.com/view/klinikbahasanegarakaltim)
52	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Optimalisasi media sosial untuk pengutamaan bahasa negara (Program Detektif Bahasa), pemasyarakatan KBBI (Program Istilah Hari Ini dan Komik Peribahasa).	Optimalisasi media sosial untuk pengutamaan bahasa negara (Program Detektif Bahasa), pemasyarakatan KBBI (Program Istilah Hari Ini dan Komik Peribahasa).
53	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Menjadikan Media Sosial Sebagai Media Informasi dan Pendidikan bagi Masyarakat.	Menjadikan Media Sosial Sebagai Media Informasi dan Pendidikan bagi Masyarakat.
54		Kerja Sama dengan Berbagai Instansi di Daerah.	Kerja Sama dengan Berbagai Instansi di Daerah.
55	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Borang Pelaporan Kinerja Internal	Borang Pelaporan Kinerja Internal
56	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Tajar	Kolom esai kebahasaan dan kesastraan yang terbit di media massa cetak. Kehadiran Tajar merupakan salah satu wadah untuk menampung ide, gagasan, dan opini seputar isu-isu kebahasaan dan kesastraan oleh masyarakat umum.
57	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Inovasi Kantor Bahasa, Sistem Informasi, Data, dan Layanan (SIDAYA)	Inovasi Kantor Bahasa, Sistem Informasi, Data, dan Layanan (SIDAYA)
58		Inovasi Kantor Bahasa (Kamus Sasambo Digital)	Inovasi Kantor Bahasa (Kamus Sasambo Digital)
59		Inovasi Kantor Bahasa, Kamus dalam Jaringan Bahasa Indonesia Sistem Isyarat (Kadaring SIBI)	Inovasi Kantor Bahasa, Kamus dalam Jaringan Bahasa Indonesia Sistem Isyarat (Kadaring SIBI)
60		Inovasi Kantor Bahasa, Cerita Digital (Cerdik, Berbasis Laman, Spotify, dan YouTube Siniar Sasambo)	Inovasi Kantor Bahasa, Cerita Digital (Cerdik, Berbasis Laman, Spotify, dan YouTube Siniar Sasambo)
61		Inovasi Kantor Bahasa, Koleksi Manuskrip Kuno (Sinano, Berbasis Laman)	Inovasi Kantor Bahasa, Koleksi Manuskrip Kuno (Sinano, Berbasis Laman)
62	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sistem Informasi Pelaporan dan Layanan Bahasa dan Sastra (Sipelbastra) Inovasi ini merupakan sebuah	Sistem Informasi Pelaporan dan Layanan Bahasa dan Sastra (Sipelbastra) merupakan sebuah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan data secara digital dengan pengoptimalan penggunaan laman Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (KBP Babel). Sipelbastra dikembangkan sebagai sebuah gerbang informasi layanan terpadu yang berisi data kebahasaan dan kesastraan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang bahasa dan sastra. Sipelbastra dirancang ke dalam dua bentuk layanan informasi, yaitu layanan informasi pelaporan untuk kepentingan internal dan layanan informasi bahasa

No	Satker	Inovasi	Keterangan
			<p>dan sastra untuk eksternal. Pengembangan Sipelbastra yang terkait dengan informasi pelaporan individu maupun tim adalah dengan penyiapan folder yang berisi borang dalam bentuk google form. Folder tersebut berisi berbagai templat yang terkait dengan pemenuhan data untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna mempermudah setiap individu dan tim dalam menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, untuk layanan informasi bahasa dan sastra, Sipelbastra dikembangkan dengan menambah tampilan dan konten laman KBP Babel melalui penambahan fitur/menu layanan kebahasaan dan kesastraan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan mengintegrasikannya dengan media sosial KBP Babel dan laman lembaga lainnya.</p>
63	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Siniar Kewang Bahasa	<p>Inovasi dalam bidang Publikasi Kebahasaan dan Kesastraan via daring. Hasil dan manfaat yang diperoleh adalah menjangkau lebih banyak masyarakat secara umum untuk mendukung dan mengenalkan pelestarian bahasa dan sastra di Maluku</p>
64		Kamus Digital Bahasa Serua	<p>Bentuk inovasi dalam penyajian kamus bahasa daerah secara digital melalui Google Playstore sehingga bisa diakses oleh pengguna ponsel android yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Manfaat yang diperoleh adalah kemudahan akses kamus bahasa daerah oleh masyarakat secara digital.</p>
65	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Meningkatkan kerja sama dengan mitra terkait dengan pelaksanaan program utama Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu (Pekan Literasi Pelajar dan Siaran di RRI dan kuliah umum dengan perguruan tinggi)	<p>Meningkatkan kerja sama dengan mitra terkait dengan pelaksanaan program utama Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu (Pekan Literasi Pelajar dan Siaran di RRI dan kuliah umum dengan perguruan tinggi)</p>
66		lebih meningkatkan publikasi pelaksanaan program Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu melalui media sosial, cetak, dan elektronik.	<p>lebih meningkatkan publikasi pelaksanaan program Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu melalui media sosial, cetak, dan elektronik.</p>
67	Balai Bahasa Provinsi Riau	Kode batang (-barcode)	<p>inovasi pelayanan evaluasi kinerja dan layanan merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja dan layanan Balai Bahasa Provinsi Riau dari pengguna layanan. Para pengguna layanan yang hadir langsung ke Balai Bahasa Provinsi Riau untuk melakukan audiensi, kerja sama, dan silaturahmi akan diarahkan oleh petugas ULT untuk melakukan pindai kode batang yang berada di meja Unit Layanan Terpadu (ULT) Balai Bahasa Provinsi Riau yang berada di lobi depan kantor. Pemindaian kode batang saat ini sangat mudah dilakukan karena aplikasi tersebut sudah ada telepon selular</p>
68		Inovasi Sasaran Kegiatan	<p>Balai Bahasa Provinsi Riau terus berinovasi dalam mencapai sasaran kegiatan salah satunya yaitu dengan membuat peta persebaran bahasa di provinsi riau ke dalam bentuk digital dengan maksud untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui persebaran bahasa yang terdapat di provinsi riau. Informasi Bahasa Provinsi yang tersebar di Provinsi Riau</p>

Penghargaan

PENGHARGAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2022

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
1	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Penghargaan Zero Retur SP2D Non UP	DJPb Kemenkeu	31 Januari 2022	Retur SP2D sendiri adalah penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim
2		Penghargaan IDEAS 2022	Humas Indonesia	5 Agustus 2022	Penghargaan IDEAS 2022 Kategori Kebijakan Isu Sosial Melalui Program Komunikasi Revitalisasi Bahasa Daerah
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Penghargaan Zero Retur SP2D Non UP	DJPb Kemenkeu	31 Januari 2022	Retur SP2D sendiri adalah penolakan atau pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari Bank Penerima kepada Bank Pengirim
4	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Fasilitasi BIPA Tahun 2022	KBRI Ankara (Turki)	28 Juni 2022	Fasilitasi BIPA Tahun 2022
5		Fasilitasi BIPA Tahun 2022	KBRI Wina (Austria dan Slovenia)	23 Juni 2022	Fasilitasi BIPA Tahun 2022
6		Dukungan dan Fasilitasi Program PJJ BIPA Daring	KBRI Helsinki (Finlandia dan Estonia)	23 Juni 2022	Dukungan dan Fasilitasi Program PJJ BIPA Daring
7		Kerja sama dan Kolaborasi dalam Pengembangan Pengajaran Bahasa Indonesia	KBRI Bern (Swiss dan Liechtenstein)	2 Juli 2022	Kerja sama dan Kolaborasi dalam Pengembangan Pengajaran Bahasa Indonesia
8		Fasilitator BIPA Daring	KBRI Norwegia dan Islandia	20 Juni 2022	Fasilitator BIPA Daring
9	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	Penghargaan Dukungan Penggunaan KKP	DJPb Kemenkeu	19 Januari 2022	Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perbendaharaan atas 5 besar satker partisipasi aktif penggunaan KKP
10		Penghargaan Dukungan Pembinaan Literasi	LPKA II Palu, Kemenkumham	21 November 2022	Penghargaan atas peran aktif mendukung pembinaan Literasi Bahasa Kepada Anak Binaan di LPKA II Palu
11		Penghargaan atas upaya Pelindungan Sastra melalui	Pemerintah Kabupaten Banggai	13 Desember 2022	Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banggai atas upaya Balai Bahasa

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
		Revitali Sastra Lisan Ande-Ande.			Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan rangkaian kegiatan revitalisasi sastra lisan Ande-Ande yang dilaksanakan pada tahun 2022.
12	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	Peran aktif Balai Bahasa DIY dalam Program KAWRUH di Program 4 FM 106,6 MHz	RRI Yogyakarta	19 Desember 2022	Peran aktif Balai Bahasa DIY dalam program KAWRUH di Program 4 FM 106,6 MHz yang diselenggarakan setiap bulan satu kali siaran, yaitu pada setiap hari Rabu minggu kedua.
13	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	Perolehan Nilai SAKIP A (84.10) TA 2022	BPP Bahasa	22 Desember 2022	Perolehan Nilai SAKIP A (84.10) TA 2022
14		Perolehan Sinde Terbaik selama 1 Semester Tahun 2022	BPP Bahasa	5 Juli 2022	Perolehan Sinde Terbaik selama 1 Semester Tahun 2022
		Penghargaan atas partisipasi aktif edukasi dan komitmen pengembangan siaran lokal berkualitas di Provinsi Lampung dalam program Pembinaan Bahasa Indonesia siaran bahasa Indonesia di Radar Lampung TV	Radar Lampung TV	2 Juni 2022	Penghargaan atas partisipasi aktif edukasi dan komitmen pengembangan siaran lokal berkualitas di Provinsi Lampung dalam program Pembinaan Bahasa Indonesia siaran bahasa Indonesia di Radar Lampung TV
15	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Penghargaan atas Kerjasama dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	Gubernur Sulawesi Selatan	13 November 2022	Diberikan pada kegiatan FTBI Tingkat SMP di Makassar
16	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	Penghargaan atas Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa	Dinas Pendidikan Ogan Komering Ulu	22—25 Februari 2022	Penghargaan atas Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kemahiran Berbahasa
17		Penghargaan atas Pelaksanaan Kegiatan Program BIPA, UKBI, dan Seminar	Universitas PGRI Silampari	25 Juni 2022	Penghargaan atas Pelaksanaan Kegiatan Program BIPA, UKBI, dan Seminar

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
18		Penghargaan atas kerja sama dalam Penyusunan Bahan Kebijakan Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaram	5 September 2022	Penghargaan atas kerja sama dalam Penyusunan Bahan Kebijakan Penerapan Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Kegiatan Peningkatan Mutu Guru
19	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Sula	Pemerintah Daerah Kepulauan Sula	13 Desember 2022	Penghargaan diberikan di tanggal 13 Desember 2022 pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah
20		Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan oleh Dinas Pendidikan Halmaheras Selatan	Dinas Pendidikan Halmaheras Selatan	16 Desember 2022	Penghargaan diberikan di tanggal 16 Desember 2022 pada pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah
21	Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	Penghargaan dari Pemkab Buton Selatan	Pemkab Buton Selatan	25 Juli 2022	Diberikan atas dedikasi Kantor Bahasa Prov. Sultra dalam perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Juli 2022
22		Penghargaan dari Pemkot Bau-bau	Pemkot Bau-bau	16 Agustus 2022	Diberikan atas kerja sama, konsistensi dan dedikasinya dalam penggalakan Gerakan Literasi Nasional di Kota Baubau, tanggal 16 Agustus 2022
23		Penghargaan dari Harian Rakyat Sultra	Harian Rakyat Sultra	2 Juni 2022	Diberikan atas kerja dalam penerbitan rubrik bahasa, sastra, dan budaya di Harian Rakyat Sultra, tanggal 2 Juni 2022
24		Penghargaan dari Polda Sultra	Polda Sultra	28 Maret 2022	Diberikan atas penyelenggaraan kegiatan peningkatan profesionalisme bahasa hukum bagi PNPP Polda Sultra, tanggal 28 Maret 2022
25	Balai Bahasa Provinsi Papua	Penghargaan dalam mendukung perlindungan bahasa dan sastra di Kabupaten Jayapura yang diberikan oleh Dinas	Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	25 Maret 2022	Penghargaan dalam mendukung perlindungan bahasa dan sastra di Kabupaten Jayapura yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dalam Acara Penutupan Kegiatan Peningkatan Peningkatan Apresiasi Sastra bagi Guru SLTP Se-Kabupaten Jayapura Tahun

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
		Pendidikan Kabupaten Jayapura			2022 pada tanggal 25 Maret 2022. Piagam penghargaan diserahkan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura dan diterima oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua.
26		Penghargaan dalam bidang program dan berita yang ditayangkan di TVRI Papua yang diberikan oleh TVRI Papua.	TVRI Papua	19 Mei 2022	Penghargaan dalam bidang program dan berita yang ditayangkan di TVRI Papua yang diberikan oleh TVRI Papua. Penghargaan diberikan oleh perwakilan dari TVRI Papua yang datang secara langsung ke Balai Bahasa Provinsi Papua pada tanggal 19 Mei 2022.
27		Piagam penghargaan atas Kemitraan dan Layanan Giat UKBI Adaptif bagi Pelajar SMP Kota Pekalongan Tahun 2022 dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	Dinas Pendidikan Kota Pekalongan	19 Desember 2022	19 Desember 2022 -- Layanan Giat UKBI Adaptif Merdeka
28	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	Piagam penghargaan atas Kemitraan dan Layanan Giat UKBI Adaptif bagi Pelajar SMP Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	14 Desember 2022	14 Desember 2022 -- Layanan Giat UKBI Adaptif Merdeka
29		Piagam penghargaan atas Program Revitalisasi Tradisi Maca Babad Pasir Luhur Tahun 2022 dari Bupati Banyumas	Bupati Banyumas	29 Desember 2022	29 Desember 2022 -- Revitalisasi Tradisi Maca Babad Pasir Luhur
30		Pendukung Pelaksanaan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Kabupaten Pandeglang.	Kabupaten Pandeglang	26 Desember 2022	Diberikan pada kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023
31	Kantor Bahasa Provinsi Banten	Kerja Sama di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra di Lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten	26 Desember 2022	Diberikan pada kegiatan pembahasan MoA perjanjian kerjasama Badan Bahasa dan UIN

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
32	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	Audiensi	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Langkat	20 April 2022	Penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat diberikan pada tanggal 20 April 2022 pada saat Audiensi yang dilakukan oleh Tim Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ke Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
33		FTBI Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	5 Desember 2022	Penghargaan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diberikan pada tanggal 5 Desember 2022 kepada Tim Pelindungan dan Pemodernan setelah pelaksanaan FTBI Tingkat Provinsi.
34		Audiensi	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Toba	20 April 2022	Penghargaan dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Toba diberikan pada tanggal 20 April 2022 pada kegiatan audiensi yang dilakukan oleh tim Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara ke Dispora Kabupaten Toba.
35	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	Penghargaan dari Kabupaten Kepulauan Talaud	Penghargaan dari Kabupaten Kepulauan Talaud	7 November 2022	Penghargaan dari Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Peningkatan Literasi diberikan tanggal 7 November 2022
36		Penghargaan dari Konsulat Jenderal Filipina	Penghargaan dari Konsulat Jenderal Filipina	22 Oktober 2022	Penghargaan dari Konsulat Jenderal Filipina tentang Peningkatan Literasi diberikan tanggal 22 Oktober 2022
37		Penghargaan dari PLN Suluttenggo	Penghargaan dari PLN Suluttenggo	22 Oktober 2022	Penghargaan dari PLN Suluttenggo tentang Peningkatan Literasi diberikan tanggal 22 Oktober 2022
38		Penghargaan dari KPPN Manado	Penghargaan dari KPPN Manado	9 Mei 2022	Penghargaan dari KPPN Manado tentang Satuan Kerja IKPA Baik diberikan tanggal 9 Mei 2022
39	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	Predikat ZI-WBK dari Kemenpan RB	Kemenpan RB	15 Desember 2022	15 Desember 2022 diberikan saat kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program
40		Penghargaan sebagai Mitra dalam Upaya Pelindungan dan Pelestarian Bahasa Daerah Banyuwangi dari Dewan Kesenian Blambangan	Dewan Kesenian Blambangan	23 Mei 2022	23 Mei 2022 diberikan pada saat kegiatan Lokakarya Pengayaan Kosakata

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
41		Penghargaan atas Kerjasama dan Pelayanan Publik selama 14 tahun	-	15 Februari 2022	15 Februari 2022 diberikan saat kegiatan Pengembangan Karakter Pegawai melalui Mancakrida
42	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	kerjasama Pengembangan Kompetensi ASN	Pengadilan Tinggi Gorontalo	9 Juni 2022	Diserahkan pada acara Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Administrasi Kesekretariatan Bidang Kepegawaian dan Bidang Umum se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 9 Juni 2022
43		UPT Seminar	STMIK Ichsan Gorontalo	22 November 2022	Diserahkan pada Seminar Nasional dengan tema "Melek Literasi Digital, Cerdas di era Global" tanggal 26 November 2022
44		Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo	Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo	22 Oktober 2022	Diserahkan pada Pelatihan Teknis Tata Bahasa dalam Penyusunan Karya Ilmiah dan Teknis Penyuntingan Artikel Jurnal Tanggal 22 Oktober 2022
45	Balai Bahasa Provinsi Bali	Pengembangan Literasi di Yayasan Kul-Kul, Green School Bali	Green School Bali	31 Maret 2022	Tanggal 31 Maret 2022, Pengembangan literasi di Green School Bali
46		Maejo University, Thailand (Fasilitasi Pengajaran BIPA)	Maejo University	31 Maret 2022	Tanggal 31 Maret 2022, Fasilitasi pengajaran BIPA
47		APPBIPA Cabang Bali, Fasilitasi Program ke-BIPA-an	APPBIPA Cabang Bali	1 April 2022	Tanggal 1 April 2022, Fasilitasi pengajaran BIPA
48		Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Sinda Terbaik	BPP Bahasa	4 April 2022	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Sinda Terbaik
49		Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Predikat ZI-WBK	Menpan RB	6 Desember 2022	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Predikat ZI-WBK
50	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	Piagam penghargaan dari Radio Arbes FM	Radio Arbes FM	30 Juni 2022	tanggal penghargaan 30 Juni 2022 atas dukungan dan kerjasama dalam kegiatan Gelar wicara interaktif: Bahasa, Sastra, dan Literasi
51	Balai Bahasa Provinsi Aceh	Terbaik III : Tingkat Pengajuan Gaji Induk Tercepat Semester I	KPPN	25 Agustus 2022	Diberikan pada tanggal 25 Agustus 2022 pada acara KPPN Awards

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
52		Terbaik V : LPJ Terbaik Semester I	KPPN	25 Agustus 2022	Diberikan pada tanggal 25 Agustus 2022 pada acara KPPN Awards
53		Terbaik V : Pengiriman Capaian Output Tercepat, Tepat, dan Akurat Semester I	KPPN	25 Agustus 2022	Diberikan pada tanggal 25 Agustus 2022 pada acara KPPN Awards
54	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	Penghargaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah atas dukungan, kerja sama, dan perhatian khusus dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi di Provinsi Kalimantan Tengah.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	22 Mei 2022	Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
55		Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat atas terselenggaranya kegiatan Menulis Praktis KTI & KTP bagi Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	29 Maret 2022	kegiatan Menulis Praktis KTI & KTP bagi Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Kotawaringin Barat)
56		Penghargaan dari Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya atas dukungan, kerjasama, dan perhatian khusus dalam bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi di Kota Palangka Raya	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	2 Mei 2022	(2 Mei 2022, Acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya)
57		Penghargaan internal dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah Terbaik I pada kategori SATKER DAERAH/UPT dengan raihan	Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Maret 2022	(Maret 2022, Acara Penganugerahan SAKIP dan NKA Satker terbaik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021)

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
		Skor 89,53 predikat A implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021			
58	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	peringkat III laporan keuangan tahun anggaran 2021 terbaik tingkat UAKPA lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandung I kategori pagu sedang	KPPN Bandung I	28 Maret 2022	diberikan pada acara LK Award, 28 Maret 2022, yang dilaksanakan oleh KPPN Bandung I
59	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Kemitraan dan Layanan Ahli Bahasa	Polda Kaltim KPU Kota Samarinda Komisi Yudisial Ombudsman RI Kaltim	26 Des 2022 12 Des 2022 5 Des 2022 9 Des 2022	Penghargaan dari Polda Kaltim (26 Des 2022), KPU Kota Samarinda (12 Des 2022), Komisi Yudisial (5 Des 2022), Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Timur (9 Des 2022) atas layanan ahli bahasa dan kemitraan KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum.
60	Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	Kemitraan KKLP BIPA	Universitas Kartanegara	12 Des 2022	Penghargaan dari Universitas Kartanegara atas kemitraan KKLP BIPA (12 Des 2022).
61		Pelindungan Bahasa Daerah (Merdeka Belajar Ep. 17 - Revitalisasi)	Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Des 2022	Penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara (12 Des 2022) dan Lembaga Adat Dayak Kenyah (5 Des 2022) atas Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah Tahun 2022.
62		Kerjasama Finalisasi Draf Mapel Mulok Bahasa Daerah Kutai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur	7 Des 2022	Penghargaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur atas Kerjasama Penyusunan dan Finalisasi Draf Mapel Mulok Bahasa Daerah Kutai (7 Des 2022).
63	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penghargaan dari Pemda (Bupati) Alor atas Pelestarian dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Bupati Alor	4 April 2022	Tanggal 4 April 2022 di Kabupaten Alor

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
64		Penghargaan Kerja Sama UKBI dari Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	22 Juni 2020	Tanggal 22 Juni 2020 di kegiatan sosialisasi UKBI
65		Penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Lembaga Vertikal (Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022) dari Komisi Informasi Provinsi NTT	Badan Publik Informatif	7 Des 2022	Tanggal 7 Desember 2022 di kegiatan Anugerah Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2022
66	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	Penghargaan dari Kantor Imigrasi atas Pendampingan Pengutamaan Bahasa negara di Ruang Publik	Kantor Imigrasi	1 April 2022	Penghargaan Pendampingan Pengutamaan Bahasa negara di Ruang Publik diberikan pada tanggal 1 April 2022 pada kegiatan koordinasi program dengan daerah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Imigrasi TPI I Jambi.
67		Penghargaan dari KPPN Jambi untuk sepuluh besar satuan kerja terbaik dalam penilaian IKPA dari KPPN Jambi.	KPPN Jambi	-	Penghargaan untuk Sepuluh Besar Satuan Kerja Terbaik dalam Penilaian IKPA dari KPPN Jambi diberikan atas penilaian pengelolaan keuangan negara dengan nilai IKPA baik Penghargaan diberikan oleh kepala KPPN Jambi di akhir triwulan I.
68		Penghargaan dari Komunitas Literasi	Komunitas Literasi	-	Penghargaan atas peran aktif Kantor Bahasa Provinsi Jambi dalam Pembinaan Komunitas Literasi yang ada di Provinsi Jambi. Penghargaan diberikan oleh Pengurus Komunitas.
69	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	Penghargaan dari Pontianak Pos	Pontianak POS	11 Agustus 2022	11 Agustus 2022, dalam rangka kerjasama rubrik kebahasaan dan kesastraan.
70		Penghargaan dari DPRD Kabupaten Sambas	DPRD Kabupaten Sambas	22 Oktober 2022	22 Oktober 2022, dalam rangka kunjungan kerja DPRD Kabupaten Sambas.
71	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	Penghargaan dari SMP Negeri 7 Tanjungpinang atas kerja sama dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Uji Kemahiran Berbahasa	SMPN 7 Tanjungpinang	31 Mei 2022	Penghargaan dari SMP Negeri 7 Tanjungpinang atas kerja sama dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendampingan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi Pelajar Tahun 2022

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
		Indonesia (UKBI) bagi Pelajar Tahun 2022			
72		Penghargaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam atas pelaksanaan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Sekretariat Daerah di Kota Batam	Sekretaris Daerah Kota Batam	1 September 2022	Penghargaan dari Sekretaris Daerah Kota Batam atas pelaksanaan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Sekretariat Daerah di Kota Batam
73		Penghargaan dari Kadisdikbud Natuna atas pelaksanaan kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.	Kadisdikbud Natuna	9 Agustus 2022	Penghargaan dari Kadisdikbud Natuna atas pelaksanaan kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
74		Penghargaan dari Kadisdikbud Kab. Karimun atas pelaksanaan kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.	Kadisdikbud Kab. Karimun	22 Agustus 2022	Penghargaan dari Kadisdikbud Kab. Karimun atas pelaksanaan kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karimun.
75		Penghargaan dari Sekretaris Daerah Bintan atas pelaksanaan kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.	Sekretaris Daerah Bintan	22 November 2022	Penghargaan dari Sekretaris Daerah Bintan atas pelaksanaan kegiatan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan.

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
76		Penghargaan dari Forum Taman Bacaan Provinsi (FTBM) Kepulauan Riau atas kerja sama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan minat Baca-Tulis masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.	FTBM Kepri	12 November 2022	Penghargaan dari Forum Taman Bacaan Provinsi (FTBM) Kepulauan Riau atas kerja sama Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan minat Baca-Tulis masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
77	Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan atas Kerja Sama Siaran Pembinaan Bahasa dan Sastra	RRI Mataram	30 Mei 2022	Tanggal 30 Mei 2022, di berikan pada acara Siaran RRI Mataram
78		Penghargaan sebagai Satuan Kerja Pengelola Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) terbaik di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek periode bulan Januari--Juni 2022 dan September 2022	BPP Bahasa	5 Juli 2022	Tanggal 5 Juli, 30 Oktober 2022 di Rapat Pimpinan Jakarta
79		Piagam penghargaan atas kesediaan menerima kunjungan relawan Bale Baca Kerajaan Dongeng serta sumbangsih ide dan gagasan Gerakan Literasi	Relawan Bale Baca Kerajaan Dongeng	-	Tanggal , Pemberdayaan Komunitas Literasi di Lingsar Lombok Barat
80		Penghargaan atas Pendampingan Penggunaan Bahasa Negara dalam Tata Naskah Dinas dan Ruang Publik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Daerah Provinsi NTB	27 September 2022	Tanggal 27 September 2022, di acara Pendampingan Penggunaan Bahasa Negara dalam Tata Naskah Dinas dan Ruang Publik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi NTB di Graha Gubernur
81		Penghargaan Hari Bahasa Ibu Internasional Tahun 2022	-	19 Februari 2022	Tanggal 19 Februari 2022, di acara Hari Bahasa Ibu Internasional bekerja sama dengan pemerintah daerah

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
		Dalam tema Peningkatan Literasi Generasi Muda			
82		Penghargaan atas keberhasilannya membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) tahun 2022 berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal (TPI) Kemendikbudristek	TPI Kemendikbudristek	12 Januari 2022	Tanggal 12 Januari 2023, diacara Rapat Kerja 16-19 Januari 2023 di Hotel Aston Grogol
83	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik III pengelola UP kategori satker pagu kecil	KPPN	13 April 2022	Kepala KPPN langsung datang ke satker untuk menyerahkan sertifikatnya pada tanggal 13 April 2022
84		Penghargaan dari KPPN Pangkalpinang atas capaian upload Berita Acara Migrasi (BAM) Saldo Awal Modul Persediaan SAKTI Tahun Anggaran 2022 Secara Cepat dan Benar.	KPPN Pangkalpinang	1 Juli 2022	1 Juli 2022 diserahkan file pdfnya oleh KPPN Pangkalpinang.
85	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penghargaan dari KPPN Pangkalpinang atas capaian upload Berita Acara Migrasi (BAM) Saldo Awal Modul Aset tetap SAKTI Tahun Anggaran 2022 Secara Cepat dan Benar.	KPPN Pangkalpinang	13 Juli 2022	13 Juli 2022 diserahkan file pdfnya oleh KPPN Pangkalpinang.
86		Penghargaan dari KPPN Pangkalpinang atas capaian upload Berita Acara Migrasi (BAM) Saldo Awal Modul GLP Sakti Tahun 2022 secara Cepat dan Benar.	KPPN Pangkalpinang	14 Juli 2022	14 Juli 2022 diserahkan file pdfnya oleh KPPN Pangkalpinang.
87		Penghargaan dari Dewan Kesenian Belitung atas Pelaksanaan Pelindungan	Dewan Kesenian Belitung	22 Juli 2022	22 Juli 2022 diberikan pada kegiatan Pelatihan Revitalisasi Sastra Lisan Dul Mulok Belitung.

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
		Bahasa dan Sastra Daerah Melayu Belitung.			
88	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	Penghargaan atas kerjasama publikasi kebahasaan dan kesastraan dari Harian Kabar Timur	Harian Kabar Timur	-	Penghargaan atas kerjasama publikasi kebahasaan dan kesastraan dari Harian Kabar Timur
89		Penghargaan atas kerjasama publikasi kebahasaan dan kesastraan dari RRI	RRI	-	Penghargaan atas kerjasama publikasi kebahasaan dan kesastraan dari RRI
90		Penghargaan atas kerjasama publikasi kebahasaan dan kesastraan dari Tribun News	Tribun News	-	Penghargaan atas kerjasama publikasi kebahasaan dan kesastraan dari Tribun News
91		Disahkannya Perda Inisiatif komis IV DPRD Provinsi Maluku Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Pelindungan Bahasa Daerah	Komisi IV DPRD Provinsi Maluku	-	Disahkannya Perda Inisiatif komis IV DPRD Provinsi Maluku Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia, Pelestarian dan Pelindungan Bahasa Daerah
92	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu	Pemprov Bengkulu	21 Juli 2022	diberikan atas kerja sama dalam rangka penguatmaan dan pembinaan bahasa di ruang publik dan dokumen lembaga pada kegiatan sosialisasi pembinaan lembaga 21 Juli 2022
93		penghargaan dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu,	Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu	-	atas kerja sama Program Praktik Kerja Lapangan Mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Bengkulu
94		penghargaan dari UKM P3M Universitas Bengkulu	UKM P3M Universitas Bengkulu	-	atas kerja sama dalam Kegiatan Antologi Karya Sastra (Aksara) UKM P3M Universitas Bengkulu
95		penghargaan dari Program Studi Sastra Inggris FKIP Universitas Dehasen Bengkulu	Program Studi Sastra Inggris FKIP Universitas Dehasen Bengkulu	-	atas kerja sama Praktik Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa Program Studi Sastra Inggris FKIP Universitas Dehasen Bengkulu
96		penghargaan dari Universitas Dehasen Bengkulu	Universitas Dehasen Bengkulu	-	atas kerja sama Sosialisasi UKBI Adaptif Merdeka dari Universitas Dehasen Bengkulu

No	Satker	Penghargaan	Instansi Pemberi	Tanggal	Keterangan
97		penghargaan dari SMA IT Iqra' Kota Bengkulu	SMA IT Iqra' Kota Bengkulu	-	atas kerja sama giat UKBI dari SMA IT Iqra' Kota Bengkulu
98		penghargaan dari SMAN 2 Rejang Lebong	SMAN 2 Rejang Lebong	-	atas kerja sama giat UKBI dari SMAN 2 Rejang Lebong
99		penghargaan dari MAN Insan Cendikia Bengkulu Tengah	MAN Insan Cendikia Bengkulu Tengah	-	atas kerja sama giat UKBI dari MAN Insan Cendikia Bengkulu Tengah
100		penghargaan dari SMPN 4 Kota Bengkulu	SMPN 4 Kota Bengkulu	-	atas kerja sama giat UKBI dari SMPN 4 Kota Bengkulu
101		penghargaan dari MTsN 1 Kota Bengkulu.	MTsN 1 Kota Bengkulu.	-	atas kerja sama giat UKBI dari MTsN 1 Kota Bengkulu.
102	Balai Bahasa Provinsi Riau	Piagam Penghargaan dari Riau Pos Atas kerjasama Rubrik Alinea yang terbit setiap edisi Ahad di Harian Pagi Riau Pos selama 2022	Riau POS	Tahun 2022	Piagam Penghargaan dari Riau Pos Atas kerjasama Rubrik Alinea yang terbit setiap edisi Ahad di Harian Pagi Riau Pos selama 2022
103		Penghargaan dalam rangka kunjungan Nusantara The Teacher Institute for Education System Research Thailand ke Balai Bahasa Provinsi Riau atas kerjasama di bidang BIPA	Nusantara The Teacher Institute	2 November 2022	diberikan pada 2 November 2022, diberikan pada acara study banding guru dari thailand program BIPA

Lembar Hasil Evaluasi Kinerja



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2022
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27
2.	Pengukuran Kinerja	30%	27
3.	Pelaporan Kinerja	15%	13.5
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22.5
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	90.00

No	Catatan
1	Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2	Dokumen notula masih menjadi satu kesatuan dengan laporan. Sehingga harus dilakukan pengecekan lebih mendalam.
3	Pelaksanaan rapat meliputi beberapa agenda, sehingga isi pembahasan notula terdapat poin-poin sesuai pokok pembahasan.

No	Rekomendasi
1	Penjelasan dalam pengukuran kinerja BPP Bahasa lebih informatif, sehingga rumusan permasalahan dan solusi lebih jelas.
2	Format Notula sudah ada, namun masih ada yg belum terdokumentasi secara terpisah. Sehingga akan diperbaiki pada dokumen data dukung.
3	Beberapa agenda rapat yang dilaksanakan harus dilakukan pengecekan oleh tim pemeriksa terkait dengan kualitas dan kebermanfaatan dokumen perencanaan kinerja.

Jakarta, 14 Juli 2022

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,



E. Aminudin Aziz

SK Penghargaan ZI-WBK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 74510/A5/HK.08/2022

21 Desember 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 507/M/2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Semua Kepala Biro di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 9. Semua Kepala Pusat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 10. Pemimpin Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan; dan
 11. Pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 507/M/2022 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/M/2022
TENTANG
PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan penguatan integritas pada satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang melakukan pembangunan zona integritas tahun 2022;
- b. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada semua satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal sebagai penerima penghargaan internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2022 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Internal.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal dan terdapat lebih dari 30% (tiga puluh persen) satuan kerja sejenis yang telah berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sehingga tidak perlu diajukan ke Tim Penilai Nasional, untuk selanjutnya disebut Kelompok Penerima Penghargaan Internal I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

- b. satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal dan diajukan ke Tim Penilai Nasional, untuk selanjutnya disebut Kelompok Penerima Penghargaan Internal II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penerima Penghargaan Internal diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sesuai.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/M/2022
TENTANG
PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022

Kelompok Penerima Penghargaan Internal I

Satuan Kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi:

1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bangka Belitung;
2. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara; dan
5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/M/2022
TENTANG
PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022

Kelompok Penerima Penghargaan Internal II

- A. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi
1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 2. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 5. Pusat Penguatan Karakter;
 6. Institut Teknologi Sepuluh November, Fakultas Sains dan Analitika Data;
 7. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan;
 8. Universitas Tanjungpura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 9. Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 10. Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika; dan
 11. Universitas Negeri Jember, Fakultas Hukum.
- B. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
1. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
 3. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan
 4. Pusat Asesmen Pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, NADIEM ANWAR MAKARIM



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

Judul Buku Bacaan Literasi

Judul Buku Bacaan Literasi yang Dihasilkan Badan Bahasa Pada Tahun 2022

No.	Judul Buku	Nama Penulis	Jenjang	Jumlah Halaman
1	Merah	Andrea Sharon	B2	32
2	Rahasia Kak Risa	Ary Nilandari	B2	32
3	Menunggu Ibu	Ary Nilandari	B3	40
4	Dia Hebat!	Barbara Eni Priyanti	B2	32
5	Panggil Aku Namaku	Barbara Eni Priyanti	B3	40
6	<i>Rahasia!</i>	Dewi Cholidatul Ummah	B2	32
7	Getaran Sunyi	Dewi Cholidatul Ummah	B3	40
8	Saga Tak Sendiri	Dian Sukma Kuswardhani	B2	32
9	Pesawat Kertas Persahabatan	Dian Sukma Kuswardhani	B3	40
10	Dengar Laut Mengalun	Dwi Oktarina	B3	40
11	Pertunjukan Sape	Dwi Rahmawati	B3	40
12	Donat Istimewa Keno	Dyah Umiyarni Purnamasari	B3	40
13	Payung Siapa Itu?	Eni Wulansari	B2	32
14	Tarian Sahabat	Erawati Wijaya S	B2	32
15	Anis Tidak Suka	Erna Fitrini	B2	32
16	Aku Bantu	Erna Fitrini	B3	40
17	Bajak Laut dari Matalawa	Esti Asmalia	B3	40
18	Wuri Berani Menegur	Fajriatun Nurhidayati	B2	32
19	Pertunjukan Istimewa Mima	Fajriatun Nurhidayati	B3	40
20	Harta Karun Balado	Fatimah Zahra	B2	32
21	Aku Juga Ingin Jadi Spesial!	Felicia Amara	B2	32
22	Kaki Emas	Grace Marina Sophia A.	B2	32
23	Maaf, Tapi Tidak!	Hamidah Jauhary	B2	32
24	Ssst, Ayah sedang Tidur!	Hervianna Artha	B2	32
25	Mengusir Monster Gelitik	Hervianna Artha	B3	40
26	Hore... Kukatakan Ideku	Ira Diana	B3	40
27	Petualang Antariksa!	Jessica Putri Elizabeth	B2	32
28	Ipan Tahu Cara Mengingat	Khulatul Mubarakah	B2	32
29	Aduh, Beru Berulah Lagi	Lydia Angela Gonidiharjo	B2	32
30	Si Anak Dieng	Muhammad Fauzi	B3	40
31	Seperti Apa Kasih Sayang Itu	Nuraini Fahmawati	B3	40
32	Apa Pesannya	Nurul Chomaria	B2	32
33	Hari Seru Gebi	Oky Endah Noorsari	B3	40
34	Kapal Kapten Alka	Pratiwi Ambarwati	B3	40
35	Cita-Cita Anya	R. A. Laksmi Priti Manohara (Laksmi Manohara)	B3	40
36	Penculikan Naya	Ridwan (Iwok Abqary)	B3	40
37	Bara si Kaki Ajaib	Ruslan Ajileo	B3	40
38	Mencari Bunga Bintangur	Ruwi Meitasari	B3	40
39	Mawar Melati Semua Indah	Sabir	B3	40
40	Kode Rahasia Persahabatan	Salma Intifada	B3	40
41	Pantai untuk Semua	Sarah Fauzia	B2	32
42	Arun Membaca Laut	Tuti Adhayati	B2	32

No.	Judul Buku	Nama Penulis	Jenjang	Jumlah Halaman
43	Buku Suara untuk Lita	Tyas KW (K Waskitaningtyas)	B2	32
44	Tugas Penting Reno	Widia Rosanti	B3	40
45	Lima Anak dan Rencana Besar Mereka	Widjati Hartiningtyas	B3	40
46	Berputar! Berputar!	Winna Citra Lanidya	B2	32
47	Baju untuk Kak Abu	Wulandari Pratiwi	B2	32
48	Warna-Warni Eja	Yunita Candra Sari	B2	32
49	Gara-Gara Ole	Zulfa Utami Adiputri	B2	32
50	Di Hati Riri	Zulfa Utami Adiputri	B3	40
51	Akhirnya Didi Tahu	Ahmad Khoirus Salim	B1	28
52	Ayla dan Kacamata Kak Livi	Laila	B1	28
53	Fokus! Fokus! Lempar!	Wenny Oktavia	B1	28
54	Izin Dahulu, ya!	Wenny Oktavia	B1	28
55	Dung Trek Trek Dung	Elis Siti Mariam	B1	28
56	Kuskus dan Tauntaun	Esther Rita Embram	B1	28
57	Gerobak Takung	Erwin Wibowo	B1	28
58	Semua Berguna	Dian R. Pranawengtyas	B1	28
59	Berjuanglah Orim	A. Merfianti	B1	28
60	Si Zozo	Muhammad Ikhsan	B1	28
61	Perjalanan ke Sawah	Wartono	B1	28
62	Merpati untuk Arul	Wartono	B1	28
63	Bagaimana Caranya	Afifah Nada P. R	B1	28
64	Odang Pintar	Hasan Al Banna	B1	28
65	Ada Monster di Kolam	Joni Syahputra	B1	28
66	Nana Tidak Berbeda	Mutiara	B1	28
67	Ela si Kecil yang Baik Hati	Zuddi Ichwan	B1	28
68	Kue Pisang Asyik	Syarifah Zuriyanti	B1	28
69	Tiwul Tomi	Galuh Ayuning Tyas	B1	28
70	Kimo Mari Berteman	Olga Chaesa Novianti	B1	28
71	Mengenal Rupiah	Zahrotun Ulfah	B1	28
72	Tun Teha Usai dari Morella	Zahrotun Ulfah	B1	28
73	Bubur Pedas Arum	Prima Duantika	B1	28
74	Senyum Ulan	Retno Utami	B1	28
75	Teman Istimewaku	Yulita Fitriana	B1	28

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id

**Badan Bahasa
Bermartabat
Bermanfaat**

